

PERILAKU *FRAUD* DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

TESIS



Diajukan Oleh :

Rasyid Ari Nugroho

18919011

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2023

PERILAKU *FRAUD* DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

TESIS



Diajukan Oleh :

Rasyid Ari Nugroho

18919011

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Februari 2023



Rasyid Ari Nugroho

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dekar Urumsah', is written over a horizontal line.

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., C.FrA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

RASYID ARI NUGROHO

No. Mhs. : 18919011

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

PERILAKU FRAUD DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

Penguji II



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Mengetahui

Ketia Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT karena dengan izin dan kuasa-NYA tesis yang berjudul “Perilaku *Fraud* dalam Proses Perencanaan dan penganggaran” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan hingga berada di zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga syafaat beliau sampai kepada kita hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun guna memenuhi prasyarat menyelesaikan Program Master (S-2) pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Adapun dalam penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf akademika.
2. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS atas kesempatan yang diberikan kepada penulis hingga dapat menimba ilmu di Fakultas tercinta.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang juga selaku dosen pembimbing, atas segala kebaikan, bimbingan, dan arahnya selama ini. Komunikasi yang sangat baik di tengah pandemi, di tengah keterbatasan bertatap muka tidak lantas menghambat proses bimbingan sehingga Alhamdulillah penulis bisa sampai ke tahap ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan bagi bapak dalam menjalankan

- segala aktivitas. Penulis bangga dan beruntung bisa bertemu dan dibimbing oleh bapak.
4. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi yang telah memfasilitasi dan mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
 5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dan rekan-rekan di Maksi 17. Suatu kesempatan yang luar biasa bertemu dengan dosen-dosen terbaik yang dengan ikhlas mentransfer *knowledge* dan *skill*nya kepada kami.
 6. Seluruh admisi yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan akademik kami selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala bantuannya.
 7. Orang tua tercinta, Bapak Djarwo dan Ibu Rini yang tidak pernah henti-hentinya mendoakan keberhasilan anaknya. Serta mertua tercinta Papa Basri dan Mami Arwita yang tidak henti-hentinya memanjatkan do'a.
 8. Istri, Reuty Fajar Aqnisa yang dengan sabarnya memberikan banyak masukan terkait penyelesaian tesis penulis, memberikan motivasi dan perhatian.
 9. Kedua Putri Tercinta Uni Ashilah Kaia Farzana dan Adek Ameera Sabiya Baihati. Terima kasih sudah memberi motivasi bapak untuk berjuang menyelesaikan studi.
 10. Semua responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
 11. Teman-teman seperjuangan di Maksi 17. Pak Agus, Bang Ical, Mas Surya, Rizman, Bayu, Faruq, Faisal, Andi, Mbak Ade, Bu Linda, Mbak Dini, Bu Ruby, Mbak Lidya, Desy, Fenti, Kalis, Selfi, Aisyah, Pane. Bahagia dan beruntung bisa bertemu orang-orang hebat seperti kalian. Semoga Allah mewujudkan semua cita-cita dan harapan kalian. Aamiin..

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya penulisan tesis ini. Penulis haturkan terima kasih, semoga Allah

senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada hal-hal yang belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Akuntansi ke depan.

Yogyakarta, Februari 2023
Penulis

Rasyid Ari Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	14
2.1. Definisi <i>Fraud</i>	14
2.2. <i>Fraud Tree</i>	15
2.3. Teori <i>Fraud Pentagon</i>	17
2.4. <i>Theory of Planned Behavior</i>	25
2.5. Penganggaran Sektor Publik.....	27
2.5.1 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat.....	28
2.5.2 Reformasi Keuangan dan Perencanaan di Indonesia.....	29
2.5.3 Anggaran Berbasis Kinerja	31
2.5.4 Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran	35
2.6. Penelitian Terdahulu.....	36
2.7. Perumusan Hipotesis	43
2.7.1. Tekanan Eksternal Berpengaruh Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	43
2.7.2. Kelemahan Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	44
2.7.3. Budaya Etis Organisasi Berpengaruh Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	45
2.7.4. Perilaku tidak Etis Berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran.....	46
2.7.5. Sikap (<i>Attitude Toward Behavior</i>) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	47
2.7.6. Norma Subjektif (<i>Subjective Norms</i>) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	49

2.7.7.	Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	49
2.7.8.	Niat Berpengaruh Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	50
2.8.	Kerangka Model Penelitian.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		52
3.1.	Populasi dan Sampel.....	52
3.2.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.3.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	54
3.3.1.	Tekanan (Tekanan Eksternal)	54
3.3.2.	Kesempatan (Kelemahan Sistem Informasi)	55
3.3.3.	Rasionalisasi (Budaya Etis Organisasi)	56
3.3.4.	Arogansi (Perilaku tidak Etis)	57
3.3.5.	Sikap (<i>Attitude Toward Behavior</i>)	58
3.3.6.	Norma Subjektif (<i>Subjective Norms</i>)	59
3.3.7.	Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>)	60
3.3.8.	Niat (<i>Intention to Engage Fraud</i>)	61
3.3.9.	<i>Fraud</i> Dalam Perencanaan dan Penganggaran	62
3.4.	Teknik Analisis Data.....	63
3.5.	Uji Kualitas Data.....	64
3.5.1.	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	64
3.5.2.	Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		67
4.1.	Hasil Pengumpulan Data.....	67
4.2.	Hasil Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	69
4.2.1.	Hasil Uji Validitas Data	69
4.3.	Hasil Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	73
4.3.1.	Hasil Uji Collinearity (Inner VIF Values)	73
4.3.2.	Hasil Uji Koefisien Determinan (<i>R-Square</i>)	74
4.3.3.	Hasil Uji Signifikansi (<i>Uji-t</i>)	75
4.4.	Pembahasan.....	75
4.4.1.	Tekanan (Tekanan Eksternal) Berpengaruh Positif Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	75
4.4.2.	Kesempatan (Kelemahan Sistem Informasi) Berpengaruh Positif Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	77
4.4.3.	Rasionalisasi (Budaya Etis Organisasi) Berpengaruh Positif Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	78
4.4.4.	Perilaku Tidak Etis Berpengaruh Positif terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran.....	80
4.4.5.	Sikap (<i>Attitude Toward Behavior</i>) Berpengaruh Positif Terhadap Niat Berbuat <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	81
4.4.6.	Norma Subjektif (<i>Subjective Norms</i>) Berpengaruh Positif Terhadap Niat Berbuat <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	82

4.4.7. Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>) Berpengaruh Positif Terhadap Niat Berbuat <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	83
4.4.8. Niat Berpengaruh Positif Terhadap <i>Fraud</i> dalam Perencanaan dan Penganggaran	84
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Kontribusi Penelitian.....	88
5.3 Implikasi Penelitian.....	88
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	91
5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perkembangan Teori <i>Fraud</i>	17
Tabel 2.2. Permasalahan Perencanaan dan Anggaran.....	36
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan <i>Fraud</i>	38
Tabel 3.1. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Tekanan Eksternal.....	55
Tabel 3.2. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kelemahan Sistem Informasi.....	56
Tabel 3.3. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Budaya Etis Organisasi.....	57
Tabel 3.4. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Perilaku Tidak Etis.....	58
Tabel 3.5. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Sikap.....	58
Tabel 3.6. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Norma Subjektif.....	59
Tabel 3.7. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kontrol Perilaku.....	60
Tabel 3.8. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Niat.....	61
Tabel 3.9. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel <i>Fraud</i>	62
Tabel 4.1. Data Responden Berdasarkan Posisi.....	67
Tabel 4.2. Data Responden Berdasarkan Wilayah.....	68
Tabel 4.3. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 4.4. Data Responden Berdasarkan Usia.....	68
Tabel 4.5. Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	69
Tabel 4.6. Perbandingan Nilai Item Loading dan Nilai AVE Awal dan Akhir	70
Tabel 4.7. Nilai <i>Cross Loading</i>	71
Tabel 4.8. Nilai Korelasi Antar Variabel.....	72
Tabel 4.9. Nilai <i>Composite Reliability</i>	73
Tabel 4.10. Hasil Uji <i>Collinearity (Inner VIF Values)</i>	74
Tabel 4.13. Hasil Uji <i>Coefficient Determinant (R-Square)</i>	74
Tabel 4.14. Hasil Uji Signifikansi (Uji-t).....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. <i>Fraud</i> yang paling merugikan di Indonesia.....	2
Gambar 2.1. Kerangka <i>Fraud Triangle</i>	18
Gambar 2.2. Kerangka <i>Fraud Diamond</i>	19
Gambar 2.3. Kerangka <i>Fraud Pentagon</i>	20
Gambar 2.4. <i>Theory of Planned Behavior</i>	26
Gambar 2.5. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Kementerian dan Lembaga...	29
Gambar 2.6. Kerangka Model Penelitian.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Tabulasi Data
- Lampiran 3 : Diagram Model (PLS Algorithm) - Awal
- Lampiran 4 : Diagram Model (PLS Algorithm) - Akhir
- Lampiran 5 : Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
- Lampiran 6 : Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melihat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan *fraud pentagon theory* dan *theory of planned behavior (TPB)*. Masing-masing faktor diwakili oleh proksi tekanan eksternal (tekanan), kelemahan sistem informasi (kesempatan), budaya etis organisasi (rasionalisasi), dan niat, serta sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (*Competence*). Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh total 225 pegawai bagian perencanaan dan pegawai bagian pengelola anggaran pada instansi di bawah kementerian dan lembaga yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dianalisis dengan metode kuantitatif deskriptif, yang diuji menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menemukan bahwa kecurangan dalam proses perencanaan dan penganggaran dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan niat. Adapun niat itu sendiri dipengaruhi oleh sikap dan kontrol perilaku.

Kata Kunci: *fraud*, *fraud pentagon theory* dan *theory of planned behavior (TPB)*, perencanaan dan penganggaran.

ABSTRACT

This study aims to look at the factors that influence fraud behavior in the planning and budgeting process based on the pentagon fraud theory and theory of planned behavior (TPB). Each of these factors is represented by proxies of external pressures (pressure), information system weaknesses (opportunity), organizational ethical culture (rationalization), and intentions, as well as attitudes, subjective norms, and behavioral controls (Competence). The research sample was determined using purposive sampling method, and obtained a total of 225 employees of the planning department and employees of the budget management section in agencies under ministries and institutions located in Central Java Province and Yogyakarta Special Region Province. The Data were analyzed by descriptive quantitative method, which was tested using Partial Least Square (PLS). The results of the study found that fraud in the planning and budgeting process is influenced by external pressures and intentions. The intention itself is influenced by attitude and behavioral control.

Keywords : *fraud, fraud pentagon theory dan theory of planned behavior (TPB), planning and budgeting.*

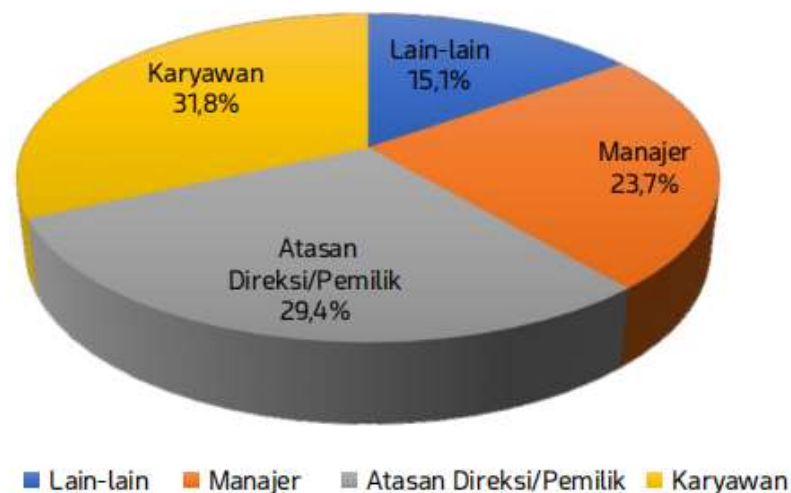
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pandemi *Covid-19* di Indonesia tidak diragukan lagi telah memengaruhi semua sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan sektor sosial lainnya (Gallego et al., 2020; Hope et al., 2020). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pandemi *Covid-19* di Indonesia dapat memaksa 3,78 juta orang jatuh miskin dan 5,2 juta orang kehilangan pekerjaan (Gorbiano, 2020). Masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin lebih rentan terhadap *Covid-19* karena, mau atau tidak mau, mereka terpaksa meninggalkan rumah untuk pergi bekerja dan terkadang tidak mengikuti protokol kesehatan.

Untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat, baik pemerintah pusat maupun daerah telah merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan. Program bantuan sosial yang dikenal sebagai Bansos, yang memberikan bantuan kepada masyarakat kelas bawah yang terkena dampak langsung dari dampak pandemi Covid-19, merupakan salah satu strategi yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Namun, tampaknya banyak pihak yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Karyawan adalah pelaku *fraud* paling besar di Indonesia yaitu sebesar 31,8%, menurut laporan tahunan ACFE Indonesia 2019, diikuti oleh direktur/pemilik sebesar 29,4%.



Gambar 1.1. *Fraud* yang paling merugikan di Indonesia Sumber : Laporan ACFE 2019

Setelah tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dana jaminan sosial dari korban Covid-19. Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tidak menggunakan anggaran Dana Pandemi Covid-19 (bbc.com, 2020).

Kemungkinan korupsi dana jaminan sosial membuat banyak pihak khawatir. Melalui aplikasi tersebut, KPK telah menerima 118 laporan masyarakat tentang penyaluran dana jaminan sosial. sejak 5 Juni 2020, saat KPK pertama kali memperkenalkan aplikasi JAGA. Menurut Sari, 2020, masyarakat telah melaporkan sejumlah kejadian kepada KPK dari 78 kotamadya, 7 kabupaten, dan 71 kabupaten/kota.

Selain KPK, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima ratusan laporan tentang penyalahgunaan dana bansos dari berbagai masyarakat. Laporan-laporan tersebut dapat disimpulkan dalam lima hal: 1) distribusi bantuan yang tidak merata dari segi personil dan waktu di daerah-daerah yang dituju; 2) Keadaan darurat, individu yang belum terdaftar, atau kebalikannya; 3) individu yang terdaftar tetapi belum menerima bantuan; 4) individu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan karena

memegang sertifikat importir; (5) Kurangnya sosialisasi dalam prosedur pengaduan bagi penerima bantuan (Harahap, 2020).

Pada lima titik rawan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah melakukan identifikasi potensi masalah penyalahgunaan dana bantuan sosial yaitu : 1) pendataan tugas yang tidak tepat; 2) penerima bantuan tidak tepat sasaran; 3) penyalahgunaan dana bantuan; (4) jumlah bantuan tidak sebanding dengan jumlah yang diterima; 5) pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang bukan penanggung jawab atas penyaluran bantuan; 6) anggaran bantuan dibiayai ganda (APBN, APBD, dan Desa) (Hasan, 2020).

Secara keseluruhan, ada 240 kasus korupsi pendidikan yang diselidiki oleh penegak hukum sejak Januari 2016 hingga September 2021, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus-kasus tersebut mencapai Rp1,6 triliun dan terjadi dalam kurun waktu 2007 hingga 2021. Selain itu, melalui pengamatan terhadap pembelian produk dan jasa di sektor pendidikan, ditemukan beberapa pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak dapat digunakan karena diblokir atau tidak lengkap. Berdasarkan tahun terjadinya korupsi, diketahui bahwa korupsi di sektor pendidikan masih terus terjadi meskipun ada epidemi COVID-19. Empat dari dua belas contoh korupsi pendidikan yang dilaporkan pada tahun 2020-2021 termasuk dalam konteks penanganan COVID-19,

Pembelian produk dan jasa non-infrastruktur, seperti buku, arsip sekolah, mebel, gawai TIK untuk e-learning, pembelian tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, dan lain-lain, merupakan tempat terjadinya mayoritas korupsi. Berbagai sumber anggaran dan program, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), dana otonomi khusus, anggaran Kemendikbud, anggaran Kemenag, dan APBD, bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa yang korup ini.

Terdapat tanda-tanda bahwa korupsi skala kecil dan korupsi yang lebih luas saling berkaitan. Aparat penegak hukum sejauh ini telah menuntut banyak kasus korupsi kecil yang terjadi di sekolah-sekolah. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa adanya pemerasan dari organisasi di atasnya, seperti Dinas Pendidikan dan penegak hukum, merupakan salah satu sumber korupsi di sekolah. Terkadang, karena adanya pemerasan, kepala sekolah dipaksa masuk ke dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan selain mengutak-atik anggaran sekolah. Keharusan untuk mengembalikan uang suap yang telah mereka keluarkan adalah akibat dari jual beli jabatan, yang merupakan elemen lainnya.

Peneliti ICW bekerja sama dengan rekan-rekan CSO mengidentifikasi empat tema kunci dalam PBJ sektor pendidikan, yaitu: (1) Masih terdapat PBJ yang tidak sesuai kebutuhan penerima manfaat (2) Terdapat PBJ yang tidak dapat digunakan karena belum dilengkapi sarpras atau bahkan mangkrak; (3) Terdapat PBJ berupa bangunan fisik yang kualitasnya kurang baik/ tidak tahan lama; (4) Pemda kurang transparan dalam menginformasikan realisasi PBJ sektor pendidikan melalui kanal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sementara penganggaran adalah proses komprehensif untuk menghasilkan konsep anggaran, anggaran dapat dilihat sebagai pernyataan komitmen dan tujuan pemerintah. Pemerintah dan DPR melalui berbagai tahapan pembahasan selama proses penentuan anggaran untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk UU APBN. Menurut Mardiasmo (2004), proses politik penyusunan anggaran negara dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Sesuai dengan semangat reformasi keuangan negara, sejak 2005 Pemerintah telah menerapkan **PBK (penganggaran berbasis kinerja)** di Indonesia, untuk melihat hubungan antara anggaran keluaran (input) dengan kinerja (keluaran). Penentu

keberhasilan penganggaran berbasis kinerja adalah adanya: rencana yang jelas, relevan, dan strategis terukur di mana ada titik penting dalam menentukan hasil dan keluaran pada tingkat strategis. Namun demikian, evaluasi kinerja program-program yang telah dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga menunjukkan bahwa selain kuantitas output yang tinggi, kualitasnya juga perlu ditingkatkan (Dirjen Anggaran, 2014).

Membangun struktur kinerja dalam dokumen RKA-K/L merupakan langkah awal dalam menerapkan sistem anggaran berbasis hasil. Selanjutnya, data kinerja disempurnakan dan dipahami agar lebih jelas, relevan, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini menggunakan pendekatan kerangka kerja (*Logic Model*).

Sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara bahwa anggaran berfungsi sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional dengan menjamin pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan. Sebagai perluasan dari pedoman dasar yang digariskan dalam UUD 1945, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai peran DPR dan pemerintah dalam proses penganggaran untuk menyelaraskan kembali tujuan dan fungsi anggaran. Menurut UU No. 23 Tahun 2003, belanja negara dan daerah dibagi ke dalam: fungsi, kegiatan, unit organisasi, dan jenis belanja Sistem perencanaan fiskal yang mencakup sistem penganggaran setiap tahun yang dilakukan sesuai dengan MTEF (*Medium-Term Expenditure Framework*) seperti yang diterapkan di negara-negara maju sangat diperlukan untuk perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya mengidentifikasi dan mengelola berbagai jenis *fraud*, sejumlah peneliti mempelajari dan mengevaluasi seberapa besar pengaruh aspek *fraud pentagon*

terhadap perilaku *fraud*. Untuk keperluan penyusunan RKA-K/L dengan strategi MTEF, K/L harus lebih awal melakukan sinkronisasi kegiatan dan program dengan RPJMN dan Renstra K/L.

Penulis penelitian ini mendasarkan investigasi pendeteksian *fraud* pada aspek teori *fraud pentagon*. Karena teori ini merupakan penyempurnaan dari *fraud triangle* dan *fraud diamond* serta mengandung unsur baru yang tidak ada dalam teori tersebut, maka penulis menggunakan *fraud pentagon*. Crowe Horwath pertama kali mengusulkan teori *fraud pentagon* pada tahun 2010. *Fraud pentagon theory* terdiri dari lima komponen, komponen tersebut adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi.

Tekanan adalah elemen pertama dari *Fraud Pentagon*. Menurut SAS No. 99, tekanan merupakan salah satu alasan orang melakukan tindakan *fraud*. Ardianingsih (2018) berpendapat bahwa tuntutan ekonomi, tuntutan tempat kerja, dan tekanan lainnya mengawali terjadinya tekanan. Menurut temuan penelitian (Akbar, 2017), tekanan berperan dalam terjadinya kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan manufaktur Indonesia selama periode penelitian. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian lain (Agustina & Pratomo, 2019), yang menunjukkan bahwa tekanan parsial berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu, penelitian Simangunsong (2019) menemukan bahwa tekanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan dalam pembelian barang atau jasa.

Elemen kedua dari *Fraud Pentagon* merupakan kesempatan. Kesempatan yang datang jadi satu alasan mengapa pelaku *fraud* dapat melakukan tindakan *fraud*. Menggunakan kesempatan sebaik-baiknya bisa membantu pelaku pada saat melaksanakan tindakan *fraud*. Kesempatan yang dimaksud adalah waktu dan situasi yang sesuai dibutuhkan untuk melakukan perilaku *fraud*. Kesempatan yang datang pada

saat melakukan kecurangan adalah akibat dari sebuah kesempatan. Menurut Ulfah dan Nuraina (2017), *opportunity* adalah kesempatan yang dapat menimbulkan terjadinya perilaku *fraud*. Pelaku mempunyai pemikiran atas tindakan mereka, yaitu merasa benar yang telah mereka lakukan. Pelaku *fraud* biasanya melakukan kecurangan menggunakan aduan pertama pada tindak pidana (Albrecht & Albrecht, 2009). Menurut temuan penelitian (Agustina & Pratomo, 2019), kemungkinan terjadinya *fraud* dalam proses pelaporan keuangan pada bisnis pertambangan yang telah terdaftar di BEI memiliki peluang yang sangat kecil. Hasil ini didukung oleh penelitian (Handoko et al., 2020) yang menunjukkan bahwa peluang perusahaan di sektor perbankan untuk melakukan *fraud* merupakan faktor yang paling berpengaruh. Penelitian ini (Utama et al., 2018) juga menemukan bahwa Unsur *opportunity* yaitu *organizational structure* berpengaruh negatif pada persepsi kecurangan pelaporan keuangan.

Peluang merupakan elemen kedua dari *Fraud Pentagon*. Salah satu alasan pelaku dapat melakukan fraud adalah kesempatan yang hadir dengan sendirinya. Pelaku kecurangan mungkin akan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan setiap kesempatan. Kesempatan yang dimaksud adalah momen dan keadaan yang ideal untuk terlibat dalam perilaku curang. Ketika seseorang melakukan *fraud*, mereka memanfaatkan suatu kesempatan. Ulfah dan Nuraina (2017) menyatakan bahwa kesempatan adalah salah satu yang mengarah pada *fraud*. Pelaku *fraud* memiliki pendapat sendiri tentang tindakan mereka, seperti apakah mereka melakukan hal yang benar atau tidak. (Albrecht & Albrecht, 2009) Pelaku *fraud* biasanya menggunakan pengaduan kriminal awal untuk melakukan penipuan. Menurut penelitian, terdapat pengaruh yang cukup besar antara peluang terhadap *fraud* pelaporan keuangan pada bisnis pertambangan yang telah terdaftar di BEI (Agustina & Pratomo, 2019).

Terdapat bukti yang mendukung temuan ini (Handoko et al., 2020), yang

menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan adalah kesempatan bagi bank untuk melakukan *fraud*. Utama et al. (Utama et al., 2018) juga menemukan bahwa struktur organisasi, sebuah peluang, berdampak negatif pada persepsi pelaporan keuangan yang tidak benar.

Rasionalisasi timbul atas akibat adanya rasa percaya diri beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hal benar. Menurut Novita (2019), pembenaran atas perbuatan yang tidak benar dan perbuatan pidana merupakan hal yang beda dan merupakan tindakan yang wajar. Pengaruh bisa datang dari luar dan dalam dapat membuat pelaku berpikir demikian. Seorang yang pernah melakukan *fraud* akan mengulangi lagi karena merasa tindakannya benar, padahal sebenarnya tindakannya adalah salah (Farmashinta dan Yudowati 2019). Hasil penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Karka, I.G.N.S. dan Ramantha, I.W. menunjukkan bahwa rasionalitas memiliki pengaruh yang baik terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan.

Kompetensi, menurut Horwath (2010), adalah kemampuan untuk mengabaikan pengendalian internal demi keuntungan diri sendiri. Dalam Ardianingsih (2018), Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa seorang pelaku *fraud* harus mampu membedakan antara peluang terbuka dan peluang emas serta sering memanfaatkannya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang tersebut menggunakan posisi dan wewenangnya secara tepat untuk menghindari terdeteksinya *fraud* tersebut. Penelitian Aulia (2012) menunjukkan bahwa perubahan kompetensi manajemen memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kecurangan prosedur pelaporan keuangan. Temuan penelitian Abdurrachman dan Suhartono (2020) juga mendukung penelitian Aulia (2012) yang menemukan bahwa *fraudulent financial reporting* berkurang ketika dilakukan pergantian direksi. Sedangkan dalam penelitian (Handoko et al., 2020) Dalam hal terjadi *fraud*, kompetensi tidak berdampak signifikan terhadap bisnis perbankan.

Elemen terakhir adalah arogansi. Menurut Horwath (2010), arogansi adalah sikap superioritas atas orang lain, diikuti oleh keserakahan, yang membuatnya percaya bahwa pengendalian internal tidak akan berpengaruh pada dirinya. Dia memiliki hak lebih dari orang lain karena arogansinya. Faktor non-material, seperti keinginan seseorang untuk mempertahankan kelas sosial dan gaya hidup tertentu, merupakan tujuan dari kecurangan (Ramadhan, 2020). Penelitian Tessa G. dan Harto (2016) menunjukkan bahwa profil CEO dalam arogansi laporan keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Alfian (2020) yang mengkonfirmasi temuan Tessa dan menunjukkan bahwa jumlah foto CEO dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur arogansi. Sementara itu, penelitian (Agustina & Pratomo, 2019) dan Karka, I.G.N.S., dan Ramantha, I.W., (2020) menunjukkan bahwa arogansi tidak berpengaruh terhadap bagaimana orang mempersepsikan kecurangan pelaporan keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan negara. Untuk menyelaraskan kembali tujuan dan fungsi anggaran, perlu diatur secara jelas peran DPR dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran dalam penjabaran aturan-aturan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Fenomena *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran telah menjadi subjek dari beberapa penelitian. Wasana (2018) menyebutkan salah satu faktor yang memengaruhi perencanaan dan penganggaran adalah keterlibatan anggota DPRD dan komitmen pemilik kepentingan. Yuhertiana dan kawan-kawan, Menurut penelitian mereka, Eksekutif dan Legislatif menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melayani

kepentingan mereka sendiri dan kelompok untuk melakukan kecurangan. Abdullah (2012) mengidentifikasi potensi korupsi dalam setiap proses penganggaran.

Fakta bahwa *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran merupakan masalah yang sering terjadi pada instansi pemerintah secara keseluruhan menjadi salah satu faktor penelitian ini. Hal ini disebabkan karena proses perencanaan dan penganggaran melibatkan banyak orang dan banyak berkaitan dengan politik dan kepentingan. Menurut Usuli dan Urumsah (2020), dibutuhkan pegawai pemerintah yang berintegritas serta komitmen yang kuat terhadap instansi yang berintegritas.

Kedua, *Theory of Planned Behavior* digunakan dalam sejumlah penelitian untuk mengatasi aspek perilaku *fraud* pemerintah (Suryono dan Chariri, 2016; 2018; Perdana et al. Hadiprajitno dan Zulaikha, 2016). Teori ini, yang menggunakan kapabilitas sebagai elemen keempat dari *fraud diamond*, sering digunakan bersama dengan *Theory of Planned Behavior* untuk mengidentifikasi pelaku *fraud* yang berpotensi melakukan tindakan *fraud* selama proses perencanaan dan penganggaran. Penulis tidak dapat menemukan penelitian yang luas yang meneliti keterkaitan antara teori dan isu-isu tersebut untuk subjek ini dan kombinasi teori.

Karena kurangnya penelitian tentang *fraud* perencanaan dan penganggaran, peneliti berusaha memperluas bidang ini dengan menggunakan *Fraud Pentagon Theory* dan variabel arogansi. Responden penelitian ini adalah bagian perencanaan dan bagian pengelola anggaran yang berhubungan langsung dengan tahapan proses perencanaan dan penganggaran. Dan juga sistem untuk perencanaan dan penganggaran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran pada kementerian dan lembaga.

Peneliti mencoba mengembangkan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan *Fraud Pentagon Theory* dengan memasukkan variabel arogansi

karena masih minimnya penelitian mengenai topik tersebut. Departemen perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berhubungan langsung dengan tahapan proses perencanaan dan penganggaran menjadi subjek responden penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran di kementerian dan lembaga, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka fenomena *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “perilaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah aspek tekanan (*pressure*) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
2. Apakah aspek kesempatan (*opportunity*) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
3. Apakah aspek rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
4. Apakah aspek arogansi (*arrogance*) berpengaruh terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran ?
5. Apakah niat berbuat *fraud* berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
6. Apakah sikap (*attitude*) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?
7. Apakah norma subjektif (*subjective norms*) berpengaruh terhadap *fraud* dalam

perencanaan dan penganggaran?

8. Apakah kontrol perilaku (*perceived behavioral*) berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini meliputi :

1. Menganalisis pengaruh aspek tekanan (*pressure*) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Menganalisis pengaruh aspek kesempatan (*opportunity*) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Menganalisis pengaruh aspek rasionalisasi (*rationalization*) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Menganalisis pengaruh aspek arogansi (*arrogance*) terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.
5. Menganalisis pengaruh niat terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.
6. Menganalisis pengaruh sikap (*attitude*) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.
7. Menganalisis pengaruh subjektif (*subjective norms*) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.
8. Menganalisis pengaruh kontrol perilaku (*perceived behavioral*) terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memajukan teori *fraud* dalam hal perencanaan dan penganggaran dan dapat menjadi referensi bagi para akademisi

yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa

1. Manfaat Praktis

Memberikan mitra kerja, khususnya pemerintah, implikasi fungsional terhadap strategi perencanaan dan penganggaran untuk mengurangi *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu :

Bab I : Menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta latar belakang penelitian yang semuanya tercantum dalam pendahuluan.

Bab II : Berisi kajian teori, menyajikan hasil dari penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis berdasar kajian teori dan kalimat hipotesis dan kerangka model penelitian.

Bab III : Menggambarkan metode penelitian, gambaran populasi serta sampel, sumber, metode pengumpulan data, pengukuran variabel penelitian serta teknik pengujian hipotesis.

Bab IV : Menggambarkan metode pengujian hipotesis, penyajian hasil penelitian, serta analisis data penelitian.

Bab V : Menampilkan kesimpulan, kontribusi dan implikasi penelitian

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Definisi *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners*, *fraud* didefinisikan sebagai "tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau entitas yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak menguntungkan" (ACFE, 2008). *Fraud* mencakup berbagai taktik seperti tipu muslihat, kelicikan, ketidakjujuran, dan taktik yang tidak benar atau tidak logis yang melukai orang lain dan digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Menurut Singleton dan Aaron (2010), *fraud* dapat mengakibatkan berbagai efek negatif, termasuk kerusakan moral karyawan, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, dan hancurnya reputasi organisasi.

Menurut definisi yang diberikan di atas, *fraud* adalah perilaku tidak jujur yang membantu beberapa orang atau kelompok dan merugikan orang atau organisasi lain. Menurut Tuanakotta (2018), penulis dalam penelitian ini membuat keputusan yang disengaja untuk tidak menerjemahkan *fraud* sebagai kecurangan karena, *fraud* lebih umum dan mirip seperti kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Sebaliknya, penulis menggunakan *fraud* karena kejahatan kelas atas dan mencakup individu bisnis dan profesional yang terhormat dan dihormati. Posisi mereka memungkinkan mereka untuk melakukan kejahatan ini. Karena berkaitan dengan pelaku *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, penulis berpendapat bahwa frasa ini dapat diterima untuk mengkarakterisasi arti *fraud* dalam penelitian ini.

Menurut Davia dan Howard (2000), ada tiga jenis *fraud*, yaitu :

1. *Fraud* yang sudah memiliki tindakan hukum terlepas dari hasil putusan pengadilan

2. *Fraud* ditemukan tapi belum ada tindakan hukum
3. *Fraud* yang belum ditemukan

Karena perencanaan dan penganggaran merupakan langkah awal dalam proses manajemen keuangan, maka *fraud* tidak dapat dibuktikan masuk ke dalam kategori ketiga. Namun demikian, contoh-contoh yang dapat diidentifikasi secara jelas sebagai bagian dari kategori kedua dan ketiga termasuk kegiatan penyuaipan yang sering dilaksanakan oleh KPK.

2.2. Fraud Tree

Ada banyak cara untuk mendefinisikan *fraud*. Menurut Annisya dkk., ACFE mendefinisikan *fraud* sebagai perilaku yang dilakukan dengan maksud untuk kehilangan properti, aset, dan uang melalui penipuan atau cara-cara tidak jujur lainnya (Annisya et al. 2016).

Menurut Tuanakotta (2012), istilah *fraud* mencakup berbagai macam pelanggaran, termasuk pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, dan perbuatan curang, serta merugikan kreditor dalam kondisi pailit, untuk penghancuran atau perusakan barang, dan merugikan kreditor dalam kondisi pailit, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Sedangkan menurut Albrecht *et al.* (2012) memberi arti *fraud* sebagai berikut: “Kecurangan adalah istilah generik, dan mencakup seluruh kecerdasan yang dapat dirancang manusia, yang digunakan oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan lebih lainnya dengan keterangan palsu. Tidak ada definisi dan peraturan tetap yang dapat menjelaskan secara umum proporsi dalam definisi kecurangan, karena yang termasuk di dalamnya kejutan, tipuan, kecerdasan dan cara lain yang tidak adil adalah penipuan.”

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan *fraud* dalam bentuk *fraud tree* yang terbagi menjadi tiga bagian (Tuanakotta, 2012):

1. Korupsi

Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan oleh seseorang dalam

posisi otoritas dalam suatu bisnis atau instansi adalah korupsi. Karena keterlibatan banyak individu, korupsi adalah bentuk penipuan yang sulit untuk diidentifikasi. Pohon kecurangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan material adalah empat komponen korupsi yang paling signifikan.

2. Penggelapan Aset

Penggelapan aset mengacu pada transfer ilegal, pencurian, atau penyalahgunaan aset oleh individu yang memiliki wewenang untuk mengelolanya. Yang paling rentan terhadap pencurian adalah transaksi tunai, inventaris, persediaan, peralatan, dan aset lainnya.

3. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan adalah perilaku sengaja menyajikan laporan keuangan secara curang yang tidak menggunakan aturan akuntansi yang berlaku secara umum sehingga hasil laporan keuangan terlihat bagus. *Fraud* dalam perencanaan dan penganggaran diklasifikasikan menurut bentuk korupsi. UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa korupsi mencakup :

Penyajian laporan keuangan yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku secara umum dengan tujuan untuk membuat hasil laporan keuangan tampak menguntungkan dikenal sebagai *fraud* laporan keuangan. *Fraud* perencanaan dan penganggaran dikategorikan berdasarkan jenis korupsi yang terjadi. UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa korupsi mencakup :

1. Menyebabkan kerugian negara
2. Praktik korupsi
3. Pemalsuan dalam wewenang

4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Konflik kepentingan
7. Gratifikasi

2.3. Teori *Fraud Pentagon* (*Fraud Pentagon Theory*)

Kemajuan terbaru dari teori *fraud* di bidang deteksi *fraud* tingkat organisasi adalah *Fraud Pentagon Theory*. Teori *fraud* pertama, yang dikenal sebagai *fraud triangle theory*, dipresentasikan oleh Cressey pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong organisasi untuk melakukan *fraud*. Penelitiannya tentang *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Cressey (1953), berfokus pada alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Secara khusus, Cressey menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggar kepercayaan melakukan penipuan. Penelitiannya mengungkapkan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi adalah tiga faktor yang menyebabkan *fraud*. *Fraud Triangle* adalah nama yang diberikan untuk ketiga unsur ini (Tuanakotta, 2013). Berbagai tahap perkembangannya digambarkan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Perkembangan Teori Fraud

Teori	<i>Fraud Triangle</i>	<i>Fraud Diamond</i>	<i>Fraud Pentagon</i>
Elemen	<i>Pressure</i>	<i>Pressure</i>	<i>Pressure</i>
	<i>Opportunity</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Opportunity</i>
	<i>Rationalization</i>	<i>Rationalization</i>	<i>Rationalization</i>
		<i>Capability</i>	<i>Competence</i>
			<i>Arrogance</i>
Sumber	Cressey (1953)	Wolfe & Hermanson (2004)	Howart (2012)

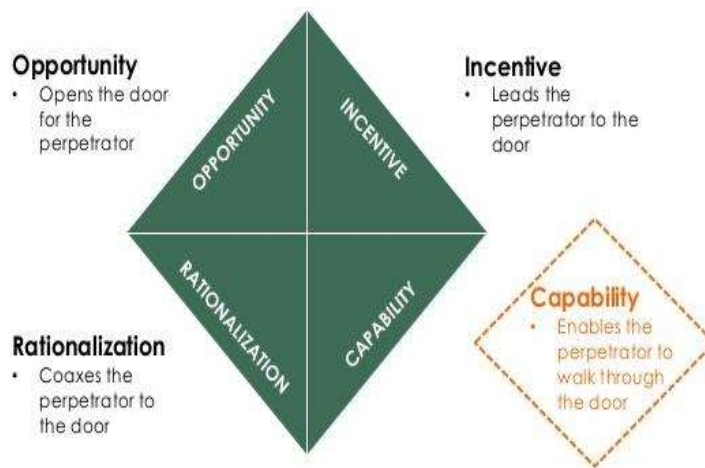
Teori pertama tentang *fraud*, yang dikenal sebagai *fraud triangle theory*, dipresentasikan oleh Cressy pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong organisasi untuk melakukan kecurangan. Penelitiannya tentang *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Cressey (1953), membahas motivasi di balik *fraud* dan, khususnya, pemecah kepercayaan. Penelitiannya mengungkapkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi adalah tiga faktor yang menyebabkan *fraud*. Istilah *fraud triangle* mengacu pada tiga komponen ini (Tuanakotta, 2012). Teori *fraud triangle*, seperti yang digambarkan pada Gambar 2.1 di bawah ini,



Gambar 2.1. Kerangka Fraud Triangle (Cressey, 1953)

Teori *fraud* kedua yang diusulkan Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud Diamond* memiliki empat elemen yang mendorong terjadinya *fraud* : tekanan, insentif, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Teori ini merupakan perluasan dari *fraud triangle theory* dengan penambahan elemen keempat yaitu ability. Wolfe dan Hermanson (2004), Wolfe dan Hermanson (2016 Ruankaew; Sujana, dkk., 2018) berpendapat bahwa meskipun ada peluang, rasionalisasi, tekanan, dan insentif, kecurangan tidak dapat terjadi tanpa adanya faktor keempat, yaitu kemampuan. Dengan kata lain, orang yang melakukan tindakan

fraud harus mampu melakukannya. Namun, orang yang tepat dengan kemampuan untuk melakukan kecurangan diperlukan untuk banyak *fraud*. Dengan kata lain, pelaku kecurangan harus mampu melakukan tindakan *fraud* (Sorunke dan Abayomi, 2016; Sujana dan lainnya, 2018). Gambar. Kerangka fraud diamond digambarkan pada Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2.2. Kerangka Fraud Diamond

Teori *fraud* terbaru yang dikembangkan oleh Crow Horwarth (2012) yang dikenal dengan “Crow’s *Fraud Pentagon*”, dengan menambahkan dua unsur pemicu *Fraud Pentagon*, yaitu competence dan arrogance. Gambar 2.3 di bawah menggambarkan kerangka *Fraud Pentagon*.

"Crow's *Fraud Pentagon*," teori *fraud* terbaru yang dikembangkan oleh Crow Horwarth (2012), menambahkan kompetensi dan arogansi sebagai faktor pemicu *Fraud Pentagon*. Kerangka kerja untuk *Fraud Pentagon* digambarkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3. Kerangka Fraud Pentagon

Fraud Pentagon merupakan perbaikan dari dua teori sebelumnya, *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Crowe Howarth menemukan *Fraud Pentagon* pada tahun 2011. Teori *Fraud Pentagon* berfokus pada lima aspek berikut :

1. Tekanan

Menurut Tuanakotta (2012) adalah suatu kondisi di mana setiap orang merasa tertekan untuk melakukan tindakan *fraud*. Biasanya, kondisi ini melibatkan beban non-finansial bersama (*financial needs*) yang dapat dibagi dengan orang lain. Sebagian besar stres keuangan disebabkan oleh gaya hidup yang boros, ketamakan, atau biaya yang terkait dengan mempertahankan kualitas hidup yang tinggi. Beban non-finansial juga dapat dimasukkan ke dalam tekanan, seperti tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti kebutuhan orang baik untuk menilai satu sama lain berdasarkan penampilan, stres di tempat kerja, dll. yang dapat mengakibatkan *fraud* (Albrecht et al., 2012).

Karyawan mungkin merasa berada di bawah tekanan dari manajemen untuk memenuhi tenggat waktu dan standar kinerja yang tidak masuk akal, yang dapat menyebabkan kecurangan laporan keuangan (Auditor Akuntan Publik, 2011). Empat indikator tekanan yang dinyatakan dalam SAS No. 99 tahun 2002 adalah

stabilitas keuangan, tekanan yang berlebihan, tuntutan keuangan individu, dan target keuangan.

Menurut *Auditor of Public Accounts* (2011), karyawan dan manajemen dapat berada di bawah tekanan untuk melakukan *fraud* laporan keuangan dengan menerima target waktu dan sasaran kinerja yang tidak realistis dari manajemen. Tidak, menurut SAS no. 99 tahun 2002 Terdapat empat indikator tekanan, yaitu sebagai berikut: keamanan keuangan, stres yang berlebihan, persyaratan keuangan individu, dan tujuan keuangan

2. Peluang

Peluang merupakan salah satu hal yang berpotensi menyebabkan anda melakukan *fraud*. Kemungkinan termasuk persepsi kontrol internal yang lemah di organisasi, pengawasan manajemen yang tidak memadai, dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Keyakinan pelaku bahwa tindakan mereka tidak dapat diungkapkan menimbulkan kemungkinan ini.

Cressy berpendapat bahwa ada dua komponen dalam persepsi kemungkinan ini. Pertama, informasi umum, seperti pemahaman bahwa pelanggaran tanpa proses hukum dapat muncul dari posisi kepercayaan. Mereka mempelajari informasi ini melalui apa yang mereka amati atau dengar, seperti pengalaman para pelaku *fraud* yang telah melakukan kejahatan tanpa diidentifikasi atau dihukum. Yang kedua adalah keterampilan atau pemahaman teknis yang diperlukan untuk melakukan *fraud* (Tuanakotta, 2012).

Menurut Priantara (2013), ada dua hal yang dapat membuat seseorang lebih mungkin melakukan tindakan *fraud* : sistem pengendalian internal yang lemah dan kurangnya jejak audit, yang mencegah penelusuran, misalnya prosedur

bisnis yang berisiko, tindakan pengendalian lapangan yang tidak mencukupi dan tidak efektif, dan Salah satu alasan mengapa kontrol tidak efektif adalah kepercayaan yang terlalu besar yang diperoleh para *fraud* dari atasan atau pemilik bisnis yang tidak ketat dalam melakukan pengawasan.

Menurut Priantara (2013), ada dua hal yang dapat membuat seseorang lebih mungkin melakukan tindakan *fraud* : sistem pengendalian internal yang lemah dan kurangnya jejak audit, yang mencegah penelusuran, misalnya prosedur bisnis yang berisiko, tindakan pengendalian lapangan yang tidak mencukupi dan tidak efektif, dan Salah satu alasan mengapa kontrol tidak efektif adalah kepercayaan yang terlalu besar yang diperoleh para *fraud* dari atasan atau pemilik bisnis yang tidak ketat dalam melakukan pengawasan.

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi dapat terjadi ketika seorang perwakilan menganggap benar cara mereka berperilaku untuk melakukan tindakan *fraud* (*Auditor of Public Accounts*, 2011). Pelaku *fraud* merasa yakin bahwa aktivitas mereka bukanlah tindakan *fraud* melainkan sesuatu yang benar-benar hak mereka, sesekali bahkan pelaku merasa mereka telah berkontribusi mengingat fakta bahwa mereka telah melakukan banyak hal untuk organisasi. Pelaku biasanya mencari banyak alasan karena beberapa faktor untuk membenarkan kegiatan mereka secara rasional (Sukirman dan Sari, 2013).

Beberapa indikator yang sering dihubungkan dengan variabel ini adalah budaya organisasi (Didi dan Kusuma, 2018; Vlandari dan Zaki, 2014; Najahningrum, 2013), komitmen organisasi (Didi dan Kusuma, 2018; Vlandari dan Zaki, 2014; Najahningrum, 2013). Perilaku Etis (Permana, 2017; Zulkarnain, 2013) dan penegakkan hukum (dan Zaky, 2014; Zulkarnain, 2013).

Rasionalisasi benar-benar merupakan bagian mendasar dari suatu kesalahan dan bahkan penting untuk inspirasi untuk melakukan suatu kesalahan. Pembelaan diperlukan dengan tujuan agar para pelakunya dapat menyadari bahwa cara berperilaku mereka telah selesai untuk mengikuti cara hidup mereka sebagai individu yang tidak berdasar. Setelah kesalahan terjadi, pembelaan ini ditinggalkan mengingat fakta bahwa hal itu umumnya tidak diperlukan.

Karyono (2013) berpendapat bahwa para pelaku tindakan *fraud* mencari beberapa alasan, yaitu (Ulfah et al., 2017).

1. Pelaku menganggap bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal yang orang lain.
2. Pelaku merasa bahwa dia telah memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi dan sehingga mereka merasa harus menerima lebih banyak dari yang telah dia terima.
3. Pelaku beranggapan bahwa tujuan mereka itu baik yaitu setelah menyelesaikan masalah tersebut maka akan mereka kembalikan lagi.

4. Kemampuan

Kemampuan merupakan keterampilan seorang pegawai untuk mengabaikan kontrol dari dalam, melalui cara menutup-nutupi, dan mengikuti kondisi sosial tertentu untuk mencari keuntungan pelakunya sendiri (Horwath, 2011). Perilaku *fraud* tidak akan terjadi jika seseorang yang dapat melihat pintu yang terbuka.

Banyak kejahatan termasuk miliaran dolar dalam bisnis dapat dihindari jika perusahaan tidak memiliki individu yang memiliki kemampuan khusus. Pintu terbuka yang berharga membuat jalan bagi kesalahan representasi dan

ketegangan serta alasan yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya. Namun, Anda harus memiliki pilihan untuk melihat pintu masuk terbuka sebagai pintu terbuka.

Pada penelitian Horwath (2011) dikatakan bahwa ada karakteristik yang dapat memengaruhi terhadap kemampuan seseorang yaitu fungsi/posisi, kecerdasan, kepercayaan diri, keterampilan koersif, berbohong efektif, dan ketahanan terhadap stres.

1. *Function/ Position*

Kedudukan seseorang dapat mempermudah melakukan tindakan *fraud*. Jabatan dan peran yang dipegang oleh karyawan dapat menciptakan peluang terjadinya *fraud* yang tidak dimiliki oleh orang lain.

2 *Intelijen*

Orang yang tepat dalam *fraud* cukup pintar untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan menggunakan akses posisi, fungsi, dan otorisasi untuk keuntungan mereka sendiri.

3 *Confidence*

Orang yang sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan terdeteksi saat melakukan tindakan *fraud*, atau orang yang percaya bahwa mereka dapat dengan mudah keluar dari masalah yang menimpa mereka, dapat memotivasi diri mereka sendiri untuk melakukan tindakan *fraud* demi keuntungan pribadi.

4 *Coercive skills*

Pelaku *fraud* yang sukses adalah mereka yang bisa membuat orang lain melakukan tindakan *fraud*. Pelaku *fraud* ini adalah orang yang dapat

memberi keyakinan kepada orang lain untuk bekerja sama dengannya untuk melakukan tindakan *fraud*.

5 *Effective lying*

Berbohong yang efektif dan terus menerus diperlukan untuk keberhasilan tindakan *fraud*. Seseorang harus meyakinkan ketika berbohong agar tidak ketahuan.

6 *Immunity to stress*

Orang wajib bisa mengendalikan stres dikarenakan bersembunyi pada hal penipuan menyebabkan stres.

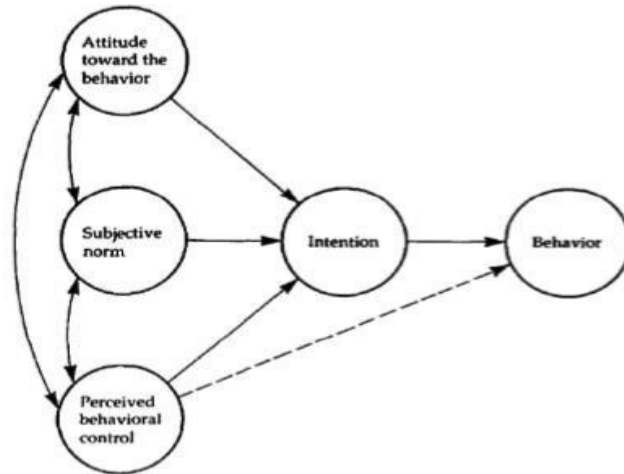
5. Arogansi

Menurut Crowe, arogansi adalah pola pikir yang mendominasi kemandirian seseorang dan kecenderungan untuk mengabaikan pengendalian internal atau strategi perusahaan. Menurut Horwath (2011), pendapat CEO tentang keangkuhan memiliki lima komponen, khususnya:

1. Ego besar - CEO lebih terlihat seperti selebritas daripada pengusaha.
2. Mereka berpikir bahwa pengendalian internal tidak berlaku untuk mereka.
3. Memiliki karakteristik perilaku destruktif.
4. Memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter.
5. Takut kehilangan posisi dan status.

2.4. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perbaikan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang memiliki tujuan untuk menciptakan mentalitas khusus terkait subjektivitas dan perilaku. Faktor kontrol perilaku yang sebelumnya tidak diketahui telah dipindahkan ke TPB (Ajzen, 1991).



Gambar 2.4. Theory of Planned Behavior Ajzen (1991)

Dalam *Theory of Planned Behavior* niat ditentukan oleh tiga variabel yakni :

1. *Attitude toward behavior* (Sikap)

Sikap individu menentukan apakah mereka memiliki persepsi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap sesuatu. Pandangan individu tentang hasil dari perilaku atau keyakinan sosial tidak sepenuhnya menjelaskan sikap terhadap perilaku (Ajzen, 2005).

Mahyarni (2013) berpendapat bahwa keyakinan berhubungan dengan evaluasi emosional individu terhadap lingkungannya secara umum, termasuk pemahaman tentang dirinya sendiri dan keadaannya saat ini. Keyakinan ini dapat dikomunikasikan dengan menghubungkan cara berperilaku yang seharusnya membawa keuntungan atau kemalangan jika anda berbuat atau tidak berbuat perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

2. *Subjective Norms* (Norma subjektif)

Keyakinan memengaruhi norma subjektif dengan cara yang sama. Dalam standar yang berubah-ubah ini, keyakinan orang diperoleh dari sudut pandang mentalitas orang lain. (Ajzen, 2005). Hubungan vertikal dan horizontal diatur di

tempat ini. hubungan antara orang tua dan anak atau pemimpin dan bawahan. Hubungan vertikal khusus ini lebih merupakan perintah untuk bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak. Ketika hubungan horizontal berkembang di antara individu yang setara, seperti antara teman dan keluarga, tidak dapat dihindari bahwa asumsi akan dibuat tentang bagaimana orang lain akan berperilaku secara umum (Ramdhani, 2016).

3. *Perceived behavioral* (Kontrol perilaku)

Menurut Aizen (2005), pandangan individu tentang ketersediaan sumber daya sebagai keterampilan, bakat yang mendukung atau menghalangi pola perilaku yang dapat diprediksi, tidak sepenuhnya mempengaruhi kontrol perilaku. Dalam hal ini, yang lebih penting adalah mempertimbangkan bagaimana objek-objek yang ada mendukung atau bertentangan dengan perilaku tersebut.

2.5. Penganggaran Sektor Publik

Dalam perjalanannya, sistem perencanaan melalui tahapan-tahapan pembicaraan antara otoritas publik dan DPR untuk menyepakati sebagai Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Siklus politik, yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, merupakan metode yang paling umum dalam memilih rencana belanja publik (Mardiasmo, 2004). Rencana belanja daerah mengevaluasi pendapatan yang akan diterima dan penggunaan yang akan dikeluarkan dalam satu tahun anggaran. Rencana tersebut juga mencerminkan pekerjaan otoritas publik dalam perekonomian (Bastian, 2006).

Komitmen pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang tujuan negara dapat dilihat dalam anggaran sektor publik. Tanggung jawab ini muncul sebagai program dan kegiatan, serta pembiayaan penting setelah melalui interaksi politik untuk memutuskannya.

2.5.1. Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat

Seperti yang ditunjukkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah instrumen tanggung jawab, administrasi dan kebijakan moneter. Sebagai instrumen kebijakan moneter, anggaran menjamin perkembangan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan pemerintah. Untuk merelokasi tujuan dan fungsi anggaran, penting untuk secara jelas mengarahkan pekerjaan DPR dan pemerintah dalam proses kesiapan dan penerimaan rencana keuangan sebagai tambahan dari pedoman penting yang diperintahkan dalam UUD 1945.

Perencanaan dan penganggaran ini mencerminkan pergeseran menuju akuntabilitas yang lebih besar. Namun, pendekatan penganggaran ini terus mengarah pada duplikasi dan pemborosan. Praktik ini berlanjut hingga 2016. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan pendekatan perencanaan dan penganggaran agar inefisiensi anggaran lebih mudah dihindari. Gambar 2.5. Menjelaskan siklus Perencanaan dan Penganggaran di Kementerian dan Lembaga Pemerintah.





Gambar 2.5. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Kementerian dan Lembaga (Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

2.5.2. Reformasi Keuangan dan Perencanaan di Indonesia

Tiga undang-undang - UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tentang Audit Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Negara diterbitkan sebagai bagian dari Reformasi Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kegiatan Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004, yang telah diubah menjadi PP No. 70 Tahun 2006 tentang Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan Peraturan Pemerintah lainnya sesuai dengan substansi teknis yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik.

Dengan diadopsinya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Reformasi ini mengubah format perencanaan di Indonesia

dengan diperkenalkannya konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), reformasi ini mengubah struktur perencanaan di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), disahkan untuk mengontrol lebih lanjut hal ini. Peraturan yang tersedia untuk umum termasuk Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan secara bersama-sama mengeluarkan Surat Edaran No. 0142/M.PPN/06/2009 dan Surat Edaran No. 1848/MK/2009 pada tanggal 19 Juni 2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang menerbitkan 5 buku sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga tentang perencanaan dan penganggaran dengan format yang baru, yaitu sebagai berikut:

Buku 1 Pedoman Penyusunan Pedoman dan Kegiatan; Buku 2. Panduan Pelaksanaan Penganggaran Kinerja; Buku 3, Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; Buku 4 format baru RKA-KL dan Buku 5 Jadwal Pelaksanaan dan Penutupan.

Oleh karena itu, implementasi performance budgeting harus dilakukan dengan baik, asalkan tidak ada masalah koherensi antara perencanaan dan penganggaran yang merupakan kunci penting implementasi performance budgeting. Buku 2 Panduan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja menyatakan:

“Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 menegaskan rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran terpadu

(unified budget); (2) kerangka pengeluaran jangka menengah biasa disebut KPJM (medium term expenditure framework); dan (3) penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (performance-based budget). Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut di atas fokus pada PBK. Kedua pendekatan lainnya (anggaran terpadu dan KPJM) mendukung penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tiga atau lima tahun ke depan. Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan”.

2.5.3. Anggaran Berbasis Kinerja

Perencanaan berbasis kinerja merupakan metode pendistribusian anggaran mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan agar mendapatkan anggaran, serta administrasi yang harus diberikan untuk setiap program (Shah dan Shen, 2007). Pemerintah diharapkan memiliki pilihan untuk menggunakan data yang dikumpulkan untuk pembelajaran dan perbaikan agar lebih produktif dan layak, dan itu menyiratkan bahwa itu juga merupakan metode untuk menambahkan informasi eksekusi ke dalam interaksi dinamis (Mucha 2011). Dengan mengintegrasikan penganggaran organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dan dengan demikian memanfaatkan data kinerja secara sistematis, penganggaran berbasis kinerja berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik (Robinson dan Last 2009). Standar yang digunakan dalam proses anggaran berbasis kinerja meliputi: (1) Penganggaran berbasis kinerja (berdasarkan pada hasil), (2) Fleksibilitas dalam menangani anggaran untuk mencapai hasil sambil tetap mengikuti aturan tanggung jawab dan (3) Uang mengikuti kemampuan, kemampuan mengikuti struktur (Buku 2: Panduan Pelaksanaan Penganggaran Berkinerja). Sementara itu, tujuan diterapkannya penganggaran berbasis kinerja berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas adalah

(Buku 2: Panduan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja):); (2) meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan (efisiensi operasional).

Penganggaran Berbasis Kinerja adalah model penganggaran yang lebih berorientasi pada hasil daripada berorientasi pada hasil dan membutuhkan beberapa prasyarat untuk dapat diterapkan secara maksimal. Berikut ini adalah sebagian dari hal-hal penting yang dipikirkan oleh Robinson dan Last, 2009, proses anggaran berbasis kinerja: (1) memiliki manajemen kebijakan makro fiskal yang baik sehingga belanja kementerian mendapat kepastian pendanaan, (2) kemampuan menekan eksekusi penganggaran seperti yang direncanakan, yang membutuhkan aturan dan prosedur penganggaran dan kemampuan untuk menerapkan (dan memantau) pelaksanaannya, seperti prosedur akuntansi dan audit yang tepat, (3) memiliki kemampuan staf yang memadai untuk memiliki pilihan untuk memberikan persyaratan informasional dari penganggaran berbasis kinerja adalah kunci penting.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja diperlukan tiga komponen, yaitu (1) Indikator kinerja sebagai alat ukur yang terdiri dari program-program indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas program, indikator kinerja untuk mengukur kinerja dan indikator hasil untuk mengukur efektivitas sub kegiatan, (2) standar biaya yaitu Standar Biaya Umum (SBU), digunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau daerah dan Standar Biaya Khusus (SBK), yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu, (3) Evaluasi biaya yang merupakan proses penilaian serta pengungkapan

masalah penerapan kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi serta efektivitas dari suatu program/kegiatan (Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja).

Pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja terdiri dari delapan tahapan, khususnya (1) menetapkan target strategis K/L; (2) definisi hasil, program, hasil dan kegiatan; (3) menentukan indikator kinerja program utama dan indikator kinerja; (4) menetapkan standar biaya; (5) perhitungan kebutuhan anggaran; (6) melaksanakan kegiatan dan biaya ; (7) akuntabilitas; (8) dan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja(Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja).

Berdasarkan perkembangan terakhir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Ada perubahan mendasar dalam penyusunan perencanaan penganggaran, yaitu :

- a. Pandangan anggaran telah diubah dari "money follows function" menjadi "money follows program" sebagai bagian dari penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional melalui proses penganggaran berbasis kinerja yang telah diimplementasikan melalui proses penganggaran, regulasi, dan kerangka kerja pelayanan publik dan investasi.
- b. Penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif K/L juga mengatur koordinasi antara Bappenas dan Kementerian Keuangan. Secara umum, rancangan awal RKP memuat metodologi, program, pelaksanaan, keberhasilan, dan wilayah hingga kabupaten dan kota untuk penyusunan rencana kerja (Renja K/L).
- c. RKA-K/L ditelaah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk

memastikan kesesuaiannya dengan Renja-K/L dan RKP, dan oleh Menteri Keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan pedoman efektivitas dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

- d. Rencana Kerja Pemerintah dimutakhirkan kembali berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- e. Perubahan DIPA organisasi diikuti dengan penyegaran Renja-K/L setelah mendapat pengesahan dari KPA dan KPA yang mengingat perubahan program, kegiatan, kebutuhan kegiatan, hasil, dan bidang.
- f. Membuat format Renja-K/L dan RKAK/L, skema klasifikasi, dan basis data, serta melakukan pertukaran data untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja.
- g. Dalam rangka memfasilitasi pertukaran data untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, menyusun format Renja-K/L dan RKAK/L, skema klasifikasi, dan basis data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2017, proses penyusunan RKA KL disusun antara KL dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, sedangkan proses penyusunan RKA-KL dikaitkan dengan Renja KL dan dibantu oleh Bappenas sejak tahap awal hingga terbitnya DIPA sebagai catatan pelaksanaan rencana belanja.

Namun demikian, meskipun telah diterbitkannya PP No. 17 tahun 2017, masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses perencanaan dan penyusunannya. Pembuatan laporan seperti RPJP, RPJM, dan RKP masih bersifat

statis, dan tidak ada perubahan yang direncanakan untuk implementasinya, seperti penyesuaian proses persiapan, penyesuaian alokasi, penyesuaian anggaran, penyesuaian pemotongan anggaran, dan penyesuaian ukuran dan struktur kelembagaan. Modifikasi perencanaan yang memengaruhi fokus implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang biasanya tidak dilakukan sebagai respon terhadap perubahan anggaran.

Sebagai akibat dari semua proyek dan pelaksanaan KL yang memiliki tujuan pelayanan atau kesejahteraan masyarakat yang jelas, arsitektur program dan kegiatan di kementerian dan lembaga belum mencapai kondisi terbaik. Dampaknya terhadap pelayanan dan kesejahteraan di tingkat kelurahan merupakan indikator yang paling nyata.

Terlepas dari isu-isu lintas sektoral dan kewajaran pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dengan indikator kinerja standar utama, yang dianggap tidak memberikan bantuan yang esensial bagi pelaksanaan, konvergensi dan diferensiasi program dan kegiatan menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan penganggaran. Prinsip utama dari penganggaran berbasis kinerja adalah bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan akan memberikan hasil yang melampaui apa yang dianggap layak oleh masyarakat setempat.

2.5.4. Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran

Korupsi politik dan korupsi administratif telah diidentifikasi sebagai dua isu utama dari masalah *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran dalam penelitian sebelumnya (Abdullah, 2012). Meskipun korupsi administratif mendorong terjadinya *fraud* dalam proses administrasi perencanaan anggaran, namun kecurangan di legislatif dan eksekutif juga terjadi. Masalah-masalah berikut ini ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai perencanaan dan penganggaran. Tabel 2.2. Mendiskusikan

masalah perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2.2. Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran

Peneliti	Permasalahan
Razak dkk., (2011)	Keterlambatan pengesahan anggaran menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam bentuk negosiasi.
Abdullah, (2012)	Korupsi pada tahap penyusunan anggaran diawali dengan korupsi politik yang terjadi dalam tahap penyusunan anggaran, ketika kesepakatan politik yang mendominasi. Selanjutnya korupsi administratif, karena keputusan administratif berlaku. Sehingga, korupsi politik dapat berakibat terjadinya korupsi administratif.
Setiawan et al., (2013)	Salah urus anggaran diawali dengan proses penganggaran, dengan menyarankan aktivitas yang bukan menjadi prioritas
Aristiowati, (2015)	Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran memiliki kepentingan yang saling bertentangan, yang dapat mengakibatkan perilaku <i>fraud</i> .
Yuhertiana et al., (2015)	Ada kecenderungan <i>markup</i> dalam proses perencanaan
Sholihah et al., (2016)	Skema <i>fraud</i> rencana adalah bermain angka dengan menyederhanakan detail biaya SPJ, merencanakan detail objek pembelian yang tidak perlu, markup dengan meningkatkan kualitas harga dan kuantitas.
Indriani et al., (2019)	<i>Fraud</i> dalam penyusunan anggaran berupa kewajiban (kontribusi), alokasi dana untuk kegiatan di luar anggaran, pemanfaatan celah hukum di mana sistem pengendalian dilakukan dan, jika dianggap perlu, semua dinas daerah melakukan hal yang sama.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang penggunaan teori *Fraud* Pentagon serta pengaruhnya dalam mendeteksi *fraud* akan diuraikan di bawah ini sebagai bagian langkah perbandingan dalam rangka mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti saat ini. Selain itu, pemaparan penelitian terdahulu, terutama sekali, dimaksudkan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti saat ini. Beberapa penelitian terkait dengan penggunaan teori *Fraud* Pentagon sebagai faktor pendukung

dan analisis terjadinya *fraud* yang berkaitan dengan kajian penelitian ini antara lain digambarkan pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan *Fraud*

No	Peneliti			Model, Sampe, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
1	Indrawati dan Dekar, (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan • (Tekanan Eksternal) • Peluang • (Kelemahan Sistem Informasi) • Rasionalisasi • (Budaya Etis Organisasi) • Kemampuan 	Sikap dan Kontrol Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif dengan data hasil survey kuesioner • Menggunakan 161 responden yaitu pegawai bagian perencana dan auditor inspektorat • Alat uji Partial Least Square (PLS) • <i>Fraud Diamond</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan eksternal terbukti mempengaruhi <i>fraud</i> pada proses perencanaan dan penganggaran. • Telah terbukti bahwa kelemahan dalam sistem informasi tidak mempengaruhi <i>fraud</i> perencanaan dan penganggaran. • Budaya etis organisasi belum terbukti mempengaruhi <i>fraud</i> perencanaan dan penganggaran. • Sikap telah terbukti mempengaruhi niat untuk melakukan <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran. • Terbukti bahwa norma subyektif tidak mempengaruhi niat untuk melakukan <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran. • Kontrol perilaku telah terbukti mempengaruhi niat untuk melakukan <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran. • Niat memengaruhi perilaku <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran.
2	Didi <i>et al.</i> , (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan distributif • Keadilan prosedural • Pengendalian internal • Penegakanperaturan • Komitmen organisasi • Budaya organisasi 	Kecenderungan kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif • 34 OPD yang terdapat 143 responden di Pemkot Bogor • Aplikasi SPSS 21.0 • Teori <i>Fraud triangle</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan mempengaruhi kecenderungan perilaku <i>fraud</i>. • Keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku <i>fraud</i>.

Tabel 2.3. Lanjutan

No	Peneliti			Model, Sampe, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
3	Avianto, <i>et al.</i> , (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan monopoli • Integritas 	Penipuan dalam pengadaan elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif • 95 responden di empat kabupaten • <i>Software Smart PLS 3.0</i> • Menggunakan Teori <i>Fraud diamond, Monopoly power</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan monopoli memiliki dampak positif yang signifikan terhadap <i>fraud e-procurement</i>. • Kejujuran memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap <i>fraud e-procurement</i>.
4	Syahria <i>et al.</i> , (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan Stabilitas keuangan, Tekanan eksternal, Target keuangan • Peluang Kualitas Auditor • Rasionalisasi Perubahan auditor • Kemampuan Perubahan direktur 	Penipuan laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif • 19 perusahaan • <i>Software SPSS 16</i> • Menggunakan teori <i>Fraud diamond</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas keuangan (tekanan) dan perubahan auditor eksternal (rasionalisasi) mempengaruhi pelaporan keuangan yang curang • Tekanan eksternal serta tujuan ekonomi. Kualitas auditor eksternal dan pergantian direksi (kemampuan) tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan
5	Yesiariani dan Rahayu, (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan eksternal • Rasionalisasi • Stabilitas keuangan, • Tujuan keuangan, • Pergantian auditor • Kebutuhan Pribadi • Sifat industri 	Financial statement	<ul style="list-style-type: none"> • Metode kuantitatif • 22 Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia • Aplikasi SPSS 17 • <i>Fraud diamond theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan eksternal dan rasionalisasi memiliki dampak positif yang signifikan • Stabilitas keuangan, tujuan keuangan, pergantian auditor, kebutuhan keuangan pribadi, sifat industri, pemantauan yang buruk dan kemampuan yang belum terbukti untuk melawan penipuan pelaporan keuangan

Tabel 2.3. Lanjutan

No	Peneliti			Model, Sampe, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
6	Permana, <i>et al.</i> , (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi Kepatuhan • Efisiensi sistem pengendalian intern • Budaya etis organisasi 	Penipuan dilembaga pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • metode kuantitatif • Sampel 105 responden dari kantor BPKP Jakarta. • <i>Perangkat lunak</i> SPSS 18 Menggunakan <i>Fraud Triangle Theory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya <i>fraud</i> di lembaga pemerintah • Efektivitas sistem pengendalian intern memiliki pengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di lembaga pemerintah • Budaya etis suatu organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>fraud</i> dalam pemerintah
7	Handoko, <i>et al.</i> , (2020)	Kecurangan Pelaporan Keuangan Sektor Perbankan	Fraud Pentagon	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuantitatif • 35 Sampel Sektor Bank • Teori Fraud Pentagon • OLS (Ordinary Least Square) 	Peluang merupakan faktor yang paling berpengaruh bagi perusahaan di bidang perbankan dalam melakukan <i>fraud</i> . Sedangkan faktor lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
8	Agustina, dan Pratomo, (2019)	Kecurangan Pelaporan Keuangan	Fraud	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Deskriptif Kuantitatif • 33 Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan • Teori Fraud Pentagon • Analisis Statistik deskriptif dan Analisis Regresi Logistik 	Sementara itu, tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan dan arogansi berdampak signifikan terhadap <i>fraud</i> pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Tabel 2.3. Lanjutan

No	Peneliti			Model, Sampe, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
9	Karka dan Ramantha (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Fraud Pentagon • Good Corporate Governance sebagai variabel moderator 	Persepsi Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Deskriptif Kuantitatif • 2 BPR di Provinsi Bali. BPR KSBAS dan BPR Legian • Teori Fraud Pentagon • Analisis Deskriptif 	<p>Tekanan berdampak negatif terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. Kemungkinan dan rasionalitas berpengaruh positif terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. Kompetensi dan arogansi tidak mempengaruhi persepsi kecurangan pelaporan keuangan. GCG mengurangi dampak negatif dari tekanan persepsi kecurangan pelaporan keuangan. GCG mengurangi dampak positif dari peluang dan rasionalitas terhadap persepsi kecurangan. GCG tidak memitigasi pengaruh kompetensi dan arogansi terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan, namun GCG merupakan jenis moderasi potensial dari interaksi antara kompetensi dan kesombongan.</p>

Tabel 2.3. Lanjutan

No	Peneliti			Model, Sampe, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
10	Zulaika dan Hadipryitno (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • tekanan keuangan • Sistem kelemahan • Kualitas panitia pengadaan • norma subjektif • Sikap terhadap perilaku <i>fraud</i> • Kontrol perilaku 	<p><i>Fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fraud triangle</i> dan <i>Theory of Planned Behavior</i> • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat dan beberapa kantor perwakilan terpilih • Kuantitatif Structural • <i>Equation model (SEM)-partial leastsquare</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika pengendalian intern pada pemerintah semakin tinggi maka praktek <i>fraud</i> semakin rendah dan sebaliknya jika SPI rendah maka praktek <i>fraud</i> pelaporan keuangan semakin tinggi • Interaksi antara pengendalian internal dan loyalitas tidak memiliki pengaruh tiap individu untuk <i>fraud</i> pelaporan keuangan • Sistem dan prosedur pengadaan yang lemah memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penyimpangan <i>fraud</i> • Terbatasnya kemampuan panitia pengadaan memiliki pengaruh positif terhadap penyimpangan <i>fraud</i> • Sikap yang mendukung tindakan <i>fraud</i> terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melakukan <i>fraud</i> • Norma subjektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat berbuat <i>fraud</i> • Kontrol Perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk melakukan <i>fraud</i> • Niat melakukan <i>fraud</i> memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> dalam proses pengadaan

2.7. Perumusan Hipotesis

2.7.1. Tekanan Eksternal Berpengaruh Terhadap *Fraud* Perencanaan dan Penganggaran

Tekanan merupakan salah satu faktor kunci yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Tuanakotta (2010) menegaskan bahwa tekanan muncul ketika seseorang memiliki kebutuhan yang mendesak namun tidak dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. Untuk memahami variabel ini, banyak proksi yang digunakan. Tekanan finansial digunakan oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) untuk menggambarkan bagaimana kurangnya pendapatan, gaji, atau upah yang tidak sesuai dengan risiko dan tanggung jawab, sehingga digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan *fraud*. Hasil penelitiannya, bagaimanapun, menunjukkan bahwa tekanan finansial memiliki dampak yang merugikan dan dapat diabaikan pada *fraud* pengadaan. Menurut penelitian Adeline dan Nadia (2018), stabilitas keuangan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Menurut SAS No. 99 pada Skousen, et al., (2009), indikator proxy yang bisa menurunkan tekanan adalah stabilitas keuangan, tekanan dari luar, posisi pimpinan itu sendiri, dan pencapaian target anggaran. Schuchter dan Levy (2015) menunjukkan bahwa tekanan dapat terjadi karena adanya faktor eksternal. Jika tekanan tersebut terkait dengan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, maka hal tersebut hanya terjadi jika ada unsur tekanan dari luar, seperti tekanan dari pimpinan atau pembatasan anggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab anggaran, dan substansinya tidak mengalokasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun berdasarkan mekanisme yang berlaku dari tingkat bawah. Demikian juga, persyaratan asosiasi yang sebenarnya juga memicu pemerasan. Mengingat sebelumnya, spekulasi yang

menyertainya dapat diketahui:

H1: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

2.7.2. Kelemahan Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Elemen *fraud* kedua adalah opportunity, proxy yang sering dihubungkan sistem pengendalian internal. (Didi dan Kusuma, 2018; Tehupuring et al., 2017) Sistem dan proses yang lemah Zulaiha dan Hadiprazhitno (2016) Rendahnya kualitas kelompok pengadaan Zulaikha dan Hadiprazhitno (2016). Investigasi yang berbeda dengan elemen area pribadi menggunakan beberapa perantara yang menangani faktor peluang termasuk Skousen, dkk. (2009) Sifat bisnis, pengamatan yang tidak menguntungkan, dan desain otoritatif.

Menurut Tuanakotta (2018), pelaku *fraud* juga mengakui bahwa mereka dapat melakukan kejahatan secara diam-diam karena situasi yang ada secara terang-terangan mengundang mereka untuk melakukannya. Menurut Zulaikha dan Hadiprajitno (2016), lemahnya sistem dan praktik pengadaan barang dan jasa berdampak besar terhadap terjadinya *fraud*. Hampir di semua kabupaten dan kota di Indonesia, penggunaan sistem informasi, seperti e-planning dan e-budgeting, telah digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Di beberapa tempat, sistem-sistem ini telah digabungkan. Terlepas dari penggunaan alat-alat ini, ada tanda-tanda ketidakkonsistenan dalam kesiapan perencanaan keuangan. Pelaku *fraud* dapat menggunakan kelemahan sistem informasi perencanaan dan penganggaran sebagai batu loncatan untuk skema mereka. Sistem perencanaan dan penganggaran sulit digunakan karena masalah infrastruktur pendukung yang masih kurang memadai, integrasi sistem yang tidak berjalan dengan baik, dan koneksi jaringan yang buruk di daerah. Akibatnya, tercipta celah yang dapat

dimanfaatkan oleh pelaku *fraud* untuk mendapatkan keuntungan. Permasalahan jaringan internet di beberapa daerah yang belum stabil jadi masalah utama dalam penggunaan sistem *e-planning* dan *e-budgeting*, sehingga jadi peluang yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan *fraud*. Berdasarkan hal di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kelemahan sistem informasi berpengaruh positif terhadap pelaku *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

2.7.3. Budaya Etis Organisasi Berpengaruh Terhadap *Fraud* dalam Perencanaan Dan Penganggaran

Variabel ketiga adalah rasionalisasi. Hal ini berkaitan dengan pembelaan pelaku *fraud* bahwa apa yang dilakukan sering terjadi. Karena hubungannya dengan sikap atau pertemuan orang, variabel ini bersifat tidak langsung.

Beberapa indikator yang sering dihubungkan dengan variabel ini adalah budaya organisasi (Didi dan Kusuma, 2018; Vlandari dan Zaki, 2014; Najahningrum, 2013), tanggung jawab organisasi (Didi dan Kusuma, 2018; Vlandari dan Zaki, 2014; Najahningrum, 2013). perilaku etis (Permana, 2017; Zulkarnain, 2013) dan penegakan hukum (dan Zaky, 2014; Zulkarnain, 2013).

Dalam hal *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran yang berkaitan dengan budaya etis organisasi, dipandang sebagai proksi yang mengelola variabel rasionalisasi. Menurut Pramudita (2013), budaya organisasi terutama terdiri dari nilai, norma, kepercayaan, sikap, dan anggapan tentang bagaimana individu harus berperilaku di tempat kerja. Menurut penelitian Ray dan Subramaniam (2008), orang yang bekerja di lingkungan dengan iklim moral yang lebih tinggi lebih cenderung menjunjung tinggi peraturan organisasi dan menahan diri dari tindakan *fraud*, sedangkan orang yang bekerja di lingkungan dengan budaya moral yang lebih rendah lebih cenderung

mendorong orang lain untuk melakukan tindakan *fraud*.

Dalam hal budaya etis organisasi dihubungkan dengan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, hal ini dipandang berkaitan sebagai proxy yang menangani variabel rasionalisasi. Menurut Pramudita (2013), terdapat lebih banyak regulasi, aturan, keyakinan, sikap, dan teori-teori tentang bagaimana individu berperilaku dalam organisasi tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ray dan Subramaniam pada tahun 2008, individu akan lebih mungkin untuk menjunjung tinggi kebijakan organisasi yang ada dan mencegah *fraud* di dalam organisasi jika mereka menjalani gaya hidup yang lebih bermoral. Sebaliknya, jika mereka menjalani gaya hidup yang kurang bermoral, mereka akan lebih cenderung mendorong orang untuk melakukan *fraud*. Karyawan dalam organisasi dengan standar moral yang kuat lebih mungkin untuk melihat adanya *fraud*, terutama dalam hal praktik perekrutan dan pemecatan. Karena, seperti yang telah disebutkan, hal ini sering terjadi di lingkungan organisasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Budaya etika organisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

2.7.4. Perilaku tidak Etis berpengaruh terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Perilaku tidak etis mengacu pada perilaku yang tidak mengikuti norma-norma yang diakui secara umum. Ketika dihubungkan dengan *fraud pentagon theory*. Faktor pertama adalah tekanan, hal ini dicapai melalui dampak budaya organisasi pada organisasi, jika budaya organisasi buruk maka akan berdampak pada sikap di antara atasan dan karyawan terhadap perilaku tidak etis. Sedangkan faktor berikutnya adalah peluang, jika tingkat perilaku tidak etis dalam organisasi tinggi, maka dapat menimbulkan peluang terjadinya tindakan *fraud* dalam organisasi, dan jika peluang

terjadinya tindakan *fraud* sudah ada. Faktor ketiga yaitu rasionalisasi, di mana anggota organisasi beranggapan perilaku tidak etis jadi hal yang umum di dalam organisasi.

Zulkarnain (2012) ada efek positif dari cara berperilaku tidak etis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin etis perilaku pegawai pemerintah, semakin besar peluang untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* di lingkungan pemerintahan. Budaya organisasi yang kuat juga memengaruhi perilaku etis karyawan. Seluruh anggota organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat menjamin bahwa orang-orang terdorong untuk bekerja atau berperilaku sesuai dengan harapan organisasi sesuai dengan pedoman dan standar organisasi.

Menurut Permatasari dkk. (2017), *fraud* dipengaruhi secara positif oleh perilaku tidak etis. *Fraud* di kalangan pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diturunkan dengan perilaku tidak etis. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

2.7.5. Sikap (*Attitude Toward Behavior*) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Aspek keempat dari *fraud diamond theory*, adalah pembaruan dari *fraud triangle* adalah *capability* (Wolfe dan Hermanson, 2004). Kemampuan ini sering dimaksud sebagai kapasitas atau kemampuan. Meskipun demikian, itu tidak terbatas pada keterampilan atau kompetensi, melainkan pengetahuan yang jelas semua tentang organisasi, kelebihan dan kelemahan sistem yang dipakai, pemahaman tentang SPI dalam organisasi. Individu dengan kapasitas ini adalah ancaman terbesar dalam melakukan tindakan *fraud*, terutama setiap kali ditemukan oleh situasi penting dalam

organisasi.

Dellaportas (2013) berpendapat bahwa pelaku *fraud* memanfaatkan wawasan, pemahaman, dan kapasitas mereka untuk mengontrol sistem yang berlaku di dalam organisasi dengan mengendalikan dan melewati kontrol sehingga aktivitas tindakan *fraud* mereka tidak dapat diidentifikasi.

Aizen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) berpendapat perilaku seorang didasarkan pada faktor yang berkontribusi terhadap niat, sehingga berubah jadi perilaku (*behavior*). Satu variabel dalam TPB ialah sikap terhadap perilaku. Pola pikir ini tercipta dari keyakinan akan hasil dari tindakan tersebut. Jika dikaitkan dengan unsur kemampuan seperti percaya diri, tipu muslihat, pemaksaan individu akan dengan mudah menutupi tipu muslihat yang dilakukannya, karena pelakunya sangat percaya diri, mudah berbohong dan menyuruh orang lain untuk menutupi perbuatannya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), Aizen (1991) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai variabel yang digabungkan untuk membentuk niat dan kemudian perilaku. Sikap terhadap perilaku (TPB) adalah salah satu elemennya. Asumsi-asumsi mengenai hasil dari tindakan ini membantu membentuk pola pikir ini. Dalam hal ini terkait dengan komponen kapasitas, seperti percaya diri, tipu muslihat, pemaksaan individu akan dengan mudah menutupi tipu muslihat yang dilakukannya. Individu yang memiliki kapasitas yakin bahwa kebohongan yang dilakukannya tidak akan diketahui.

Orang yang memiliki kemampuan yakin bahwa penipuan yang mereka lakukan tidak dapat dideteksi. Sehingga dengan keyakinan itu, para pelaku bisa mendefinisikan relasi, melakukan aktivitas curang pada proses perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hal di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Attitude (Sikap terhadap perilaku) berpengaruh positif terhadap niat berbuat

fraud dalam perencanaan dan penganggaran.

2.7.6. Norma Subjektif (*Subjective Norms*) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Norma subjektif ini menjelaskan seorang menganggap sesuatu berdasar keinginan orang di sekitarnya (Ramdhani, 2016). Untuk situasi ini, seperti hubungan antara atasan dengan bawahan, maupun hubungan horizontal, seperti hubungan antara teman sebaya. Dalam hubungan vertikal, ekspektasi dianggap sebagai kebutuhan, sehingga norma subjektif bergantung pada motivasi untuk memenuhi persyaratan perilaku. Sebaliknya, dalam hubungan horizontal, ekspektasi deskriptif akan terbentuk untuk mengikuti cara berperilaku orang lain.

Individu dengan kemampuan yang baik, terutama pemahaman terhadap sistem, keterampilan pribadi yang sesuai, dan akses terhadap kesempatan yang mereka miliki, niscaya dapat melakukan tindakan *fraud* pada saat proses perencanaan dan penganggaran karena adanya kesempatan yang diberikan oleh aspek keempat dari *fraud diamond theory* dari Wolfe dan Hermanson (2004). Memahami bahwa ekspektasi dari orang-orang di sekitar mereka merupakan motivator utama, yang mengarah pada niat untuk melakukan kecurangan, tidaklah sulit bagi orang-orang yang memiliki kapasitas ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Norma subjektif (*Subjective Norms*) berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran

2.7.7. Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) Berpengaruh Terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Persepsi individu mengenai ketersediaan sumber daya seperti alat, keterampilan, dan kemampuan yang membantu atau menghambat pelaksanaan perilaku (Eizen, 2005). , Semakin besar keyakinan individu dalam ketersediaan sumber daya atau kesempatan, semakin semakin besar kontrol perilaku individu.

Menurut Zulaikha dan Hadiprajitno (2016), ketika seseorang meyakini bahwa *fraud* tidak sulit untuk dilakukan dan lingkungan sekitar memperkuat keyakinan tersebut, maka ia akan lebih mungkin untuk benar-benar melaksanakan niatnya untuk melakukan tindakan *fraud*. Faktor ini dapat dikenal sebagai keyakinan diri dari pelaku tindakan *fraud*, yang berubah menjadi niat untuk melakukan tindakan *fraud*.

Orang dengan kesadaran kontrol yang tinggi akan merasa lebih percaya diri dengan bakat yang dimilikinya jika dikaitkan dengan aspek kemampuan dalam *fraud* diamond milik Wolfe dan Hermanson (2004).

Begitu pula saat melakukan tindakan *fraud* dalam proses anggaran. Pelakunya akan menerima bahwa apa yang dia lakukan tidak akan dideteksi mengingat kemampuan yang individu miliki. Orang-orang seperti itu juga umumnya akan lebih sadar akan kegiatan apa yang harus diambil ketika masalah muncul. Selain itu, hal ini diperkuat dengan adanya kejadian-kejadian signifikan yang terjadi dalam bisnis dan kurangnya kontrol perilaku, yang mengarah pada kecenderungan untuk melakukan tindakan *fraud*. Berdasarkan hal di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H7: *Perceived behavioral control* (Kontrol perilaku) berpengaruh positif terhadap niat berbuat *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

2.7.8. Niat Berpengaruh Terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Melalui penelitian Cohen et al. (2010) menciptakan model penelitian *fraud*. Elemen TPB yang mempengaruhi *fraud* melalui niat diwakili oleh faktor rasionalisasi. Dalam penelitiannya, Wolfe dan Hermanson (2004) menghubungkan dengan TPB Eisen (1991), yang memiliki tiga komponen - sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku - dengan kapabilitas sebagai bagian keempat dari *fraud diamond*.

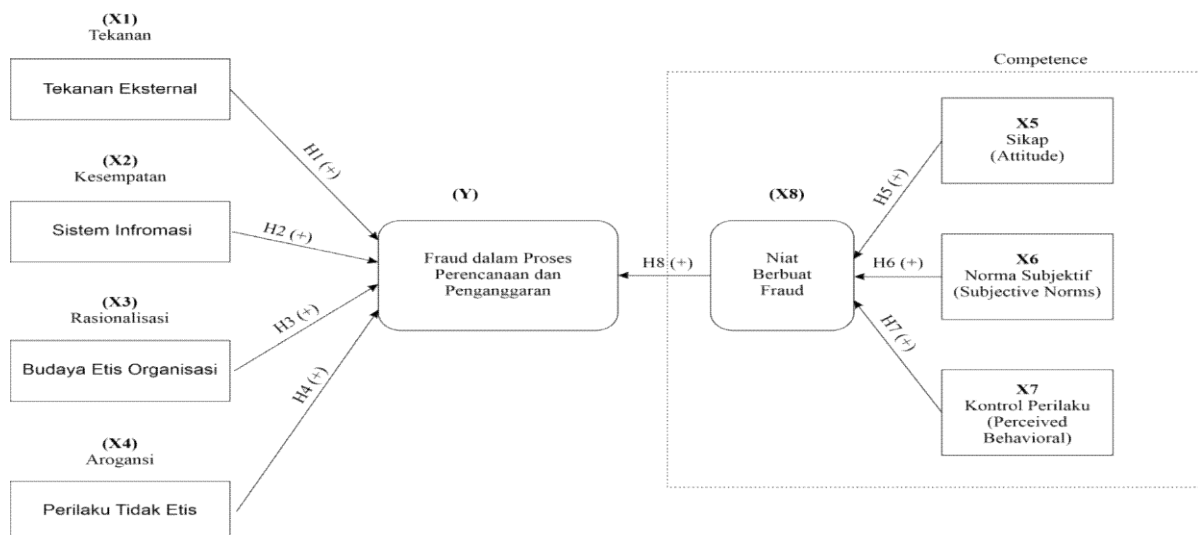
Niat berbuat *fraud*, menurut Zulaikha dan Hadiprajitno (2016), memiliki

dampak yang baik terhadap perilaku *fraud*. Ketiga komponen TPB tersebut dapat memengaruhi perilaku *fraud* melalui tujuan dalam proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan teori perilaku terencana dari Aizen (1991). Hal ini dapat memotivasi pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan *fraud* ketika mereka memiliki aspirasi dan didukung oleh bakat yang dimiliki saat ini. Berdasarkan hal di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H8: Niat berbuat *fraud* berpengaruh positif terhadap perilaku *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

2.8. Kerangka Model Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator yaitu tekanan eksternal, kekurangan sistem informasi, budaya etis organisasi, perilaku tidak etis, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku terhadap kecurangan penganggaran melalui niat melakukan kecurangan.



Gambar 2.6. Kerangka Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Bagian perencanaan dan Bagian pengelolaan anggaran pada kementerian dan lembaga di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi populasi dalam penelitian. Populasi ini digunakan dikarenakan penulis yakin jika bagian perencanaan dan bagian pengelolaan anggaran adalah orang yang mengerti dengan pasti proses perencanaan mulai dari pertama sampai tahap persetujuan akhir penganggaran, kemudian diharapkan masalah-masalah dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat di atasi seperti dalam keadaan yang sebenarnya.

Meskipun bagian pengelola anggaran dipilih penulis yakin mereka sangat mengerti masalah-masalah yang ada di internal pemerintahan terkait pengelolaan anggaran dari tahap pengeluaran hingga tahap pelaporan.

Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel dipilih menurut kriteria tertentu. Untuk pegawai bagian perencanaan, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pengalaman minimal 1 tahun di bagian perencanaan
2. Sudah pernah terlibat dalam proses perencanaan unit kerja
3. Berpartisipasi dalam proses pembahasan perencanaan dengan pemerintah pusat

Untuk pegawai bagian pengelola anggaran dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pengalaman minimal 1 tahun di bidang pengelola anggaran
2. Sudah pernah terlibat dalam proses anggaran unit kerja
3. Berpartisipasi dalam pembahasan anggaran dengan pemerintah pusat.

Jumlah populasi yang besar, kesulitan penulis untuk mencakup populasi secara keseluruhan, dan penggabungan bagian perencanaan dengan pengelola anggaran di kementerian dan lembaga, semuanya berkontribusi pada pemilihan teknik pengambilan sampel ini. Diasumsikan bahwa responden yang memenuhi kriteria tersebut akan dapat bereaksi secara tepat terhadap situasi di wilayah kerja masing-masing karena bagian perencanaan dan pengelolaan anggaran, berdasarkan kriteria di atas baik dari segi kompetensi, pengembangan karir, dan pengalaman, sangat memahami permasalahan di bidang *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran.

Untuk menentukan jumlah sampel minimal yang diperlukan, jumlah indikator pertanyaan yang dipakai pada kuesioner harus disesuaikan dengan jumlah variabel yang diamati (indikator) antara $n \times 5$ dan 43×10 variabel yang diamati (indikator) (Hair et al. , 2019) . Penelitian ini terdiri dari 43 pengukuran dari 9 variabel, di mana sembilan variabel merupakan variabel bebas dan satu variabel merupakan variabel terikat. Oleh karena itu, jumlah minimal sampel yang diperlukan untuk mewakili penelitian ini adalah $43 \times 5 = 215$. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 225 sampel dengan tujuan agar data lebih akurat.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari responden dengan menggunakan kuesioner langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah alat penelitian yang dikirim kepada responden dengan bermacam cara dan diisi oleh responden tersebut (Cooper dan Schindler, 2013).

Kepada responden diberi pertanyaan-pertanyaan terdiri dari delapan bagian yang dirangkai secara konsisten dan terstruktur oleh penulis untuk diisi oleh setiap responden sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Untuk menghitung tanggapan responden, penulis

menggunakan skala *Likert* untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Skala *Likert* dimulai dari 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) , 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Agak Tidak Setuju (ATS), 4 untuk Agak Setuju (AS), skor 5 untuk “setuju” (S), dan a skor 6 untuk “Sangat setuju” (SS).

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian diartikan sebagai simbol dari satu kejadian, karakteristik, sifat, atau atribut yang bisa diukur serta dikasih nilai. Jenis terdiri dari variabel kontinu, kontrol, keputusan, dependen, dikotomis, diskrit, dummy, asing, independen, menengah, dan moderasi (Cooper dan Schindler, 2013). Untuk mendapatkan data yang berharga tersebut, peneliti menggunakan skala Likert di mana responden diminta untuk melengkapi kolom yang disediakan dengan menandai pilihan nilai dari 1 sampai dengan 6. Pengisian kolom didasarkan pada persepsi responden terhadap setiap pernyataan yang disampaikan oleh peneliti.

Tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan yang diberikan berkisar antara 1 sampai dengan 6. Nilai 1 mengacu pada pernyataan “sangat tidak setuju”. Nilai ini menjelaskan rendahnya tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan kuesioner. Sedangkan nilai 6 mengacu pada pernyataan “sangat setuju”. Nilai ini menjelaskan tingginya tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan kuesioner.

3.3.1. Tekanan (Tekanan Eksternal)

Tingkat tekanan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* disebut tekanan eksternal. Dalam hal ini, Martantya dan Daljono (2013) menggunakan sejumlah indikator untuk mengetahui bagaimana responden bereaksi terhadap tekanan dari seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* selama proses perencanaan dan penganggaran. Indikator-indikator tersebut antara lain: (1) Peraturan organisasi, (2) Birokrasi dan Budaya organisasi, (3) Tuntutan stakeholder secara

langsung, dan (4) Tekanan kepentingan organisasi.

Variabel ini dibuat dengan menambahkan hasil dari penelitian lain (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016; Ridha dan Basuki, 2019) dan melakukan beberapa penyesuaian kecil sehubungan dengan pembahasan penelitian ini. Tabel 3.1 di bawah ini berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk menguji variabel tekanan (tekanan eksternal).

Tabel 3.1 Item pertanyaan untuk mengukur variabel tekanan (tekanan eksternal).

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Tekanan (Tekanan Eksternal)	Adanya batasan anggaran untuk setiap organisasi membuat organisasi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Manajer cenderung memberikan arahan penganggaran yang tidak termasuk dalam perencanaan.	Ridha, dan Basuki, (2019)
	Pemerintah pusat sering kali memasukkan anggaran yang belum ada perencanaannya.	
	Organisasi terpaksa mencari jalan keluar dengan mengintegrasikan tuntutan tersebut pada anggaran lain yang lebih besar karena ada kebutuhan organisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh anggaran tersebut.	

3.3.2. Kesempatan (Kelemahan Sistem Informasi)

Sistem informasi adalah sistem yang memanfaatkan teknologi digital dan dimaksudkan untuk membuat perencanaan dan penganggaran menjadi lebih mudah. Bagaimana responden memandang kelemahan sistem informasi sebagai peluang terjadinya *fraud* yang potensial. Variabel sistem informasi dalam penelitian ini merupakan versi terbaru dari indikator penelitian Ariax dan Kiswanto (2014), dan mencakup elemen-elemen berikut: (1) Tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran; (2) sistem informasi yang memenuhi semua kebutuhan; (3) akses terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran; dan (4) penggunaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Item-item pertanyaan yang digunakan untuk

menilai variabel kelemahan sistem informasi ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kelemahan Sistem Informasi

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Kesempatan (Kelemahan Sistem Informasi)	Sistem informasi yang digunakan masih terbatas pada satu mekanisme yaitu sistem informasi perencanaan pada bagian perencanaan dan sistem informasi penganggaran pada bagian keuangan.	Aryaksa dan Kiswanto (2014)
	Berbagai kendala teknis mengakibatkan perencanaan dan penganggaran tidak sinkron.	
	Keterbatasan akses ke setiap sistem informasi menyebabkan sulitnya mengevaluasi hasil perencanaan dan penganggaran.	Heriawati, (2018)
	Sistem perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron - celah untuk penipuan	

3.3.3. Rasionalisasi (Budaya Etis Organisasi)

Dalam konteks ini, budaya etis organisasi mengacu pada budaya organisasi dan praktik-praktik etis organisasi yang dapat memengaruhi bagaimana seorang individu bertindak dan berperilaku di dalam organisasi. Dalam konteks penelitian ini, responden ditanyai tentang seberapa besar menurut mereka budaya etis organisasi dapat memengaruhi karyawan untuk melakukan tindakan *fraud* selama proses perencanaan dan penganggaran.

Dengan beberapa perubahan dari penelitian ini, lima indikator yang ditetapkan Najahningrum (2013) dapat digunakan untuk mengukur variabel ini. Indikator-indikator tersebut adalah: (1) Model peran yang terlihat, (2) Komunikasi harapan etika, (3) Pembelajaran etika, dan (4) Hukuman untuk tindakan etis. (5) Teknik pengamanan moral. Tabel 3.3 di bawah ini menampilkan item pertanyaan yang digunakan untuk menilai variabel budaya etis organisasi.

Tabel 3.3. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Budaya Etis Organisasi

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Rasionalisasi (Budaya Etis organisasi)	Perintah atasan dalam organisasi menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan organisasi.	Najahningrum, (2013)
	Di dalam organisasi terdapat kode etik yang mengatur tentang nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etika, namun seringkali tidak diikuti oleh individu-individu di dalam organisasi tersebut.	
	Seminar etika dan pelatihan tentang standar yang dibutuhkan oleh organisasi yang menjelaskan praktik yang tidak dapat diterima sering diadakan tetapi sulit diterapkan dalam organisasi.	
	Ada indikasi bahwa tidak semua perilaku tidak etis dalam organisasi publik dapat dihukum.	
	Ruang lingkup audit yang dilakukan oleh auditor internal tidak mencakup masalah etika dalam organisasi, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran.	

3.3.4. Arogansi (Perilaku tidak Etis)

Penelitian itu dilakukan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang menunjukkan kombinasi tekanan dengan arogansi dan keserakahan, 89% kasus fraud melibatkan CEO. Arogansi adalah sifat yang menunjukkan rasa superioritas dan kurangnya kesadaran akan keserakahan dan pemikiran bahwa pengendalian internal perusahaan tidak dapat diterapkan pada mereka secara pribadi. (Crowe, 2011; Yusof & Simon, 2015). Arogansi dalam analisis ini diukur dengan fakta bahwa CEO percaya bahwa audit internal bukan salah satunya, CEO sewenang-wenang, CEO memiliki kebiasaan kepemimpinan yang berwibawa.

Dengan beberapa perubahan dari penelitian ini, lima indikator Robbins (2013) (1) perilaku yang menyalahgunakan posisi, (2) perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, (3) perilaku yang menyalahgunakan wewenang organisasi, (4) perilaku

yang tidak mencapai apa-apa, (5) perilaku yang mengabaikan. Tabel 3.4 di bawah ini berisi item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku tidak etis.

Tabel 3.4. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Perilaku Tidak Etis

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Arogansi (Perilaku Tidak Etis)	Di dalam organisasi terdapat kode etik yang mengatur tentang nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etika, namun seringkali para pimpinan organisasi tidak mematuhi.	Robbins, (2013)
	Ada indikasi pimpinan organisasi menggunakan pegawainya untuk melakukan kegiatan tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan fungsi pokok organisasi.	
	Pemimpin dalam organisasi diminta mengubah perencanaan awal sesuai keinginan pribadi	
	Ada tanda-tanda kecurangan dalam proses perencanaan dan penganggaran, tetapi pimpinan organisasi mengabaikan hal ini dan memerintahkan proses untuk dilanjutkan.	

3.3.5. Sikap (*Attitude Toward Behavior*)

Menurut sikap responden, seseorang yang memiliki kemampuan dapat dengan mudah melakukan tindakan *fraud* pada saat proses perencanaan dan penganggaran karena mereka sangat percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah tidak dapat diketahui karena kemampuan mereka begitu kuat dalam organisasi. Berikut indikator sikap yang digunakan untuk mengukur variabel ini: (1) Kognitif, (2) Afektif, (3) Perilaku, dan (4) Keyakinan (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016; Ramdhani, 2016). Berikut tabel 3.5. menampilkan item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku.

Tabel 3.5. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Sikap (*Attitude Toward Behavior*)

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
<i>Competence</i> (Sikap)	Seorang dengan kompetensi (kemampuan) sering berasumsi bahwa <i>fraud</i> yang mereka lakukan menimbulkan risiko yang minim.	Zulaikha dan Hadiprajitno,

Ada persepsi bahwa melewati perencanaan dan penganggaran adalah kejadian umum dalam organisasi.	(2016)
Perilaku memperoleh informasi biaya dari kebutuhan aktual biasanya terjadi selama proses perencanaan dan penganggaran.	Ramdhani (2016)
Keyakinan pada kemampuan sendiri dan posisi strategis dalam organisasi seringkali menjadi alasan bahwa <i>fraud</i> (kecurangan) yang telah dilakukan tidak akan terdeteksi.	

3.3.6. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Karena responden dipengaruhi oleh orang lain dalam lingkungannya, maka norma subjektif dalam penelitian ini berkaitan dengan penilaian responden terhadap seseorang yang dapat melakukan tindakan *fraud* selama proses perencanaan dan penganggaran. Standar subjektif seseorang menjadi bersifat pribadi dalam situasi ini, yang mendorong terjadinya ketidakjujuran. Kuesioner yang dibuat (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016; Ramdhani, 2016) mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang indikator-indikator penelitian ini sebagai berikut: (1) Kebiasaan organisasi untuk menyimpang dari norma, (2) Penerimaan untuk menyimpang dari norma, (3) Penjelasan keinginan orang lain, (4) Motivasi ketaatan, dan (5) Keyakinan normatif. Tabel 3.6 di bawah ini mencantumkan item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel norma subjektif.

Tabel 3.6. Item Pertanyaan untuk mengukur variabel norma subjektif

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
<i>Competence</i> (Norma Subjektif)	Terdapat persepsi bahwa <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat ditoleransi dalam suatu organisasi.	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Ada anggapan bahwa wajar/biasa bagi pihak tertentu untuk memberikan reward guna memperlancar kepentingannya dalam proses penganggaran.	Ramdhani (2016)
	Dapat diterima untuk melanggar aturan dan sedikit menyimpang dalam proses perencanaan dan penganggaran.	

	Ada indikasi bahwa pihak legislatif menginstruksikan panitia anggaran untuk memasukkan program-program yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya, dan ini dilakukan dengan sepengetahuan/izin pimpinan.	
	Ada anggapan bahwa untuk memuluskan suatu target juga untuk keuntungan pribadi organisasi membutuhkan pengorbanan finansial sejak awal	

3.3.7 Kontrol Perilaku (*Perceived Control Behavior*)

Sejauh mana responden percaya bahwa orang memiliki kontrol atas perilaku mereka, apakah mereka melakukan tindakan *fraud* atau tidak, adalah kontrol perilaku yang sedang dibahas di sini. Karena kecerdasan, posisi, kepercayaan diri, dan kualitas lain yang menumbuhkan niat untuk melakukan tindakan *fraud*, orang yang kompeten akan beranggapan bahwa tindakan *fraud* perencanaan dan penganggaran akan mudah dilakukan.

Berikut ini perubahan yang dilakukan pada indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yang terdapat pada pertanyaan berbasis penelitian (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016; Ramdhani, 2016) : (1) Kapasitas untuk melakukan kontrol atas perilaku; (2) Upaya penetapan tujuan; (3) Menjunjung tinggi kerahasiaan organisasi; (4) Interaksi yang dinamis; dan (5) Kesempatan dan ketersediaan sumber daya. Tabel berikutnya 3.7. merepresentasikan item item yang digunakan untuk mengukur variabel kontrol perilaku (*perceived control behavior*).

Tabel 3.7. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Kontrol Perilaku

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
<i>Capability</i> (Kontrol Perilaku)	Karena perilaku ingin mendominasi, beberapa orang yang memiliki peluang melakukan <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran.	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Ada indikasi bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan dalam suatu organisasi cenderung berusaha mencapai tujuan dengan cara-cara tertentu, meskipun cara yang dilakukan tidak benar.	Ramdhani, (2016)

	Kesempatan menduduki posisi strategis dalam organisasi dimanfaatkan oleh individu yang mampu melakukan <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran.	
	Keterbukaan dalam dokumen perencanaan sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan <i>fraud</i> .	
	Ada tanda-tanda kerja sama antara Badan Anggaran Legislatif dan Komite Anggaran Eksekutif dalam pengenalan program-program tertentu yang tidak direncanakan sebelumnya.	

3.3.8. Niat (*Intention to Engage Fraud*)

Niat dalam penelitian ini lebih melihat bagaimana responden mempersepsikan seseorang yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran dari sudut pandang kognitif dan afektif. Variabel ini dinilai dengan menggunakan berbagai indikator penelitian, yang tercermin dalam pertanyaan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Zuleikha dan Hadiprazhitno (2016) dengan sejumlah perubahan, yaitu: (1) niat perilaku, (2) rencana dengan pihak lain, (3) penyembunyian *fraud* secara formal, dan (4) memahami kesenjangan organisasi. Tabel 3.8. menyajikan elemen pertanyaan-pertanyaan yang digunakan mengukur variabel Niat (*Intention to Engage Fraud*).

Tabel 3.8. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel Niat (*Intention to Engage Fraud*)

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
Niat	Terdapat indikasi <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain.	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)
	Kecurangan perencanaan dan penganggaran direncanakan oleh pelaku dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses tersebut.	

	Terdapat indikasi bahwa pelaku kecurangan perencanaan dan penganggaran bertindak sesuai dengan niatnya dengan menutupi kecurangan tersebut secara formal dengan ketentuan yang terkadang memiliki muatan yang berbeda-beda.	
	Pelaku sangat memahami kesenjangan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga untuk mewujudkan niatnya, pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakannya.	

3.3.9 *Fraud* Dalam Perencanaan dan Penganggaran

Fraud perencanaan dan penganggaran yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan selama proses perencanaan dan penganggaran dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau institusi dengan merugikan negara. Variabel ini diukur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai indikator dari berbagai jenis *fraud* perencanaan dan penganggaran yang diindikasikan oleh responden. Ukuran-ukuran tersebut tercermin dalam kuesioner yang dibuat berdasarkan penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2016), yaitu: (1) Penyimpangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, (2) Penyimpangan oleh eksekutif dan legislatif, (3) Pemberian hadiah kepada panitia anggaran dan badan anggaran, (4) Program kegiatan yang tidak memiliki perencanaan, (5) Penggelembungan (mark-up) biaya dan pengurangan pendapatan dalam anggaran, (6) Menggunakan rencana strategis sebagai dasar penyusunan anggaran, (7) Kurangnya transparansi penyusunan anggaran; dan (8) Perantara anggaran. Tabel 3.9. menampilkan item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel *fraud*.

Tabel 3.9. Item Pertanyaan untuk Mengukur Variabel *Fraud*

Faktor	Item Pertanyaan	Referensi
<i>Fraud</i>	Tindakan <i>fraud</i> yang Anda ketahui dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain	Zulaikha dan Hadiprajitno, (2016)

Anda mengetahui bahwa <i>fraud</i> (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dilakukan oleh legislatif atau pihak lain untuk keuntungan diri sendiri atau kepentingan orang lain.
Ada aspek-aspek tertentu yang memberikan gratifikasi ke panitia atau lembaga anggaran untuk memenuhi keinginannya.
Beberapa program/kegiatan anggaran tidak melalui mekanisme perencanaan
Anggaran selalu dirancang dengan defisit, dan pendapatan dihitung pada tingkat yang rendah, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan korupsi.
Adanya kecenderungan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja tidak dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan RKP/Rencana Strategis Satuan Kerja, hal ini dilakukan untuk meloloskan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Tidak ada transparansi internal penganggaran membuat sulit untuk mengontrol anggaran berdasarkan rencana yang dibuat.
Tahap penganggaran merupakan tahap yang paling rawan terjadi <i>fraud</i> (kecurangan). Pada tahap ini, muncul orang yang tidak bertanggung jawab, mengambil tindakan untuk memuluskan kepentingannya.

3.4. Teknik Analisis Data

Tujuan dari proses analisis data adalah untuk menemukan informasi terkait dari data dan menerapkan temuan untuk mengatasi masalah (Ghozali, 2011). Data akan dipelajari dalam penelitian ini dengan dua cara yang berbeda: secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk memastikan akibat dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk memeriksa karakteristik responden dan mengkarakterisasi faktor. Aplikasi *Smart-PLS* digunakan oleh penulis untuk melakukan prosedur analisis data ini.

3.5. Uji Kualitas Data

Untuk memverifikasi keakuratan data dalam penelitian ini, dua model pengujian - model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) - digunakan. Uji validitas dan reliabilitas data dilakukan dalam model pengukuran (*outer model*), dan dilakukan pengujian untuk memastikan hubungan antar variabel (*Collinearity Assessment*), koefisien determinasi (R^2), nilai signifikansi (*t-test*), dan *Goodness of Fit* (GoF) Test dilakukan dalam model struktural (*inner model*).

3.5.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

3.5.1.1. Uji Validitas

Ketepatan alat ukur yang digunakan untuk pengertian yang diuji merupakan bagian dari uji validitas. Jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan hasil yang dapat diukur, maka kuesioner tersebut dianggap valid (Ghozali, 2009). Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menunjukkan kapasitas skala sehubungan dengan konsep yang direncanakan. Uji validitas konvergen dan diskriminan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai validitas. Menurut Fornell dan Larcker (1981), validitas konvergen dapat dicapai jika nilai loading untuk setiap item dan nilai *Average Variance Expected* (AVE) lebih dari 0,5. Jika akar kuadrat dari AVE lebih dari 0,5, maka skala dapat dikatakan valid. Jika akar kuadrat dari AVE untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi tertinggi, maka validitas diskriminan dapat dicapai.

3.5.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tanda konsistensi, akurasi, dan presisi suatu alat ukur ketika melakukan pengukuran. Dalam situasi ini, reliabilitas dapat digunakan untuk menentukan apakah alat tersebut dapat digunakan berulang kali untuk memperoleh data yang konsisten, jika tidak untuk responden yang berbeda, maka paling tidak untuk responden yang sama. Jika seorang responden secara konsisten menjawab suatu

pertanyaan dan cenderung tetap konstan dari waktu ke waktu, suatu kuesioner dianggap reliabel atau handal. Metode *composite reliability* yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk pengujian reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach's alpha > 0,70 Ghozali (2011); namun demikian pendekatan *eksplanatori* dengan nilai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2015).

3.5.2. Model Struktural (*Inner Model*)

3.5.2.1. Uji *Collinearity Assessment* (Hubungan Antar Variabel)

Untuk memahami bagaimana variabel laten berinteraksi dalam sebuah model dan memengaruhi seberapa akurat mereka memprediksi hasil, uji kolinearitas digunakan. Kesalahan dalam estimasi bobot dan kesalahan dalam perhitungan signifikansi dapat diakibatkan oleh kolinearitas yang tinggi. Menghitung Tolerance (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) memungkinkan untuk evaluasi kolinearitas dalam konstruk (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 5, variabel ini bersifat kolinear dan perlu dihilangkan dari model pengukuran.

3.5.2.2. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa besar variasi yang dapat diterapkan pada variabel dependen oleh suatu model. Koefisien determinasi adalah angka antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, maka variabel-variabel independen hampir seluruhnya memenuhi syarat untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, koefisien determinasi yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas variabel-variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen secara memadai cukup rendah.

3.5.2.3. Uji Signifikansi (Uji-t)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, Uji signifikansi (uji-t) digunakan untuk menentukan efek individual dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2011), hipotesis yang dinyatakan sebelumnya dapat dianggap benar atau terbukti signifikan jika nilai-t lebih tinggi dari nilai t-tabel.

3.5.2.4. Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Uji *Goodness of Fit* (GoF) menganalisis kesamaan antara matriks kovarians yang diamati dan dihitung dan menilai seberapa baik model yang didefinisikan secara teoritis dapat mereplikasi matriks kovarians yang diamati antara ukuran. (Volosy and others, 2019) Nilai generalitas yang direkomendasikan untuk skala GoF adalah 0,50, dan nilai R² memiliki nilai interpretasi 0,10 untuk GoF kecil, 0,25 untuk GoF sedang, dan 0,36 untuk GoF sedang. (Ghozali dan Latan 2015).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian mengenai perilaku *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan hasil pengolahan data dari kuesioner. Hasil penelitian ini akan menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Pada bab ini, hasil penelitian diuraikan sebagai berikut: 1) deskripsi responden berdasarkan data diri yang dikumpulkan; 2) hasil evaluasi model pengukuran (*outer model*), yang disajikan dalam bentuk uji kualitas data (validitas dan reliabilitas); dan 3) hasil evaluasi model struktural (*inner model*), yang disajikan dalam bentuk uji kolinearitas (nilai inner VIF), uji koefisien determinasi (*r-square*), dan hasil signifikan (*t-test*).

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Responden pada penelitian ini yakni pegawai bagian perencanaan dan pegawai bagian pengelolaan anggaran pada instansi di bawah kementerian dan lembaga di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 225 orang, di mana 48 orang adalah pegawai bagian perencanaan dan 177 orang bagian pengelola anggaran, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Posisi

Posisi	Jumlah responden	Persentase
Perencana	48	21 %
Pengelola Anggaran	177	79 %
Jumlah	225	100 %

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data yang dikumpulkan, 158 responden (70%) bekerja untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sedangkan 67 responden (30%) dipekerjakan oleh pemerintah pusat. Tabel 4.2 memberikan penjelasan mengenai hal ini.

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Jumlah responden	Persentase
Pusat	67	30 %
Daerah	158	70 %
Jumlah	225	100 %

Sumber : Data diolah

Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebanyak 118 orang (52%), dan laki-laki sebanyak 107 orang (48%).

Tabel 4.3 menjelaskan hal ini.

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah responden	Persentase
Laki Laki	107	48 %
Perempuan	118	52 %
Jumlah	225	100 %

Sumber : Data diolah

Dari total 225 responden, rentang usia paling banyak ialah usia 21-30 tahun sebanyak 46 responden (20%), usia 31-40 tahun sebanyak 79 responden (35%), usia 41-50 tahun sebanyak 76 responden (34%) , dan berusia 51 - 60 tahun - 24 responden (11%), seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah responden	Persentase
21 - 30 tahun	46	20 %
31 - 40 tahun	79	35 %
41 - 50 tahun	76	34 %
51 - 60 tahun	24	11 %
Jumlah	225	100 %

Sumber : Data diolah

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan meliputi 114 responden dengan tingkat pendidikan diploma (D3), 57 responden dengan tingkat pendidikan sarjana (S1), dan 54 responden dengan tingkat pendidikan magister (S2). Seperti yang terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah responden	Persentase
Diploma	114	51 %
Sarjana	57	25 %
Magister	54	24 %
Doktor	-	0 %
Jumlah	225	100 %

Sumber : Data diolah

4.2 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Penilaian validitas dan reliabilitas kualitas data diperlukan untuk menentukan apakah suatu instrumen kuesioner valid dan reliabel untuk variabel-variabel yang sedang diteliti. Menurut Ghazali dan Lathan (2015), reliabilitas komposit, *Cronbach's alpha* untuk blok indikator, dan validitas konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten digunakan untuk menilai *outer model* dengan indikator refleksif. Selain itu, relevansi indikator pembentuk konstruk diperhitungkan ketika membandingkan bobot relatif dan mengevaluasi kandungan makna *outer model* dengan indikator formatif.

4.2.1 Hasil Uji Validitas Data

4.2.1.1. Uji Validitas Konvergen

Untuk mengkonfirmasi validitas konvergen, penelitian ini menggunakan ukuran pemuatan yang menunjukkan nilai item loading bersama dengan nilai

Average Variance Expected (AVE) awal dan akhir.

.Tabel 4.6 Perbandingan Nilai *Item Loading* dan Nilai AVE Awal dan Akhir

Variabel	Kode	Nilai Awal (43-Item)		Nilai Akhir (28-Item)	
		<i>Loading</i>	<i>AVE</i>	<i>Loading</i>	<i>AVE</i>
Tekanan (TE)	TE1	0.839	0.647	0.844	0.646
	TE2	0.809		0.799	
	TE3	0.794		0.772	
	TE4	0.774		0.798	
Kesempatan (KE)	KE1	0.728	0.563	0.788	0.632
	KE2	0.707		-	
	KE3	0.762		0.765	
	KE4	0.800		0.830	
Rasionalisasi/ Budaya Etis Organisasi (RA)	RA1	0.593	0.548	-	0.630
	RA2	0.775		0.769	
	RA3	0.760		0.784	
	RA4	0.778		0.841	
	RA5	0.777		0.778	
Arogansi / Perilaku Tidak Etis (AR)	AR1	0.727	0.602	0.694	0.601
	AR2	0.782		0.783	
	AR3	0.814		0.814	
	AR4	0.777		0.804	
Competence/ Sikap Terhadap Perilaku <i>Fraud</i> (SK)	SK1	0.830	0.606	-	0.788
	SK2	0.840		0.894	
	SK3	0.819		0.882	
	SK4	0.599		-	
Competence/ Norma Subjektif (NS)	NS1	0.712	0.586	-	0.641
	NS2	0.784		0.796	
	NS3	0.786		0.825	
	NS4	0.742		0.767	
	NS5	0.800		0.814	
Competence/ Kontrol Perilaku (KP)	KP1	0.696	0.566	-	0.838
	KP2	0.678		-	
	KP3	0.764		-	
	KP4	0.827		0.906	
	KP5	0.787		0.925	
Niat Berbuat <i>Fraud</i> (NR)	NR1	0.743	0.596	0.775	0.659
	NR2	0.718		-	
	NR3	0.808		0.823	
	NR4	0.815		0.836	
<i>Fraud</i> / Kecurangan (FR)	FR1	0.701	0.539	-	0.772
	FR2	0.680		-	
	FR3	0.734		-	
	FR4	0.656		-	

	FR5	0.744		0.897	
	FR6	0.792		-	
	FR7	0.798		0.860	
	FR8	0.756		-	

Fornell dan Larker (1981) menyarankan agar AVE lebih dari 0,5 untuk uji validitas konvergen, yang menunjukkan bahwa 50% atau lebih dari varians ukuran dapat dijelaskan. Pada saat uji validitas diskriminan dilakukan dengan melihat korelasi cross loading, ditemukan bahwa nilai item pertanyaan dari variabel lain lebih tinggi dibandingkan dengan nilai variabel pertanyaan itu sendiri. Pada saat pengolahan data, tidak ada nilai loading yang berada di bawah 0,5. Akibatnya, 15 item pertanyaan dihilangkan dan dilakukan pengolahan data kembali, yaitu KE2, RA1, SK1, SK4, NS1, KP1, KP2, KP3, NR2, FR1, FR2, FR3, FR4, agar semua variabel stabil dan tetap dengan nilai loading, *Average Variance Expected (AVE)* dan *cross loading correlation*.

4.2.1.2. Uji Validitas Discriminant

Menurut uji validitas diskriminan ini, seharusnya tidak ada korelasi antara konstruk yang berbeda. Dua teknik umum untuk mengevaluasi validitas diskriminan termasuk membandingkan nilai uji Fornell-Larker untuk setiap konstruk dan menentukan apakah nilai korelasi cross loading untuk setiap variabel harus lebih dari 0,50. Nilai cross loading elemen untuk setiap variabel ditampilkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Nilai *Cross Loading*

	(TE)	(KE)	(RA)	(AR)	(SK)	(NS)	(KP)	(NR)	(FR)
TE.1	0.844	0.285	0.488	0.196	0.403	0.432	0.221	0.466	0.469
TE.2	0.799	0.245	0.451	0.223	0.392	0.437	0.253	0.359	0.367
TE.3	0.772	0.364	0.579	0.288	0.519	0.568	0.4	0.443	0.406
TE.4	0.798	0.397	0.535	0.071	0.437	0.37	0.292	0.379	0.476
KE.1	0.304	0.788	0.404	0.141	0.372	0.42	0.522	0.471	0.423
KE.3	0.313	0.765	0.446	0.289	0.346	0.371	0.474	0.447	0.413

KE.4	0.35	0.830	0.369	0.297	0.336	0.467	0.809	0.452	0.407
RA.2	0.569	0.373	0.769	0.261	0.532	0.617	0.365	0.563	0.502
RA.3	0.485	0.45	0.784	0.193	0.538	0.517	0.35	0.461	0.48
RA.4	0.522	0.4	0.841	0.236	0.544	0.442	0.25	0.509	0.563
RA.5	0.458	0.405	0.778	0.252	0.531	0.467	0.373	0.597	0.549
AR.1	0.143	0.241	0.293	0.694	0.267	0.257	0.261	0.247	0.216
AR.2	0.164	0.211	0.227	0.783	0.179	0.247	0.209	0.253	0.232
AR.3	0.23	0.217	0.237	0.814	0.189	0.311	0.253	0.281	0.25
AR.4	0.187	0.268	0.187	0.804	0.248	0.289	0.255	0.313	0.307
SK.2	0.463	0.437	0.587	0.271	0.894	0.535	0.352	0.574	0.62
SK.3	0.503	0.347	0.612	0.234	0.882	0.566	0.307	0.545	0.529
NS.2	0.49	0.413	0.511	0.238	0.529	0.796	0.49	0.552	0.443
NS.3	0.503	0.518	0.536	0.312	0.49	0.825	0.517	0.474	0.407
NS.4	0.387	0.374	0.48	0.27	0.442	0.767	0.318	0.407	0.382
NS.5	0.39	0.381	0.517	0.329	0.512	0.814	0.356	0.49	0.401
KP.4	0.356	0.826	0.376	0.286	0.341	0.486	0.906	0.459	0.412
KP.5	0.306	0.628	0.39	0.29	0.34	0.487	0.925	0.51	0.367
NR.1	0.396	0.523	0.55	0.284	0.456	0.572	0.542	0.775	0.511
NR.3	0.421	0.443	0.523	0.274	0.5	0.4	0.334	0.823	0.708
NR.4	0.434	0.447	0.57	0.312	0.579	0.53	0.444	0.836	0.622
FR 5	0.423	0.447	0.525	0.285	0.513	0.398	0.336	0.719	0.897
FR 7	0.534	0.474	0.648	0.294	0.636	0.511	0.415	0.652	0.860

Nilai korelasi cross loading ditunjukkan pada tabel di atas ketika tidak ada pertanyaan atau variabel lain yang memiliki nilai lebih tinggi dari variabel yang dimaksud untuk mengurangi kebutuhan pemrosesan data yang berulang-ulang. Kesimpulan dari nilai-nilai ini memenuhi persyaratan validitas diskriminan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel 4.8 Nilai korelasi antar variabel

	(TE)	(KE)	(RA)	(AR)	(SK)	(NS)	(KP)	(NR)	(FR)
(TE)	0.804								
(KE)	0.405	0.795							
(RA)	0.64	0.512	0.794						
(AR)	0.235	0.304	0.298	0.775					
(SK)	0.544	0.443	0.675	0.285	0.888				
(NS)	0.557	0.527	0.639	0.357	0.62	0.801			
(KP)	0.36	0.788	0.419	0.315	0.372	0.531	0.915		
(NR)	0.514	0.575	0.672	0.356	0.631	0.607	0.531	0.812	
(FR)	0.539	0.522	0.662	0.329	0.648	0.512	0.424	0.803	0.878

Konstruksi setiap variabel ditunjukkan pada tabel 4.8 di atas, membuat setiap variabel lebih besar dari 0,70. Dibandingkan dengan variabel lainnya, nilai korelasi setiap variabel (angka yang dicetak tebal) dengan variabel tersebut lebih besar. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak memiliki *Discriminant Validity*.

4.2.1.3. Hasil Uji Reliabilitas Data

Nilai *composite reliability* digunakan dalam uji reliabilitas. Jika nilai *composite reliability* lebih dari 0,7, suatu variabel dianggap reliabel. Nilai *cronbach's alpha* > 0,70 menurut Ghazali (2011), sedangkan nilai 0,6 masih dapat diterima apabila menggunakan pendekatan eksplanatori (Ghozali, 2015). Dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel berdasarkan hasil pengolahan data, di mana nilai *composite reliability* lebih dari 0,7.

Tabel 4.9 Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Tekanan (TE)	0.879
Kesempatan (KE)	0.837
Rasionalisasi (RA)	0.872
Arogansi/Perilaku Tidak Etis (AR)	0.857
<i>Competence</i> /Sikap Terhadap Perilaku (SK)	0.882
<i>Competence</i> /Norma Subjektif (NS)	0.877
Kontrol Perilaku (KP)	0.912
Niat Berbuat <i>Fraud</i> (NR)	0.853
<i>Fraud</i> Kecurangan (FR)	0.871

4.3 Hasil Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.1 Hasil Uji Collinearity (Inner VIF Values)

Inner model akan diuji jika *outer model* telah divalidasi dan semua variabel sesuai dengan spesifikasi. Tabel uji kolinearitas ditunjukkan pada Tabel 4.10. (Nilai

VIF Inner).

Tabel 4.10 Nilai Uji *Collinearity (Inner VIF Values)*

	TE	KE	RA	AR	SK	NS	KP	NR	FR
Tekanan (TE)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739
Kesempatan (KE)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.589
Rasionalisasi (RA)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.382
Arogansi (AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.169
<i>Competence/Sikap</i> (SK)	-	-	-	-	-	-	-	1.630	-
<i>Competence/Norma</i> (NS)	-	-	-	-	-	-	-	1.958	-
Kontrol Perilaku (KP)	-	-	-	-	-	-	-	1.399	-
Niat Berbuat <i>Fraud</i> (NR)	-	-	-	-	-	-	-	2.188	-
<i>Fraud</i> Kecurangan (FR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hubungan antara variabel laten dalam suatu model dikenal sebagai kolinearitas. Kapasitasnya untuk prediksi tidak menentu dan tidak akurat. Kolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan penilaian signifikansi menjadi salah. Ketika $VIF > 5$, kolinearitas terjadi. Jika suatu variabel ditemukan, maka variabel tersebut perlu dihilangkan dari model pengukuran. Tidak ada variabel yang terhubung dengan tabel 4.10 di atas yang lebih besar dari 5. Dapat diklaim bahwa semua variabel yang digunakan stabil karena nilainya berada di antara posisi 1 dan 3.

4.3.2. Hasil Uji Koefisien Determinan (*R-Square*)

Tabel 4.11 Nilai Uji *Collinearity Determinan (R-Square)*

Variabel	R Square
<i>Fraud</i> (FR)	0.733
Niat (NR)	0.524

Variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan arogansi memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,733 untuk variabel *fraud* (FR) pada tabel di atas, sedangkan

variabel niat (NF), yang memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,524, dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif, dan variabel kontrol perilaku sebesar 52,4%.

4.3.3 Hasil Uji Signifikansi (*Uji-t*)

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai *T*-statistik dan *P*-value dari masing-masing variabel.

Berdasarkan tabel 4.12

Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi

Hipotesis	Variabel	Original Sample	T-Statistic	P Values	Hasil
H1	TE -> FR	0.093	1.735	0.083***	Didukung
H2	KE -> FR	0.015	0.359	0.720	Tidak Didukung
H3	RA -> FR	0.118	1.917	0.056***	Didukung
H4	AR -> FR	0.018	0.498	0.619	Tidak Didukung
H5	SK -> NR	0.395	6.471	0.001*	Didukung
H6	NS -> NR	0.220	3.345	0.001*	Didukung
H7	KP -> NR	0.267	4.019	0.000*	Didukung
H8	NR -> FR	0.701	13.877	0.000*	Didukung

* $p=0.001$; ** $p=0.05$; *** $p=0.10$

Hipotesis dianggap bisa diterima apabila *T*-statistic lebih besar dari *T*-value 1,96 (alpha 5%) dan untuk *P*-values $<0,05$, diberi nilai sampel asli. Menurut tabel di atas kelihatan bahwa terdapat hipotesis yang didukung oleh data adalah H1, H3, H5, H6, H7, dan H8, sedangkan hipotesis yang tidak didukung merupakan H2 dan H4.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Tekanan (Tekanan Eksternal) Berpengaruh Positif terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut di atas, diketahui bahwa pengaruh tekanan terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran memiliki nilai statistik sebesar 1,735 atau lebih kecil dari 1,96 (alpha 5%) pada *P*-values sebesar 0,083 atau lebih besar dari 0,05 dan initial sample positif sebesar 0,093. Hipotesis pertama yang

menyatakan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan dalam perencanaan dan penganggaran **didukung** atau terbukti didukung oleh data.

Berdasarkan temuan penelitian berkonsentrasi pada *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, di mana *fraud* ini lebih terkait dengan tekanan eksternal dari pelaku itu sendiri, maka penelitian ini konsisten dengan penelitian Usuli dan Urumsah (2020) yang menemukan bahwa tekanan memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap *fraud*. Penelitian ini menemukan bahwa tekanan, seperti dalam penelitian, memiliki dampak yang menguntungkan terhadap *fraud* (Skousen, et al., 2009; Schuchter dan Levi, 2015). Karena adanya tekanan dari atasan, tekanan dari pihak legislatif pada saat pembahasan perencanaan dan penganggaran, dan harapan dari organisasi itu sendiri untuk memasukkan kebutuhan organisasi yang tidak dapat dianggarkan secara formal ke dalam program kegiatan, pelaku *fraud* melakukan tindakan *fraud* pada saat proses perencanaan dan penganggaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses politik untuk mengesahkan anggaran sangat sulit dan berbelit-belit (Mardiasmo, 2018), sehingga sulit untuk menolak tekanan dari berbagai pihak.

Implikasi dari penelitian ini bahwa SKPD yang telah melatih SDM perencana lewat jalur karir dan serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam perencanaan APBD dipandu oleh atasan dan lainnya untuk kepentingan mereka sendiri. Program-program prioritas yang seharusnya dialokasikan untuk tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Instansi teknis dipaksa untuk melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, sementara program-program yang telah dinyatakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam Musrenbang ditunda pelaksanaannya. Pihak eksekutif dan legislatif harus bekerja sama dengan semua pihak dan berkomitmen untuk

mengutamakan kepentingan masyarakat dengan tetap mengikuti rencana yang telah disahkan.

4.4.2. Kesempatan (Kelemahan Sistem Informasi) Berpengaruh Positif terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Pada saat pengujian hipotesis kedua (H2) adalah peluang yang berhubungan dengan kelemahan sistem informasi didapat *t-statistic* sebesar 0,359 yang memiliki arti kurang dari 1,96 (alpha 5%) dengan sampel positif sebesar 0,015. Untuk *P-values*, nilainya 0.720 , artinya > 0.05 . Dengan nilai tersebut, maka bisa dikatakan bahwa hipotesis kedua yang mengatakan bahwa kelemahan sistem informasi berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran **tidak didukung** atau tidak terbukti.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, sejumlah responden sepakat bahwa peluang terjadinya *fraud* disebabkan oleh kelemahan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Namun demikian, *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran tidak banyak terpengaruh oleh hal ini. Hal ini berbeda dengan klaim Cressy (1953) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memotivasi orang untuk melakukan tindakan *fraud* adalah kesempatan. Referensi Cressy tentang kesempatan mengacu pada keadaan yang memungkinkan terjadinya tindakan *fraud*, seperti sistem dan proses pengendalian yang lemah, sumber daya manusia yang tidak efektif, dan kurangnya pemantauan. Sejumlah investigasi mendukung hipotesis ini (Cohen et al., 2010; Schuchter dan Levi, 2015; Akkeren dan Buckby, 2017).

Berbeda dengan temuan penelitian ini, *fraud* perencanaan dan penganggaran tidak terpengaruh oleh kelemahan sistem informasi. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya sistem informasi perencanaan dan penganggaran,

yang menunjukkan bahwa *fraud* tidak mungkin terjadi. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran saat ini sedang diperbarui dan diinovasi oleh pemerintah.. Pemerintah baru saja merilis program Krisna, yang menggabungkan data perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah beberapa organisasi yang terlibat. Mengingat banyak pihak dengan berbagai kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran, maka penggunaan sistem informasi sangat tepat. Oleh karena itu, suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan

Implikasinya adalah bahwa sistem informasi pemerintah untuk perencanaan dan penganggaran dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi semua persyaratan perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di kementerian dan departemen berada di bawah tanggung jawab semua departemen yang terlibat dalam proses tersebut. Komponen penting lain dari penggunaan sistem informasi ini adalah transparansi. Seberapa jauh proses tersebut dapat dikelola oleh semua stakeholder, terutama masyarakat umum. Evaluasi juga dapat dimulai dari tahap perencanaan anggaran.

4.4.3. Rasionalisasi (Budaya Etis Organisasi) Berpengaruh Positif terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Pada hasil uji hipotesis ketiga (H3), variabel rasionalisasi dengan proksi budaya etis organisasi memiliki *t-statistic* sebesar 1,917 yang memiliki arti <1,96 (alpha 5%) dengan sampel awal sebesar 0,118 dan *p-value* sebesar 0,056. yang memiliki arti > 0,05. Dengan diperolehnya nilai tersebut, maka bisa dikatakan

bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran **didukung** atau terbukti didukung oleh data.

Menurut temuan ini, *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran sangat berbeda dengan *fraud* keuangan lainnya karena responden meyakini bahwa perilaku tersebut lebih terikat erat dan tidak dilakukan secara langsung atas inisiatif sendiri atau karena alasan-alasan yang secara alamiah terjadi (rasionalisasi). Seperti yang telah disebutkan pada hipotesis pertama, dalam hal ini, hal ini konsisten dengan harapan orang lain. Hasil penelitian sebelumnya, seperti tantangan keuangan dan kelemahan dalam struktur dan prosedur organisasi, terbukti dengan sendirinya, tidak seperti *fraud* keuangan sebelumnya.

Implikasi dari penelitian ini menyiratkan bahwa individu tidak dapat dihentikan dari melakukan *fraud* bahkan ketika budaya etis organisasi dirancang untuk membentuk perilaku etis. Tekanan dari kelompok luar tertentu menghancurkan budaya etis ini dengan sendirinya. Menurut Tuanakotta (2018), korupsi bukanlah masalah budaya. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh isu korupsi. Legislatif dan eksekutif juga harus mampu bertindak sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing, mengutamakan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan dan ego mereka sendiri. Selain itu, budaya etis organisasi yang sudah terbangun perlu dipupuk dan dilestarikan. Untuk membangun lingkungan di mana perilaku tidak etis dipermalukan dan *fraud* kecil kemungkinannya untuk terjadi, para pemimpin organisasi yang memiliki otoritas atas organisasi juga harus memberikan contoh bagi orang lain untuk diikuti dalam tindakan dan perilaku mereka

4.4.4. Perilaku tidak Etis Berpengaruh Positif terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Pada hipotesis keempat (H4), variabel arogansi dengan proksi perilaku tak etis memiliki *t-statistik* sebesar 0,498 atau <1,96 (alpha 5%) dengan sampel awal positif sebesar 0,018 dan *p-values* sebesar 0,619. atau > 0,05 maka bisa diungkapkan bahwa hipotesis keempat (H4)) Arogansi (perilaku tak etis) tak berpengaruh terhadap niat melakukan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan nilai tersebut, bisa dikatakan bahwa hipotesis keempat mengungkapkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran **tidak didukung** atau tidak terbukti.

Definisi perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang diterima. jika dihubungkan dengan *fraud pentagon theory*. Faktor pertama adalah tekanan, yang ditimbulkan oleh budaya organisasi organisasi, yang dapat dikatakan berdampak pada bagaimana manajer dan karyawan memandang perilaku tidak etis. Faktor kedua adalah kesempatan; jika tingkat perilaku tidak etis dalam organisasi tinggi, maka akan menciptakan peluang terjadinya *fraud* dalam organisasi, dan jika kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* sudah ada, maka kecurangan akan lebih mungkin terjadi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Zulkarnain (2012), yang menemukan efek menguntungkan dari perilaku tidak etis. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemungkinan pencegahan *fraud* di sektor publik meningkat dengan standar etika pegawai pemerintah. Budaya organisasi yang kuat juga memengaruhi perilaku etis seorang pegawai. Semua individu organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya organisasi. Anggota organisasi dapat didorong untuk melakukan atau berperilaku

sesuai dengan harapannya jika budayanya kuat. Menurut Permatasari dkk. (2017), perilaku *fraud* diuntungkan oleh perilaku tidak etis. Kemungkinan terjadinya *fraud* di kalangan pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diturunkan dengan perilaku tidak etis. Perbedaan hasil penelitian disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

4.4.5. Sikap (*Attitude Toward Behavior*) Berpengaruh Positif terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Menurut hasil pengujian variabel *competence* dengan proksi sikap mendapat nilai *t-statistik* 6,471 atau $> 1,96$ (Alpha 5%), dengan sampel awal positif 0,395 dan nilai *p* 0,000 atau $< 0,05$ bisa dikatakan bahwa Hipotesis Kelima (H5) *competence* (sikap) berpengaruh terhadap niat melakukan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, **didukung** atau terbukti didukung oleh data.

Orang yang terampil dalam proses ini sangat toleran terhadap *fraud*, berdasarkan penilaian dari responden. Hal ini sesuai dengan penelitian Othman dkk. (2015), yang menyatakan bahwa faktor organisasi dan individu merupakan penyebab utama terjadinya korupsi. Selain itu yang menyatakan bahwa sikap mengenai *fraud* dapat memengaruhi niat untuk melakukan kecurangan adalah Rabi (2011), Zulaikha dan Hadiprajitno (2016).

Implikasinya bahwa keputusan seorang pemimpin akan berdampak pada bagaimana bawahannya bertindak. Korupsi administratif pada tingkat yang lebih rendah akan diakibatkan oleh korupsi elit politik pada tingkat tertinggi. Efektivitas organisasi sebagian besar dipengaruhi oleh bagaimana sikap pemimpin berdampak pada respon bawahan terhadap tekanan dari elit-elit lain selama proses perencanaan dan penganggaran. Pemimpin harus mampu mengesampingkan ego

sektoral mereka dan menerima gagasan yang datang dari bawah. Untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang dapat menilai rencana dan anggaran yang telah dilaksanakan, transparansi dan akuntabilitas juga harus diperkuat.

4.4.6. Norma Subjektif (*Subjective Norms*) Berpengaruh Positif terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Hasil uji hipotesis dari norma subjektif mempunyai nilai *t-statistik* sebesar 3,345 atau >1,96 (5% alpha) dengan nilai sampel awal sebesar 0,220 dan *p-values* sebesar 0,001 atau <0,05. Menurut hasil tersebut, bisa dikemukakan bahwa hipotesis keenam (H6), pengaruh *competence* yang diprosikan oleh norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk berbuat *fraud*, **didukung** atau terbukti didukung oleh data.

Dalam *fraud diamond theory* Wolfe dan Hermanson (2004), norma subjektif yang terutama menyangkut bagaimana orang memandang nilai-nilai yang ada di dalamnya-merupakan proksi kedua yang berasal dari variabel kemampuan. Nilai-nilai yang ada di lingkungan organisasi yang ada telah mengembangkan nilai-nilai positif yang dapat menghalangi orang untuk melakukan tindakan *fraud*, hal ini dapat disimpulkan dari jawaban responden. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) yang menyatakan bahwa organisasi publik masih perlu membudayakan sejumlah nilai positif, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya tindakan *fraud*.

Temuan ini memiliki implikasi bahwa organisasi pemerintah harus lebih mampu mendukung nilai-nilai positif di tempat kerja dengan meningkatkan budaya organisasi dan meningkatkan pemahaman para pemimpin dan anggota tentang tujuan organisasi sehingga semua pemangku kepentingan dapat berbagi nilai-nilai yang diinginkan dan berkolaborasi, seperti halnya dalam lingkungan

keluarga. Pemimpin juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang keterbatasan mereka sendiri. Untuk mengurangi *fraud*, sudah sepantasnya organisasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang penting bagi keberhasilan, seperti perlunya keterbukaan dan kejujuran.

4.4.7. (Kontrol perilaku) (*Perceived Behavioral Control*) Berpengaruh Positif terhadap Niat Berbuat *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Menurut hasil pengolahan data, poin *t-statistik* kontrol perilaku sebagai proksi *competence* dalam niat melakukan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran mempunyai nilai *t-statistik* sebesar 4,019 atau $> 1,96$ (alpha 5%) dengan aslinya. Sampel. 0,267 dan *p-value* 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, bisa dikemukakan bahwa hipotesis ketujuh (H7) Kontrol Perilaku berpengaruh positif kepada niat melakukan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, yang **didukung** atau terbukti didukung oleh data.

Tidak adanya kontrol perilaku yang mengarah pada tujuan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran, apalagi jika didukung oleh kapasitasnya dalam mengelola bisnis dan posisi strategis yang dimilikinya, merupakan kontrol perilaku yang sedang dibahas oleh variabel proksi ini. Hal ini semakin menunjukkan keinginan pelaku untuk melakukan kecurangan perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan jawaban responden, mereka yang melakukan tindakan *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah mereka yang kurang mampu mengendalikan perilaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Untuk mencapai hal ini, mereka bekerja sama dengan legislatif dan eksekutif untuk memasukkan anggaran yang sebelumnya tidak direncanakan atau diprioritaskan,

serta memanfaatkan transparansi dokumen perencanaan. Perencanaan dan penganggaran yang curang sangat dipengaruhi oleh cacat perilaku atau kurangnya pengendalian diri ini. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen (1991) dan temuan penelitian (Schuchter dan Levi, 2015 ; Othman dkk., 2015 ; Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016).

Implikasinya bahwa individu yang kesulitan mengendalikan perilaku merupakan ancaman bagi efektivitas struktur organisasi. Meskipun lebih mudah untuk melakukan *fraud*, akan lebih mudah budaya atau struktur organisasi yang mapan lebih mudah untuk diabaikan, terutama bagi bawahan. Mereka harus memiliki lokus kendali dan rasa efikasi diri yang kuat dalam peran mereka sebagai pejabat publik, terutama di tingkat senior. Mereka tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi juga sadar sosial dalam cara mereka mengelola kehidupan mereka. Menurut Bandura (1986), mereka yang memiliki derajat self-efficacy yang tinggi memiliki teknik pemecahan masalah yang lebih kuat, berkomitmen tinggi, tekun, dan efisien dalam menemukan jawaban atas masalah. Mereka juga cenderung menunda kesenangan.

4.4.8. Niat Berpengaruh Positif terhadap *Fraud* dalam Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan Aizen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat memberi pengaruh perilaku melalui tiga unsur yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Pada penelitian pengujian hipotesis ini diperoleh *t-statistic* dari niat sebesar 13.877 atau $> 1,96$ (5% alpha) dengan sampel awal 0,701 dan *p-values* 0,00 atau $< 0,05$. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan (H8) Niat berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan penganggaran **didukung** dan

terbukti didukung oleh data.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana responden mendefinisikan niat untuk melakukan *fraud* sebagai motivasi pelaku untuk melakukan *fraud* demi keuntungan diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu, yang diikuti dengan proses yang terencana dan melibatkan banyak pihak. Bertindak sesuai dengan rencana mereka, para partisipan dalam teknik ini ternyata menyembunyikan perilaku *fraud* tersebut. Untuk menjalankan niatnya, para pelaku benar-benar menyadari semua kompleksitas organisasi serta kelemahannya. Cohen et al. (2010) menyatakan bahwa kesempatan, komplotan, keserakahan, dan kurangnya integritas, semuanya berjalan seiring dengan tujuan untuk melakukan tindakan *fraud*.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu melihat kepada organisasi itu sendiri untuk memperbaiki sistem ketika mereka sudah bertekad untuk berbuat *fraud* selama proses perencanaan dan penganggaran. Mengembalikan saran publik ke dalam perencanaan dan penganggaran, meningkatkan penggunaan sistem informasi, dan meminta bantuan inspektorat dan auditor BPKP adalah cara-cara untuk memperbaiki sistem pengawasan. Karena tekanan eksternal yaitu tekanan dari pimpinan merupakan salah satu unsur yang memotivasi terjadinya perilaku *fraud*, maka pimpinan organisasi juga harus memiliki konsep moralitas yang dijelaskan oleh Brown dkk. (2005), yaitu individu dan manajer yang bermoral. Sedangkan kesucian, keadilan, dan kejujuran merupakan kualitas yang melekat pada pribadi yang bermoral. Manajer yang bermoral, di sisi lain, menetapkan norma-norma etika dan mencontohkan perilaku etis lebih sebagai bentuk komunikasi. Dengan dua gagasan ini, para pemimpin akan

berperilaku lebih bermoral, dan pengikutnya akan cenderung melakukan hal yang sama. Jika dilakukan secara teratur, maka akan menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan melindungi semua anggota organisasi dari penipuan (Wicaksono dan Urumsah, 2017; Mayer dan Kuenzi, 2011).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Fraud Pentagon Theory* digabungkan untuk menguji aspek psikologis pelaku *fraud* yang berkompeten untuk melakukan tindakan *fraud* yang diawali dengan niat. Pegawai bagian perencanaan dan pengelolaan anggaran yang terlibat langsung dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran dan yang tanggung jawab utamanya dalam unit kerja adalah melaksanakan kegiatan perencanaan menjadi responden penelitian. Berdasarkan pengujian-pengujian yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Tekanan eksternal terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.
2. Kelemahan sistem informasi tidak terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.
3. Budaya etis organisasi terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.
4. Arogansi (perilaku tidak etis) tidak terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.
5. Sikap terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.
6. Norma Subyektif terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.
7. Kontrol Perilaku terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.
8. Niat terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran.

5.2 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini berkontribusi pada :

1. Dengan menambah literatur penelitian mengenai *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran, para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ini dapat memberikan kontribusi sumber referensi baru.
2. *Fraud Pentagon Theory* dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) digabungkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menyelidiki lebih lanjut karakteristik psikologis pelaku *fraud*, maka kombinasi variabel ini dapat menjadi masukan untuk model penelitian yang akan datang

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian maka dapat disajikan implikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan penelitian variabel tekanan eksternal terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu pada saat program-program prioritas yang seharusnya dialokasikan harus dilaksanakan. Pihak eksekutif dan legislatif harus bekerja sama dengan semua pihak dan berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan tetap mengikuti rencana yang telah disahkan.
2. Berdasarkan temuan dari penelitian ini variabel Kelemahan sistem informasi tidak terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. . Oleh sebab itu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di kementerian dan departemen berada di bawah tanggung jawab semua departemen yang terlibat dalam proses tersebut. Komponen penting lain

dari penggunaan sistem informasi ini adalah transparansi. Seberapa jauh proses tersebut dapat dikelola oleh semua stakeholder, terutama masyarakat umum. Evaluasi juga dapat dimulai dari tahap perencanaan anggaran.

3. Budaya etis organisasi terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Budaya etis organisasi yang sudah terbangun perlu dipupuk dan dilestarikan. Untuk membangun lingkungan di mana perilaku tidak etis dipermalukan dan *fraud* kecil kemungkinannya untuk terjadi, para pemimpin organisasi yang memiliki wewenang atas organisasi juga harus memberikan contoh bagi orang lain untuk diikuti dalam tindakan dan perilaku mereka.
4. Arogansi (perilaku tidak etis) tidak terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemungkinan pencegahan *fraud* di sektor publik meningkat dengan standar etika pegawai pemerintah. Budaya organisasi yang kuat juga memengaruhi perilaku etis seorang pegawai. Semua individu organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya organisasi. Anggota organisasi dapat didorong untuk melakukan atau berperilaku sesuai dengan harapannya jika budayanya kuat.
5. Sikap terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pemimpin harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi mereka dan menerima gagasan yang datang dari bawah. Untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang dapat menilai rencana dan anggaran yang telah dilaksanakan, transparansi dan

akuntabilitas juga harus diperkuat.

6. Norma Subyektif terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Temuan ini memiliki implikasi bahwa organisasi pemerintah harus lebih mampu mendukung nilai-nilai positif di tempat kerja dengan meningkatkan budaya organisasi dan meningkatkan pemahaman para pemimpin dan anggota tentang tujuan organisasi sehingga semua pemangku kepentingan dapat berbagi nilai-nilai yang diinginkan dan berkolaborasi, seperti halnya dalam lingkungan keluarga. Untuk mengurangi *fraud*, sudah sepantasnya organisasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang penting bagi keberhasilan, seperti perlunya keterbukaan dan kejujuran.
7. Kontrol Perilaku terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pegawai di sektor pemerintah harus memiliki lokus kendali dan rasa efikasi diri yang kuat dalam peran mereka sebagai pejabat publik, terutama di tingkat senior. Mereka tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi juga sadar sosial dalam cara mereka mengelola kehidupan mereka.
8. Niat terbukti mempengaruhi *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pegawai di sektor pemerintahan harus memiliki kualitas yang melekat pada pribadi yang bermoral. Pimpinan yang bermoral, di sisi lain, menetapkan norma-norma etika dan mencontohkan perilaku etis lebih sebagai bentuk komunikasi. Dengan dua gagasan ini, para pemimpin akan berperilaku lebih bermoral, dan pengikutnya akan cenderung melakukan hal yang sama.

5.4 Keterbatasan Penelitian

1. Data yang dikumpulkan secara internal dari jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner penelitian. Ada bukti bahwa responden mungkin tidak memberikan jawaban yang akurat menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, yang akan berdampak pada temuan penelitian.
2. Mengingat masih sedikit penelitian tentang *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran menuntut adanya eksplorasi lebih lanjut tentang subjek ini. Sangat penting untuk mengevaluasi kembali variabel-variabel dalam penelitian ini yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak berpengaruh terhadap *fraud*, terutama perilaku tidak etis yang menunjukkan arogansi dan rasionalisasi dan norma subjektif yang berfungsi sebagai indikator kompetensi. Perlu diingat bahwa karakteristik-karakteristik ini tidak konsisten dengan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya tentang *fraud*.

5.5 Saran Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan hasil berupa beberapa saran yang bisa diberikan kepada lingkungan akademis dan lingkungan kerja khususnya di sektor pemerintah :

1. Bagi lingkungan akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah menambah literatur penelitian mengenai *fraud* dalam proses perencanaan dan penganggaran. Untuk penelitian di masa yang akan datang sebaiknya variabel yang tidak berpengaruh terhadap *fraud* dalam perencanaan dan penganggaran perlu diuji kembali yakni kelemahan sistem informasi dan arogansi (perilaku tidak etis). Sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih objektif dan lebih bervariasi

2. Karena mekanisme perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang melibatkan banyak orang, proses ini tidak luput dari politik dan kepentingan. Diperlukan aparat pemerintah yang berintegritas dan memiliki komitmen terhadap birokrasi yang bersih dan regulasi yang tegas. Selain itu pihak legislatif juga selayaknya harus benar benar memahami batas kewenangannya dalam proses penganggaran dan lebih menyadari bahwa keberadaannya mewakili kepentingan rakyat bukan mewakili golongan tertentu. Sistem partisipatif murni melibatkan masyarakat juga harus dikembalikan pada porsi yang sebenarnya. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mencegah *fraud* dalam proses ini.
3. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang digunakan saat ini dianggap sudah baik tetapi diperlukan pengembangan sistem secara terus menerus sehingga semakin kecil celah terjadinya *fraud*. Yang tidak kalah penting adalah fungsi transparansi dalam sistem ini sehingga masyarakat dapat bebas mengakses dan melakukan pengawasan terhadap aspirasi yang telah disampaikan dalam proses awal perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor Faktor Yang Memengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
- Adelina, dan Nadia. (2018). Analisis *Fraud* Diamond Dalam Mendeteksi Potensi Financial Statement *Fraud* Pada Perusahaan LQ-45 Periode 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7(1), 446-460.
- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh *Fraud* Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44-62.
- AICPA, SAS No.99. (2010). *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. New York: AICPA
- Ajzen, Icek. (1988). *Attitudes, personality, and behavior*. Milton Keynes: Open University Press dan Chicago, IL: Dorsey Press.
- Akbar, T. (2017). The Determination Of Fraudulent Financial Reporting Causes By Albrecht, W. S., & Albrecht, C. C. (2009). *3rd Edition* (3rd ed.).
- Albrecht, W. S., Albrecht, C.O., Albrecht, Conan C., Zimbelman, Mark F., (2012), *Fraud Examination*, USA: South-Western and Environmental Element. ACFE
- Amri, A.B., D. P. 2012. (2012). Pengusaha was-was garap proyek pemerintah. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read%0A/336748>
- Annisya, Mafiana. Lindrianasari, dan Asmaranti, Yuztitya. 2016. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan *Fraud* Diamond. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 23, No. 1. ISSN: 1412-3126
- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan* (B. Fatmawati (ed.)). PT Bumi Aksara.
- Aristiowati, I. (2015). Evaluasi Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
- Aryaksa, T. A., dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal AAJ* 3(4), 1-10
- Avianto, H., Alim, M. N., dan Tarjo. (2018). *The Effect Of Monopoly Power And Integrity On The Tendency To Commit Fraud In E-Procurement*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(1). 1-10
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BBC (2020). "Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?" (bbc.com, December 6, 2020)
- Corsini, Ray. (2002). *The Dictionary of Psychology*. London: Brunner/Routledge.

- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2013). *Business Research Methods* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Cressey, D. R. 1953. *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. New York, US: Free Press.
- Crowe, Howart, (2012), *The Mind Behind The Fraudsters Crime : Key Behavioral*
- Didi, D., dan Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1-20.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2014). Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia. Jakarta: DJA Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2014). Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia. Jakarta: DJA Kementerian Keuangan.
- Farmashinta, P., & Yudowati, S. P. (2019). Pengaruh *Fraud* Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017). *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 349–363.
- Fishbein, Martin., Ajzen, Icek. (1975). *Belief, Attitude, Intention And Behavior : An Introduction to Theory and Reaserch*. Canada : Addison-Wesley Series In Social Psychology. ISBN 0- 201-02089-0.
- Gallego, V., Nishiura, H., Sah, R., & Rodriguez-Morales, A. J. (2020). The COVID-19 outbreak and implications for the Tokyo 2020 Summer Olympic Games. In *Travel*
- Gorbiano, M. I. (2020, April). Up to 9 million people to fall into poverty, unemployment as COVID-19 hits: Sri Mulyani This article was published in thejakartapost.com with the title "Up to 9 million people to fall into poverty, unemployment as COVID-19 hits: Sri Mulyani". Click to rea. *The Jakarta Post*.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Hampshire: Cengage Learning.
- Handoko, B. L., Lindawati, A. S. L., & Vienna, M. (2020). *Fraud* Pentagon Model for Detecting Fraudulent Financial Reporting in Banking Sector. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(6), 2832–2838.
- Handoko, Bambang L., Lindawati, Ang S.L., Vienna, M., (2020), *Fraud* Pentagon Model for Detecting Fraudulent Financial Reporting in Banking Sector, *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, Volume-8 Issue-6,
- Harahap, M.F.(2020). Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19(ombudsman.go.id, June 16, 2020) inhttps://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dan-korupsi-bansos-covid-19(Accessed:Januari 11, 2022).
- Hasan, M., dkk.(2020). Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19 (antikorupsi.org, April,2020) [https://antikorupsi.org/sites/default/files/korupsi dan masalah penanga](https://antikorupsi.org/sites/default/files/korupsi%20dan%20masalah%20penanga)

nan_covid-<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>(Accessed: Januari 10, 2022).

Horwath, C., (2011). *Why the Fraud Triangle is No Longer Enough*. CroweHorwath LPP

Indriani, N., Alim, M. N., dan Haryadi, B. (2019a). Potret *Fraud* pada Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, 22(1), 115-122.

International Journal of Business, Economics and Law, 14(5), 106-113.

Karyono. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: ANDI, 2013.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Keuangan 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017a, *Peraturan Menteri Keuangan 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017b, *Peraturan Menteri Keuangan 21/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Medicine and Infectious Disease. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101604>

Mucha, M.J., 2011, Effective use of performance budgeting, *Government Finance Review* 27(4), 61-63.

Nay, O. (2011). *What Drives Reforms In International Organizations? External Pressure and Bureaucratic Entrepreneurs In The UN Response To AIDS*. *Governance*, 24(4), 689-712.

Novita, U., (2015). The Effect of Experience, Workload, and Training on Skepticism and the Auditor's Ability to Detect Fraud (Empirical Study at the Auditor in the Representative Office of Riau Province BPKP). *JOM Fekon*. Vol.2. No. 1.

Permana, B. A., Perdana, H. D., dan Kurniasih, L. (2017). *Determinant of Fraud in Government Agency: Empirical Study At the Finance and Development Supervisory Agency (Bpkp) of Jakarta Representative Office*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(1), 93.

- Priantara, Diaz. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Ramadhan, D. (2020). Root Cause Analysis Using Fraud Pentagon Theory Approach (A Conceptual Framework). *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(1), 118–125. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.142>
- Razak, A., Ludigdo, U., Sukoharsono, E. G., dan Thoyib, A. (2011). Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik. *Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia, 2004a, *Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004b, *Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004c, *Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan*
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Ridha, M. A. dan Basuki, H. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 87- 100.
- Robbins, S.P., dan Judge, T. (2013), *Organizational Behavior*, Fifteenth Edition, Prentice Hall
- Robinson, M., & Last, M.D., 2009, *A basic model of performance-based budgeting*. International Monetary Fund, Washington D.C.
- Sawaka K, I. G. N. H., & Ramantha, I. W., 2020, Fraud pentagon theory in detecting financial perception of financial reporting with good corporate governance as moderator variable. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(1), 84-94.
- Setiawan, A. R., Irianto, G., Achsin, M., Madura, U. T., dan Brawijaya, U. (2013).
- Shah, A., & Shen, C., 2007, *A primer on performance budgeting*. Budgeting and budgetary institutions, World Bank, Washington D.C.
- Sholihah, S., Alim, M. N., dan Musyarofah, S. (2016). Memotret Pola *Fraud* Pada Rincian Objek Belanja yang Menjadi Temuan BPK. *JAFFA*, 53(9), 1689– 1699.
- Simangunsong, F. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa: Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Internal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sumendap, P., Hidayat, W., Prabowo, A., Hartono
- Skousen, C. J., Smith, K. R., dan Wright, C. J. (2009). *Detecting and Predicting*

Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99 in Corporate Governance and Firm Performance. In International Journal of Quality and Reliability Management (Vol. 32, Issue 3).

Sukirman dan Sari, Maylia Pramono. 2013. Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangel (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 09, No. 02.

Syahria Rizqa, F. K. dan A. D. E. (2019). *Detecting Financial Statement Fraud Using Fraud Diamond (A Study on Banking Companies Listed On the Indonesia Stock Exchange Period 2012-2016)*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(2). *System-Driven (un) Fraud, Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 85-100.

Tuanakota, T. M.,(2012), *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ulfah, M., & Nuraina, E. (2017). *Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris pada Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI)*. 5(1), 399–418.

Usuli, I., dan Urumsah, D., (2020) *Persepsi Auditor Internal Pemerintah Tentang Indikasi Fraud Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran (Suatu Kerangka Konseptual Penelitian)*

Utama, I. G. P. O. S., Ramantha, I. W., & Badera, I. D. (2018). Analisis Faktor Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Sebagai Prediktor Fraudulent Financial Reporting. *E-Jurnal*, 1, 251–278.

Wolfe, D. T. dan Hermanson, D. R. (2014). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, p. 38-42.

Yesiariani, M., dan Rahayu, I. (2017). Deteksi Financial Statement *Fraud*, Pengujian Dengan *Fraud Diamond*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*21(1).

Yuhertiana, I., Pranoto, S., dan Priono, H. (2015). Perilaku Disfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(1), 25–38.

Yuliana. (2004). Pengaruh Sikap pada Pindah Kerja, Norma Subjektif, Perceived Behavioral Control pada Intensi Pindah Kerja pada Pekerja Teknologi Informasi. *Phronesis: Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 6, 1-18.

Zulaikha, Z., dan Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement *Fraud*: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 194–220.

Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum wr. wb. Bapak/Ibu
yang saya hormati

Perkenalkan saya Rasyid Ari Nugroho, Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Program Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Forensik di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian tentang ***Kajian Perilaku Fraud dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran***. Untuk kepentingan penelitian ini, saya sangat menghargai dan berterima kasih, jika Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan memberikan jawaban yang paling mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami Bapak/ibu. Kuesioner ini tanpa identitas, semua pernyataan yang diberikan hanya akan digunakan untuk penelitian akademik dan aksesnya terbatas hanya bagi peneliti.

Kuesioner ini ditujukan untuk Bapak/Ibu yang saat ini bertugas atau pernah menempati posisi sebagai:

1. Bagian perencanaan Kementerian dan Lembaga di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagian Pengelola Anggaran di Kementerian dan Lembaga di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut link kuesioner online.

https://docs.google.com/forms/d/1Ivu4JsEiDoybDsVjcLRJxAqjID0AghEaXKbpSL4e_vTI/edit

Atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di:

WA: 085647205551. Email: rasvid1892@rocket.mail.com

KUESIONER

Petunjuk Pengisian Kuesioner

BAGIAN A.

Pada bagian A, mohon Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia (□).

Nama	:		
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki - Laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
Usia	:	<input type="checkbox"/> 21 - 30 tahun	<input type="checkbox"/> 41 - 50 tahun
		<input type="checkbox"/> 31 - 40 Tahun	<input type="checkbox"/> 51 - 60 tahun
Pendidikan	:	<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> S2
		<input type="checkbox"/> S1	<input type="checkbox"/> S3
Posisi Pada Bagian	:	<input type="checkbox"/> Perencanaan	<input type="checkbox"/> Pengelola Anggaran
Wilayah Kerja	:	<input type="checkbox"/> Pusat	<input type="checkbox"/> Daerah

BAGIAN B.

Pernyataan berikut merupakan gambaran persepsi Bapak/Ibu sebagai perencana dan atau auditor internal terhadap perencanaan dan penganggaran. Mohon dijawab dengan memberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia (□) sesuai dengan angka yang Bapak/Ibu pilih. Angka tersebut menunjukkan seberapa jauh Bapak/Ibusetuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan.

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Agak Tidak Setuju

4 = Agak Setuju

5 = Setuju

6 = Sangat Setuju

Menurut Bapak/Ibu, seberapa jauh Bapak/Ibu setuju bahwa pernyataan-pernyataan berikut merupakan penyebab terjadinya *fraud* (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran !

1	2	3	4	5	6
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju	Setuju	Sangat Setuju

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
TEKANAN/ <i>PRESURE EKSTERNAL</i>						
1. Menurut Bapak/Ibu adanya pembatasan jumlah anggaran untuk masing-masing organisasi membuat organisasi tidak konsisten dengan perencanaan yang sudah dibuat						
2. Ada kecenderungan pimpinan memberikan arahan untuk mengganggu kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan						
3. Ada kecenderungan pihak pemerintah pusat untuk memasukkan anggaran tertentu yang tidak ada perencanaannya						
4. Adanya kebutuhan organisasi yang tidak bisa dianggarkan menyebabkan organisasi menyalahi dengan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam anggaran lain dengan jumlah yang lebih besar						

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
KESEMPATAN / KELEMAHAN SISTEM INFORMASI						
1. Sistem informasi yang digunakan masih terbatas untuk satu mekanisme saja yakni sistem informasi perencanaan di bagian perencanaan dan sistem informasi penganggaran di bagian keuangan						
2. Berbagai kendala teknis menyebabkan belum sinkronnya perencanaan dan penganggaran						
3. Terbatasnya akses ke masing-masing sistem informasi menyebabkan evaluasi hasil perencanaan ke penganggaran sulit dilakukan						
4. Tidak sinkronnya sistem perencanaan dan penganggaran menjadi celah terjadinya						

<i>fraud</i> (kecurangan)						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
RASIONALISASI/BUDAYA ETIS ORGANISASI						
1. Arahan pimpinan dalam organisasi menjadi acuan dalam melaksanakan aktivitas organisasi						
2. Dalam organisasi terdapat kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam organisasi tersebut						
3. Seminar dan pelatihan etis mengenai standar tuntutan organisasi, yang menjelaskan praktik yang tidak diperbolehkan sering dilaksanakan tetapi hal ini sulit diimplementasikan dalam organisasi						
4. Ada indikasi tidak semua perilaku tidak etis dalam organisasi pemerintah diberi sanksi						
5. lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor tidak sampai ke masalah etis dalam organisasi terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran						

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
AROGANSI /PERILAKU TIDAK ETIS						
1. Dalam organisasi terdapat kode etik yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh pimpinan dalam organisasi tersebut						
2. Ada indikasi bahwa pimpinan organisasi memanfaatkan karyawannya untuk melakukan kegiatan individu yang tidak ada kaitannya dengan tupoksi organisasi						
3. Arahan Pimpinan dalam organisasi meminta untuk mengubah perencanaan awal sesuai dengan kehendak pribadi						
4. Ada indikasi terjadi <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran tetapi pimpinan organisasi membiarkan saja dan memerintah untuk proses terus berlanjut						

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
COMPETENCE /SIKAP TERHADAP PERILAKU FRAUD						
1. Individu yang memiliki <i>competence</i> (kemampuan) seringkali berasumsi bahwa <i>fraud</i> (kecurangan) yang diperbuatnya minim risiko						
2. Ada persepsi bahwa menyasati perencanaan dan penganggaran adalah hal yang lumrah terjadi dalam organisasi						
3. Perilaku menaikkan rincian belanja dari kebutuhan sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran						
4. Sikap percaya diri dengan kemampuan dan posisi strategisnya dalam organisasi sering menjadi pembenaran, bahwa <i>fraud</i> (kecurangan) yang dilakukan tidak akan terdeteksi						

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
COMPETENCE/ NORMA SUBJEKTIF						
1. Ada persepsi bahwa <i>fraud</i> (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat ditolerir dalam organisasi						
2. Ada persepsi bahwa adalah hal yang wajar/biasa terjadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang memberikan gratifikasi untuk memuluskan kepentingannya dalam proses anggaran						
3. Sedikit melanggar aturan dan menyimpang dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang dapat diterima						
4. Ada indikasi pihak legislatif mengarahkan panitia anggaran memasukkan program yang tidak ada dalam perencanaan sebelumnya dan hal tersebut sepengetahuan/seijin atasan						
5. Ada persepsi bahwa untuk memuluskan suatu tujuan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi diperlukan pengorbanan finansial terlebih dahulu						

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
COMPETENCE / KONTROL PERILAKU						
1. Karena perilaku ingin menguasai, orang-orang tertentu yang memiliki <i>competence</i> (kemampuan) berbuat <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran						
2. Ada indikasi orang-orang yang memiliki <i>competence</i> (kemampuan) dalam organisasi, cenderung berusaha mencapai tujuan dengan cara-cara tertentu walaupun hal tersebut tidak dibenarkan						
3. Kesempatan berada dalam posisi strategis dalam organisasi dipergunakan oleh individu dengan <i>competence</i> (kemampuan) untuk melakukan <i>fraud</i> (kecurangan) pada proses perencanaan dan penganggaran						
4. Transparansi dokumen perencanaan seringkali dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan <i>fraud</i> (kecurangan) dalam proses tersebut						
5. Ada indikasi terjadi kerja sama antara badan anggaran legislatif dengan panitia anggaran di pihak eksekutif dalam memasukkan program-program tertentu yang tidak direncanakan sebelumnya dan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi						

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
NIAT BERBUAT FRAUD						
1. Ada indikasi bahwa perilaku <i>fraud</i> (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan niat untuk memuluskan kepentingan diri sendiri atau orang lain						
2. Untuk melakukan <i>fraud</i> dalam perencanaan dan penganggaran pelaku sudah merencanakannya dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses ini.						
3. Ada indikasi bahwa para pelaku <i>fraud</i> dalam proses perencanaan dan penganggaran melaksanakan niatnya dengan menutupi kecurangan secara formal sesuai peraturan yang kadang substansinya berbeda						

4. Pelaku benar benar memahami celah dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga untuk merealisasikan niatnya, pelaku dapat dengan mudah menjalankan aksinya.						
--	--	--	--	--	--	--

PERNYATAAN	JAWABAN					
	1	2	3	4	5	6
FRAUD/KECURANGAN						
1. Tindakan kecurangan yang Bapak/Ibu ketahui dilakukan oleh orang dalam organisasi dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain						
2. Bapak/Ibu mengetahui <i>fraud</i> (kecurangan) dalam proses perencanaan dan penganggaran juga dilakukan oleh pihak legislatif atau pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain						
3. Ada pihak-pihak tertentu memberikan gratifikasi kepada panitia atau badan anggaran untuk meloloskan kepentingannya						
4. Beberapa program/kegiatan yang dianggarkan tidak melalui mekanisme perencanaan						
5. Anggaran selalu didesain defisit dan penerimaan dihitung rendah sehingga berpotensi inefisiensi dan korupsi						
6. Ada kecenderungan dokumen Renstra satuan kerja tidak dijadikan acuan dalam menyusun RKP/Renstra satuan kerja dan hal ini dilakukan untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu						
7. Tidak adanya transparansi dalam penyusunan anggaran menyebabkan sulitnya melakukan kontrol terhadap anggaran berdasarkan perencanaan yang ada						
8. Tahap penganggaran merupakan tahapan yang paling rawan terjadi <i>fraud</i> (kecurangan). Dalam tahapan ini muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan untuk memuluskan kepentingannya.						

Lampiran 2 : Tabulasi Data

T E . 1	T E . 2	T E . 3	T E . 4	K E . 1	K E . 2	K E . 3	K E . 4	R A . 1	R A . 2	R A . 3	R A . 4	R A . 5	A R . 1	A R . 2	A R . 3	A R . 4	S K . 1	S K . 2	S K . 3	S K . 4	N S . 1	N S . 2	N S . 3	N S . 4	N S . 5	K P . 1	K P . 2	K P . 3	K P . 4	K P . 5	N R . 1	N R . 2	N R . 3	N R . 4	F R . 1	F R . 2	F R . 3	F R . 4	F R . 5	F R . 6	F R . 7	F R . 8							
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5				
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4				
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5			
5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	3	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	4	4	5		
4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	5	5	5				
2	4	4	2	4	5	4	5	5	4	3	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
4	5	4	4	5	3	4	5	4	4	4	3	4	2	3	4	5	4	3	4	5	4	4	5	5	4	5	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3			
5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5		
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	5	5	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	3	3	3	4	4	3	5	3	3	3	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	3	3	3	3	
5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	5	3	1	2	3	2	3	5	3	2	3	4	5	5	5	5	3	4	3	5	5	5	3	3	4	2	3	2	3	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	
4	4	5	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	5	5	4	3	4	4	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	3	4	2	4	4	4	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3
3	3	3	4	2	3	4	2	2	3	4	4	3	2	2	1	4	2	2	4	4	4	2	2	3	2	2	3	4	2	2	3	3	4	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	4	2	2	2	2	

4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	3	6	4	5	5	5	3	4	4	4	4					
5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	5	4	4	4	4	4	4					
5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4				
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4				
5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	5	5	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	3			
3	4	4	2	4	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	3	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4				
5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5			
3	4	4	2	4	5	5	5	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4			
4	5	5	4	3	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	3	3	5	5	4	4	5	4	5	4	5	3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3		
5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	3	3	3	5	5	4	3	3	3	4	5	5	4		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	
4	5	4	3	3	2	5	5	5	3	3	3	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	
4	4	3	3	5	4	2	5	5	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	3	5	4	5	4	4	3	5	4	4	3	5	4	2	5	5	5	3	3	3	5	5	5	3	3	3	4	4
5	5	5	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	3	4	3	5	4	5	5	5	2	2	1	3	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	3	4	5	4	5	5	5	4	4	6	5	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	3	
4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3		
4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	3	3	5	5	3	5	5	3	

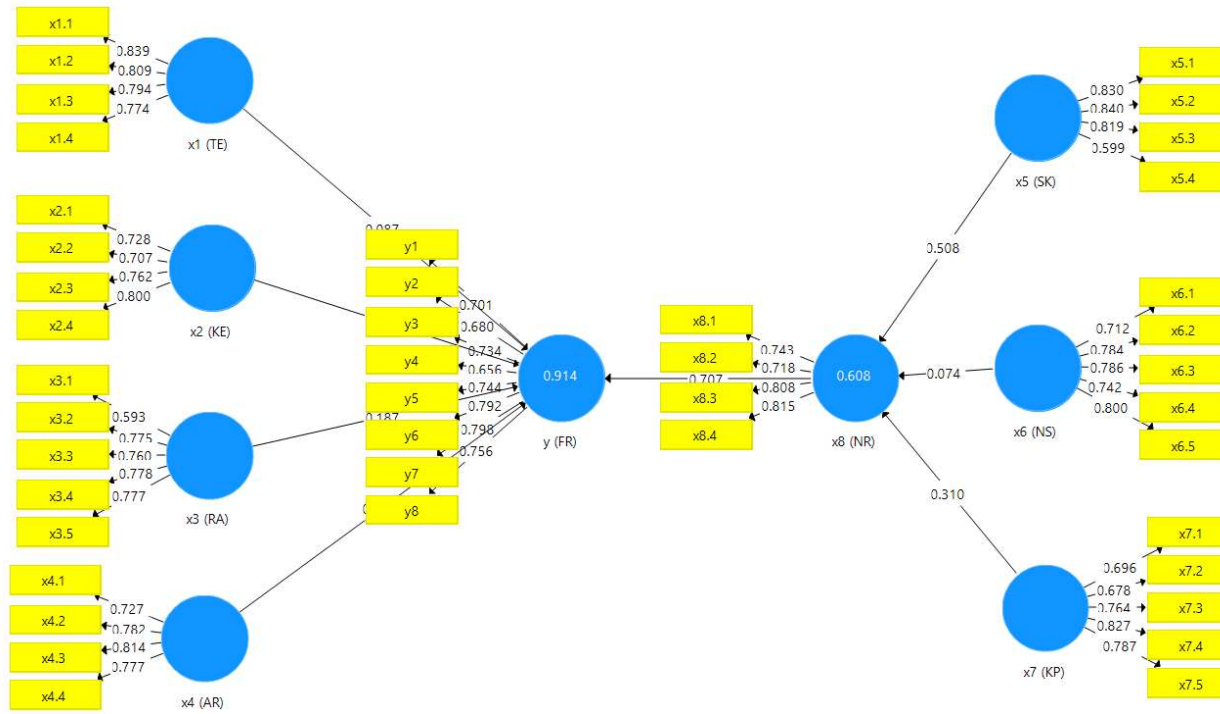
4	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5			
5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5		
4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3		
5	4	4	5	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	5	3	4	4	5	4	5		
3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3		
3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4			
3	3	4	4	5	3	4	5	5	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	5	5	3	4	5	5	5	3	4	3	4	4	5	3	4	3	3	3			
3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3		
4	5	5	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	3	4			
4	3	4	2	2	2	2	3	4	3	2	1	2	3	5	5	5	3	1	4	5	3	4	4	3	4	2	2	2	3	4	4	1	3	4	4	4	4	1	3	4	3	1			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	3	5	4	5	5			
4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	3	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4		
4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	3	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	3	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5		
5	4	4	3	5	5	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4	4	3	3	4	5	4	4	4	2	3	3	3	5	4	5	5	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	3	2	2	2	3	4	2	5	4	2	5	5	5	4	4	4	4	5	2	3	5	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4		
4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	5	3	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	3	3	2	5	4	5	5	3	3	5	4	5	4	4	3	3	4	3	4	3	5	2	3	3	2	5	4	4	5	4	3	4	3	4	5	4	3	4	3	4	3	
4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	

5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	3	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	3	4	5	4	3	
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	
4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4	3	5	5	4	3	4	3	4	4	4	
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	3	5	4	4	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	3	5	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	
5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

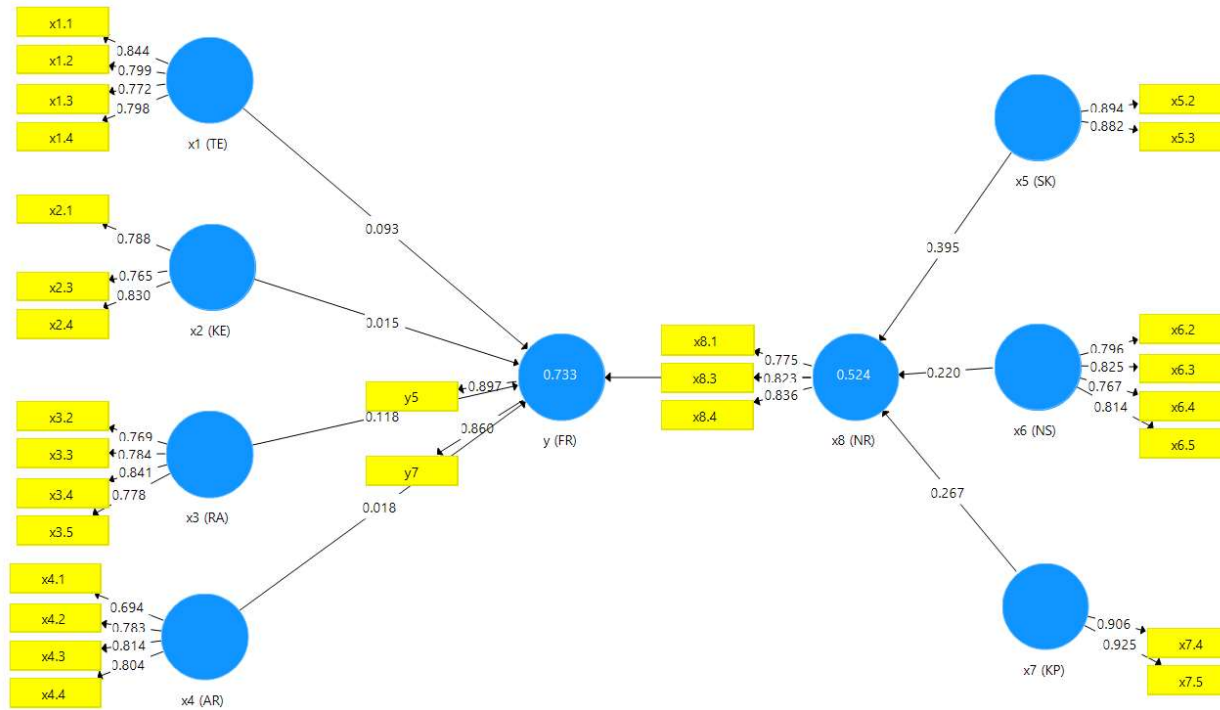


جامعة اندونيسيا
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Lampiran 3 : Diagram Model (PLS Algorithm) – Awal

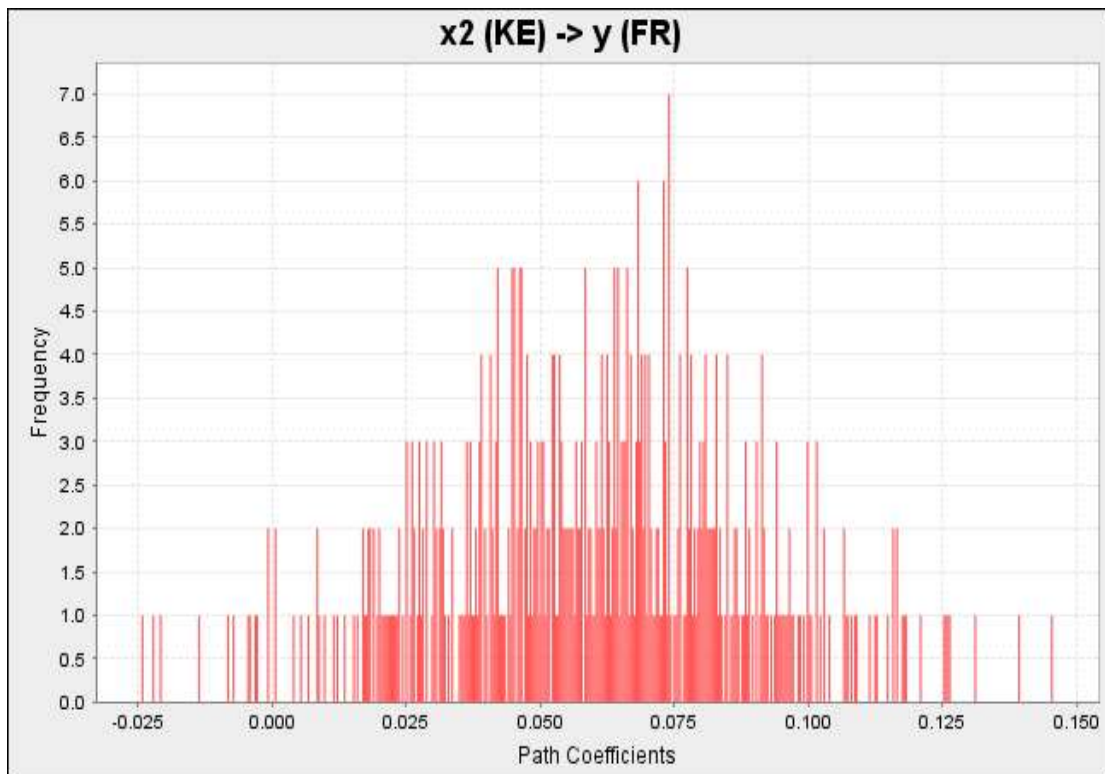
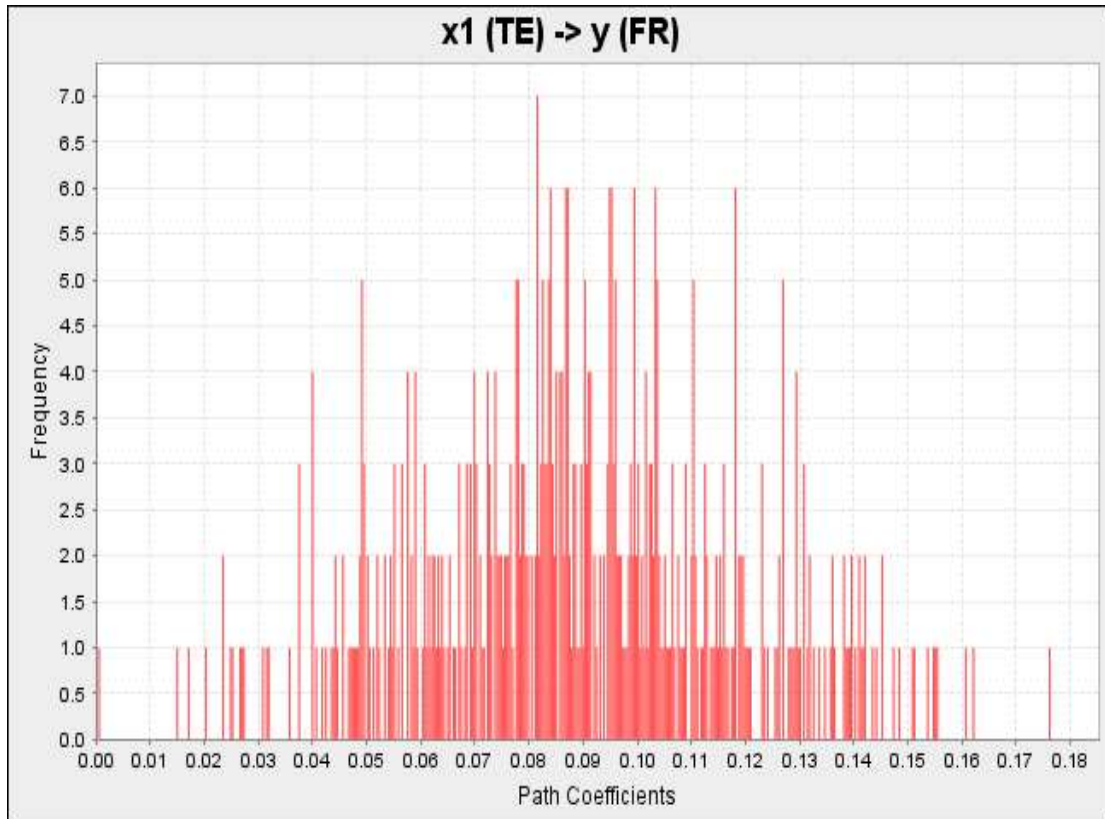


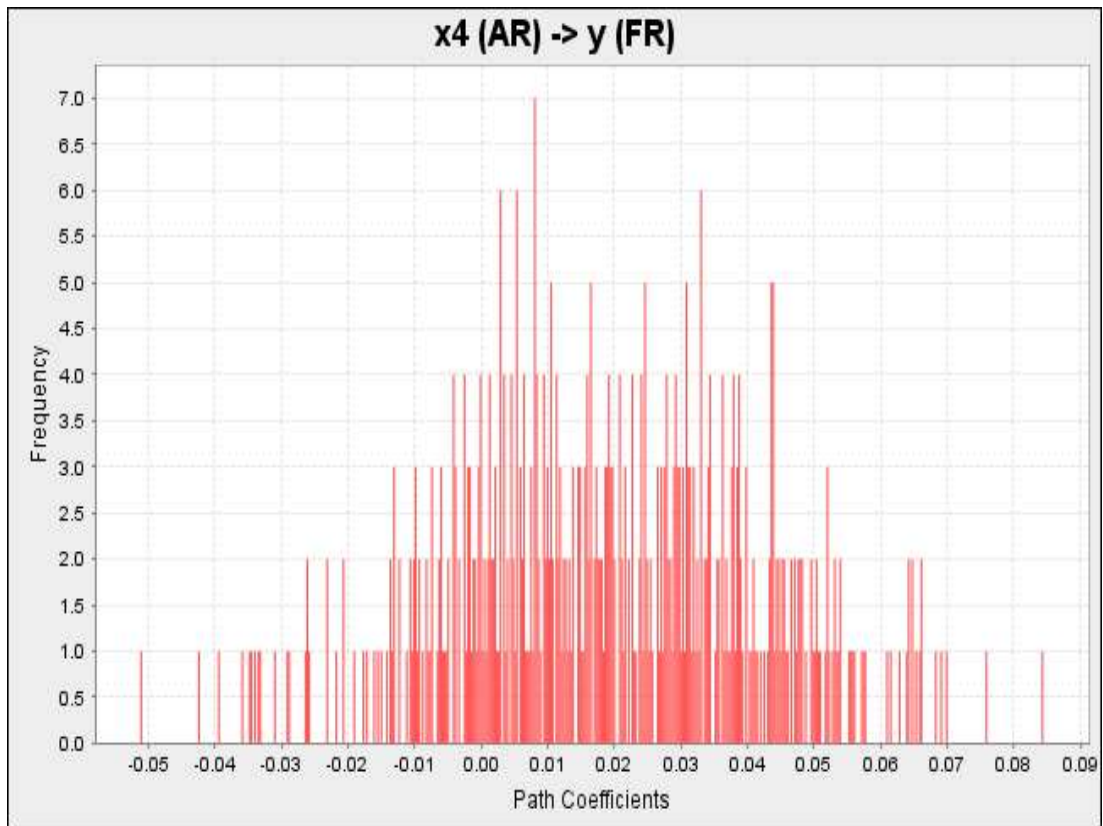
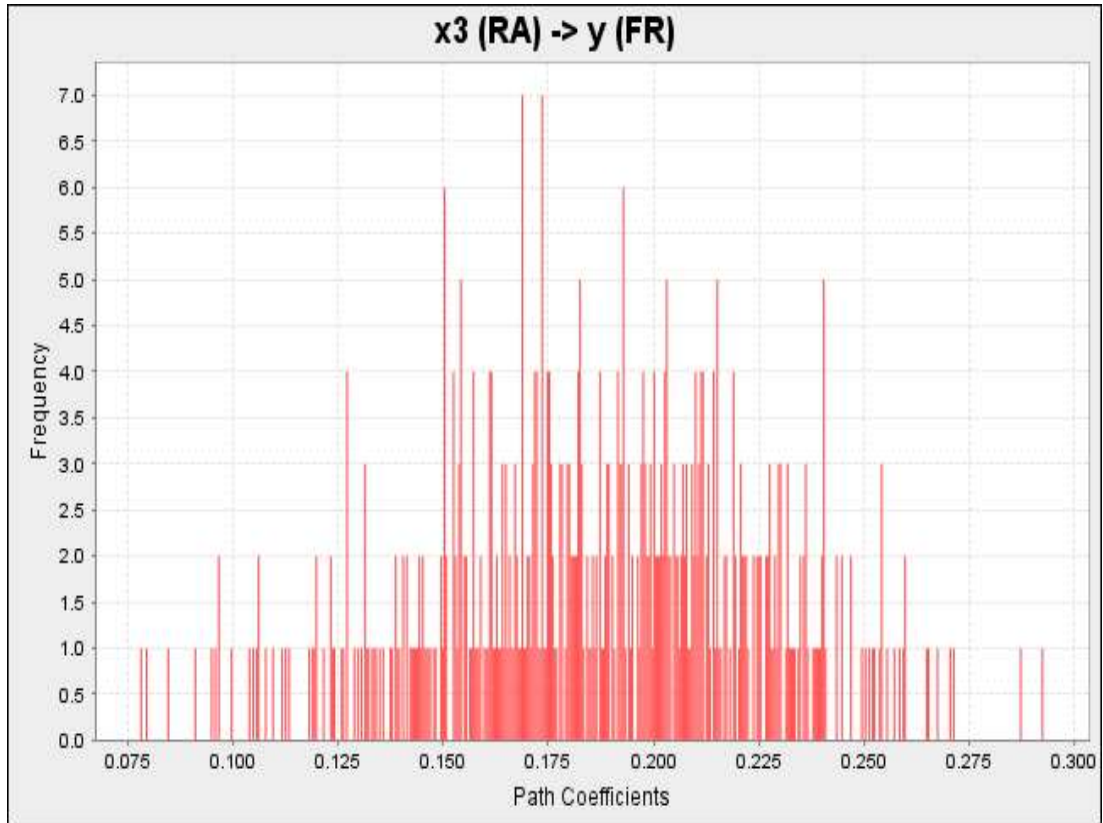
Lampiran 4 : Diagram Model (PLS Algorithm) - Akhir

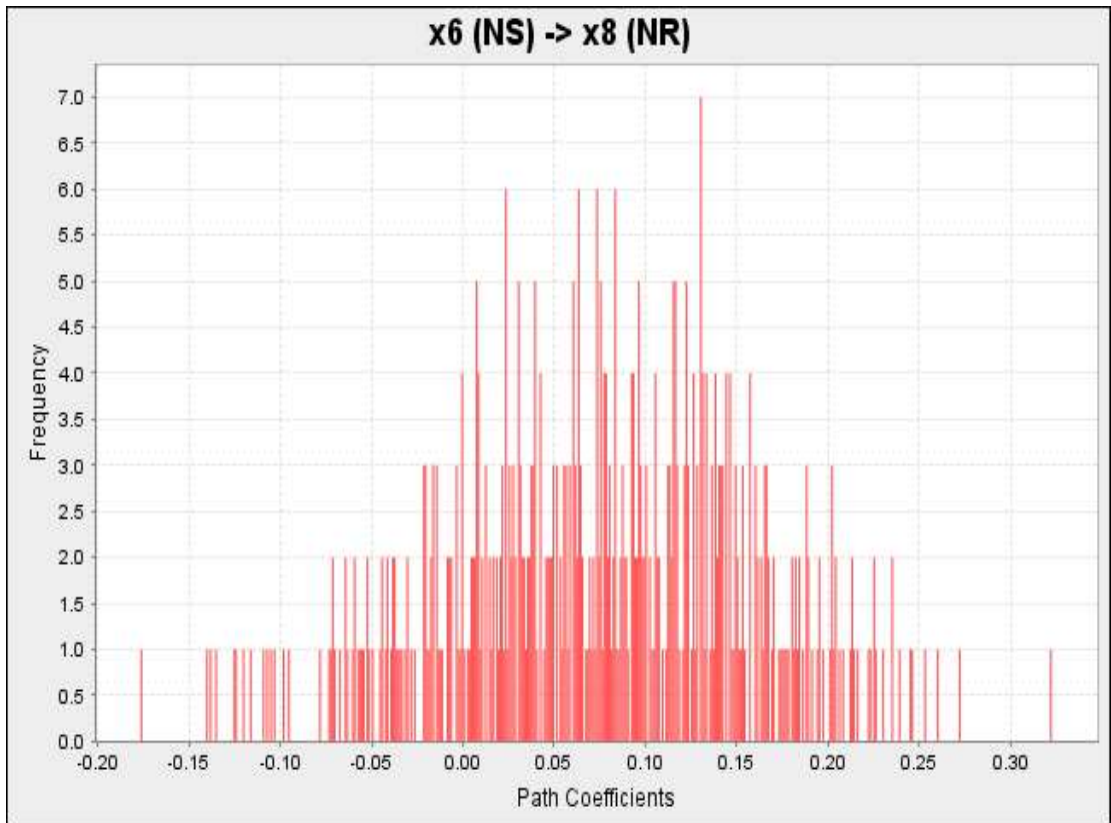
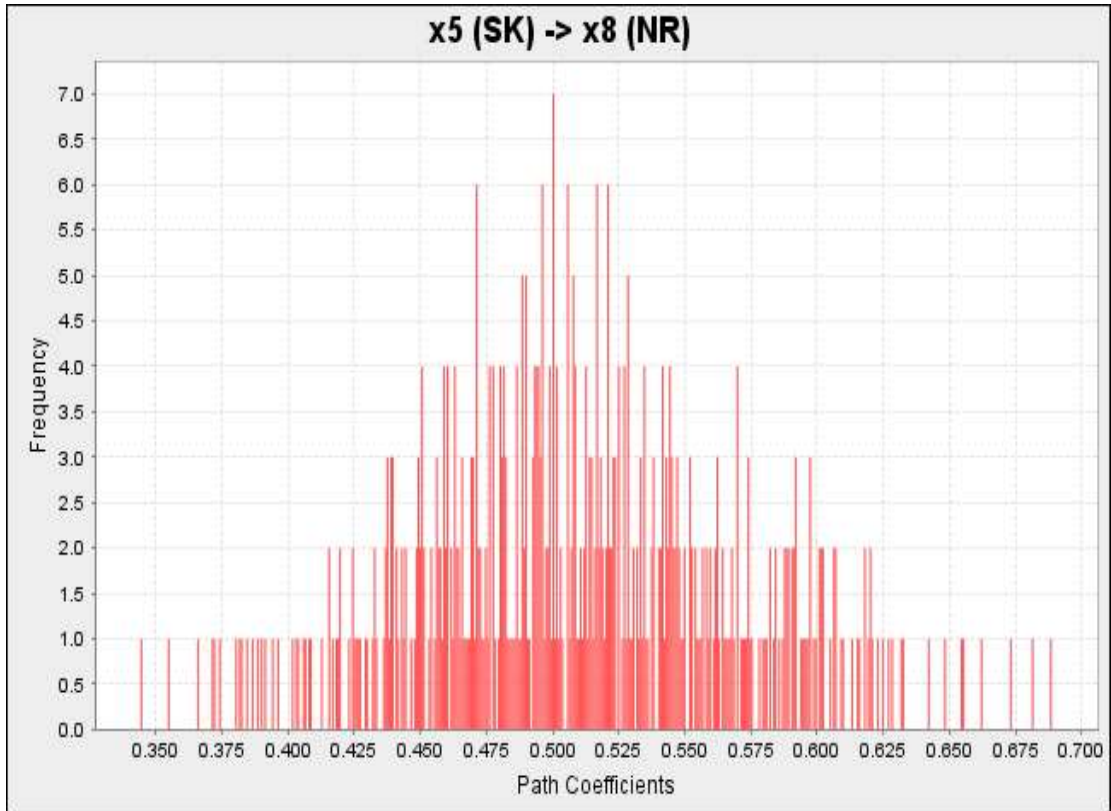


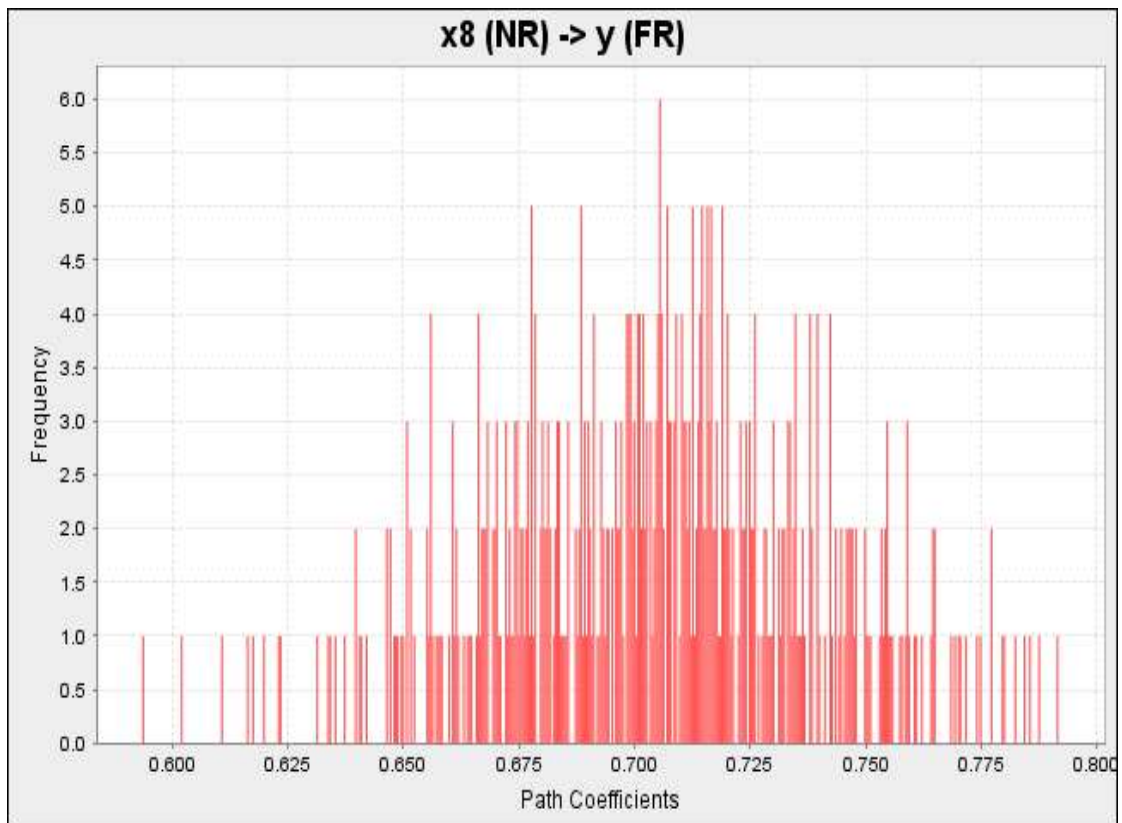
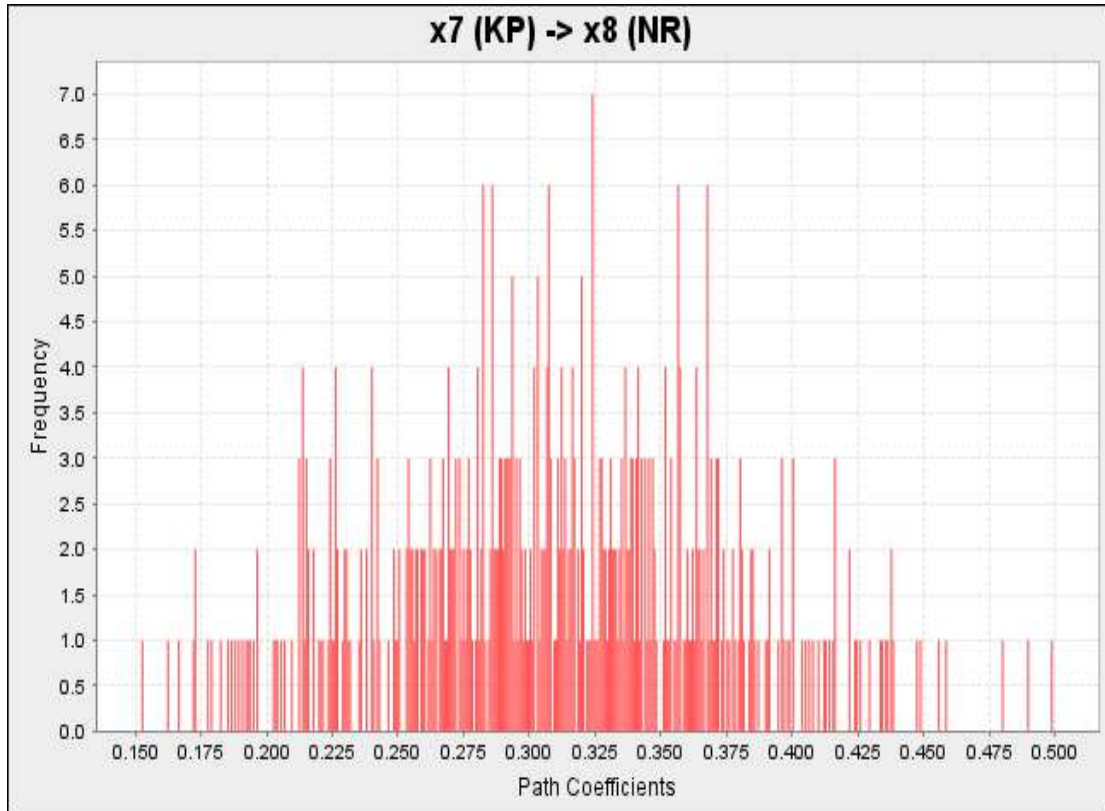
اجا اېس اېس

Lampiran 5 : Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

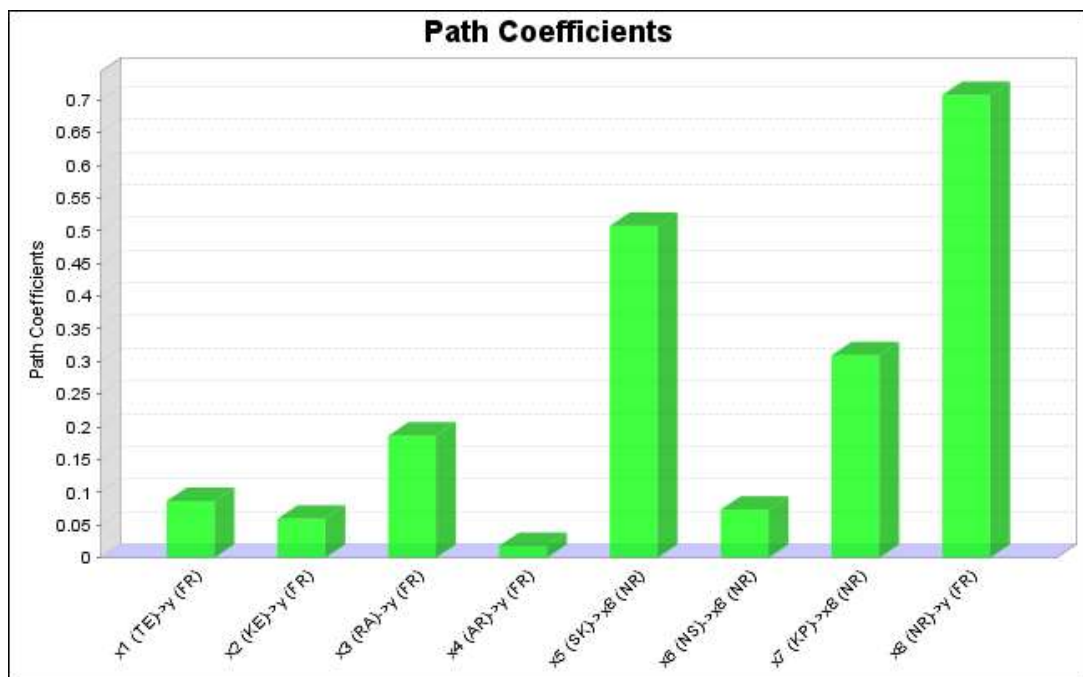
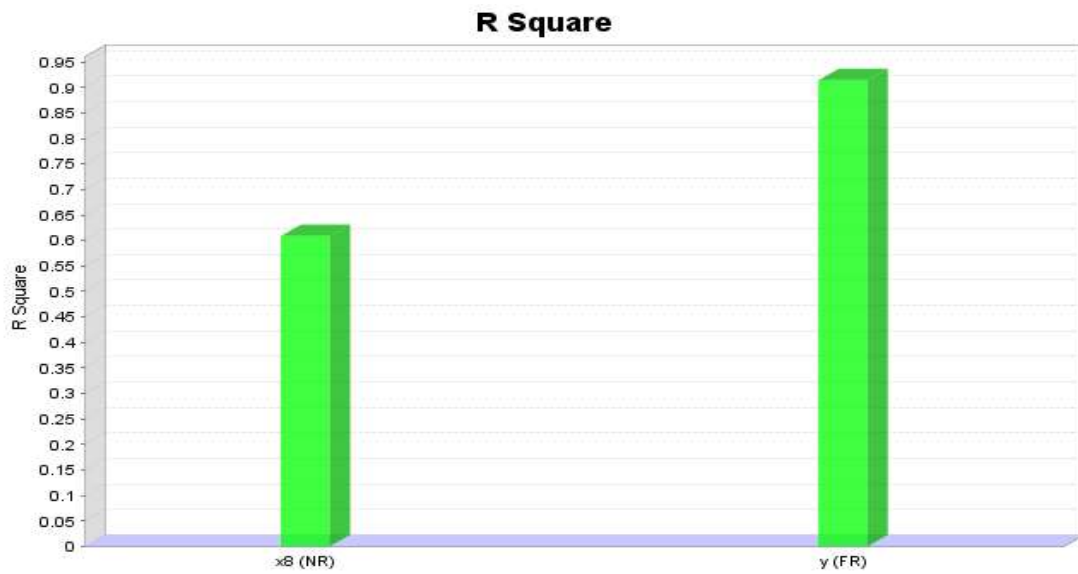




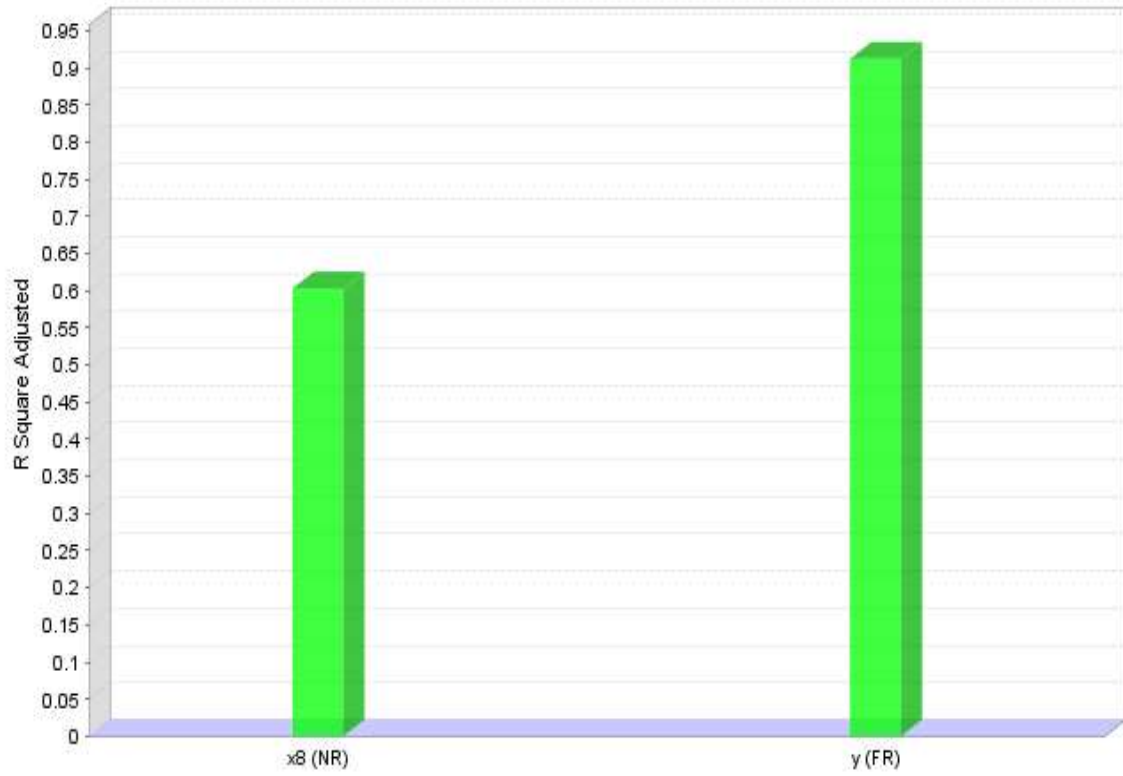




Lampiran 6 : Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)



R Square Adjusted



f Square

